

Pada tahun 2012 isu yang menghantui kondisi perekonomian global adalah dampak dari krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diketahui kedalamannya. Krisis ini berawal dari defisit anggaran yang dialami oleh negara-negara di kawasan Eropa. Secara spesifik, krisis diawali dari negara Yunani, Irlandia, dan Portugal. Sementara itu, melebarinya defisit anggaran Pemerintah juga dibarengi dengan kenaikan rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga menekan kemampuan memperoleh pembiayaan atas defisit. Tidak berfungsinya kebijakan moneter dalam kawasan Euro dan terbatasnya ruang gerak fiskal ikut mendorong perlambatan bahkan penurunan perkenomian negara lainnya dalam kawasan tersebut.

Terjadinya perambatan krisis keuangan Eropa yang bersumber dari sistem keuangan yang saling terkait dan kompleks baik di dalam maupun di luar kawasan Eropa dikhawatirkan oleh beberapa pihak akan menjelma menjadi krisis ekonomi global. Negara yang paling mungkin mengalami dampak buruk adalah negara ekonomi maju seperti Jepang dan Amerika yang secara tradisional memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara di zona Eropa. Bagaimana dengan Indonesia, akankah krisis tersebut juga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional?

Para peneliti dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tersebut melalui kajian terhadap sejumlah isu yang terekam dalam buku ini. Secara tematik ada tujuh isu mengenai dampak krisis ekonomi Eropa yang dikaji dalam buku ini, yakni: (1) Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi Eropa Terhadap Perekonomian Indonesia; (2) Krisis Eropa sebagai Momentum Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia; (3) Dampak Krisis Eropa terhadap Surat Berharga Negara; (4) Ketahanan Ekspor Indonesia dalam Menghadapi Krisis Eropa; (5) Antisipasi Krisis Eropa melalui Pemantapan Ketahanan Pangan Indonesia; (6) Analisis Ekspor Kakao Indonesia dan Krisis Finansial Uni Eropa: Pendekatan Analisa Deskriptif dan Ekonometrika; (7) Dampak Krisis Ekonomi Eropa terhadap Upaya Penurunan Emisi Global dan Implikasinya bagi Indonesia.

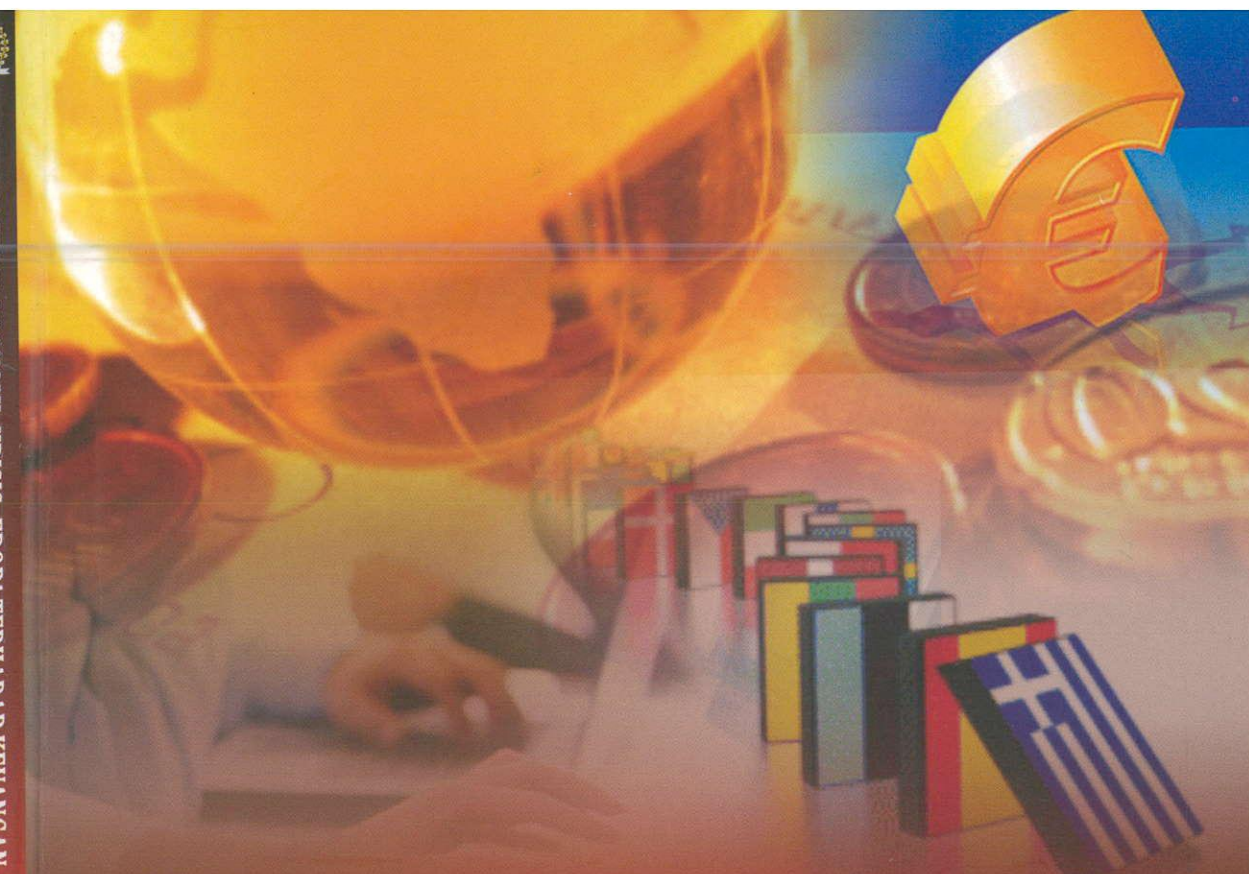


Diterbitkan oleh :  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika



DAMPAK EKONOMI KRISIS EROPA TERHADAP KEUANGAN, RIIL, & LINGKUNGAN

Penyunting:  
Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.A.



# D a m p a k E k o n o m i KRISIS EROPA TERHADAP KEUANGAN, RIIL & LINGKUNGAN

Penyunting:  
Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.A.



# **DAMPAK KRISIS EKONOMI EROPA TERHADAP SEKTOR KEUANGAN, RIIL, DAN LINGKUNGAN**

**Penyunting:**

**Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.A.**



**DITERBITKAN OLEH:  
P3DI SETJEN DPR REPUBLIK INDONESIA  
DAN AZZA GRAFIKA**





**Judul:**

Dampak Krisis Ekonomi Eropa terhadap Sektor Keuangan, Riil, dan Lingkungan

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ix+153 hal. ; 17x24 cm

Cetakan Pertama, 2012

ISBN: 978-979-9052-68-1

**Penulis:**

Rasbin

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

Ari Mulianta Ginting

Eka Budi yanti

Galuh Prila Dewi

Iwan Hermawan

Hariyadi

**Penyunting:**

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.A.

**Desain Sampul:**

Fery C. Syifa

**Tata Letak:**

Zaki

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/ DIY/ 2012

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



## KATA PENGANTAR PENYUNTING

Krisis keuangan Eropa harus menjadi pelajaran paling berharga masa kini dalam menetapkan kebijakan ekonomi setiap negara di masa datang. Defisit anggaran negara sebagai akibat salah kelola hutang yang terjadi di beberapa negara Eropa tidak saja telah memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut, namun juga menjalar ke negara lainnya di dunia. Dampak buruk krisis tersebut tidak seorangpun yang tahu kapan berakhirnya. Bahkan beberapa pihak mengkhawatirkan krisis ini akan menjelma menjadi krisis ekonomi global. Hal ini karena dampak buruk krisis tersebut telah “meluluh lantahkan” ketegaran dua ekonomi adidaya Jepang dan Amerika yang secara tradisional memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara di zona Eropa.

Untuk mengurangi dampak buruk dan penularan krisis tersebut, tentu pilihan kebijakan yang bersifat *“business as usual was not an option”*. Pasalnya, tantangan di masa datang tidak hanya terbatas pada upaya bagaimana pemerintah di negara Eropa bahu membahu menalangi krisis hutang pemerintah tersebut, melainkan karena dinamika ekonomi global ke depan juga dirongrong beban dampak negative perubahan iklim dan kelangkaan sumberdaya *vi a vis* pertumbuhan penduduk dunia yang tidak dapat dihentikan.

Buku yang ditulis oleh para peneliti dan pemikir muda dengan judul Dampak Krisis Ekonomi Eropa Terhadap Sektor Keuangan, Riil, dan Lingkungan ini ditujukan untuk mengungkapkan berbagai pelajaran penting dari dampak krisis tersebut dan bagaimana kaitannya dengan perekonomian Indonesia. Bab pertama, sdr. Rasbin dengan kritis mendiskusikan bagaimana “Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi Eropa Terhadap Perekonomian Indonesia”. Dengan metoda analisis deskriptif, Sdr. Rasbin meyakini bahwa krisis ekonomi Eropa tidak akan menyentuh Indonesia karena beberapa sebab, Diantaranya adalah karena tidak signifikannya porsi utang Indonesia ke negara-negara Eropa dan eksposur perekonomian yang relatif kecil.

Bab kedua memuat tulisan Sahat Aditua Fandhitya Silalahi yang berjudul “Krisis Eropa Sebagai Momentum Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia”. Penulis memusatkan perhatian pada kedalaman krisis keuangan Eropa yang hingga pada saat ini belum dapat diprediksi dikhawatirkan akan memberi dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Terkait dengan krisis finansial Eropa, banyak pihak memperkirakan Indonesia tidak akan terkena dampak signifikan. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah rendahnya nilai perdagangan antara Indonesia dan negara Uni Eropa.



Bab ketiga berisi tulisan Ari Mulianta Ginting yang berjudul “Dampak Krisis Eropa Terhadap Surat Berharga Negara”. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memusatkan kajian pada isu dampak krisis Eropa yang bersumber dari dana asing yang masuk ke Indonesia, khususnya dalam bentuk Surat Berharga Negara. Yang perlu diperhatikan penentu kebijakan adalah bagaimana merubah atau mentransformasi dana asing tersebut menjadi dana yang dapat dikendalikan dalam hal volatilitas aliran modal dan nilai kurs.

Selanjutnya, pada bab ke empat sdri. Eka Budiyantri memaparkan satu isu spesifik penting mengenai “Ketahanan ekspor Indonesia menghadapi krisis eropa dalam era perdagangan global”. Dalam catatan penutup, penulis memaparkan bahwa krisis yang melanda Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2011 lalu tentunya berdampak pada perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur, salah satunya melalui perdagangan. Krisis tersebut menandakan adanya perlambatan ekonomi masyarakat Eropa dan AS yang berimbas pada penurunan permintaan akan barang ekspor.

Bab kelima berjudul “Antisipasi Krisis Eropa Melalui Pemantapan Ketahanan Pangan Indonesia” ditulis oleh Galuh Prila Dewi. Penulis memberikan penekanan terhadap antisipasi krisis Eropa dengan mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan yang berbasiskan kemandirian pangan. Kemandirian pangan menekankan pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi dalam negeri. Penulis juga menyimpulkan bahwa ketergantungan pangan pada impor memberikan implikasi bahwa Indonesia menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangan kepada negara lain.

Bab keenam berisi tulisan Iwan Hermawan dengan judul “Analisis Ekspor Kakao Indonesia dan Krisis Finansial Uni Eropa: Pendekatan Analisa Deskriptif dan Ekonometrika”. Dengan pendekatan yang sifatnya kuantitatif, tulisan ini memfokuskan analisis ekspor kakao Indonesia sebagai salah satu komoditas andalan ekspor.

Akhirnya, sdr. Hariyadi menutup buku ini dengan tulisan berjudul “Dampak Krisis Ekonomi Eropa Terhadap Upaya Penurunan Emisi Global dan Implikasinya Bagi Indonesia” pada bab ketujuh. Isu ini diungkapkan disini karena adanya kemungkinan melemahnya komitmen Uni Eropa dalam serangkaian program kerja sama mengatasi perubahan iklim dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reorientasi kebijakan penurunan emisi dalam rangka memenuhi serangkaian tujuan yang telah ditetapkan baik untuk kepentingan nasional maupun global.



Penyunting memberikan apresiasi tinggi dan ucapan selamat kepada tim penulis dari Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI atas terbitnya buku ini. Penyunting meyakini kajian dalam buku ini dapat memberikan inspirasi dan sekaligus masukan penting bagi para pengambil kebijakan, terutama pihak legislatif dalam merumuskan keputusan pembangunan strategis nasional bersama pihak eksekutif. Buku ini juga diyakini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang ingin mendalami pengetahuan tentang dampak krisis ekonomi Eropa terhadap sektor keuangan, riil, dan lingkungan serta implikasinya bagi perekonomian nasional.

Penyunting,

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.A.



## DAFTAR ISI

Pengantar Penyunting .....	iii
Daftar Isi .....	vii

### Bab I

#### **Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia**

<i>oleh : Rasbin</i> .....	1
Pendahuluan.....	3
Pengertian dan Konsep tentang Krisis, Penyebab Krisis, dan Jalur Penyebaran Efek Krisis Ekonomi.....	7
Strategi-Strategi Antisipasi Dampak Krisis Eropa terhadap Perekonomian Indonesia .....	10
Catatan Penutup.....	15
Daftar Pustaka.....	16

### Bab II

#### **Implikasi Krisis Eropa Terhadap Surat Berharga Negara**

<i>oleh: Ari Mulianta Ginting</i> .....	19
Pendahuluan.....	21
Potensi dan Jenis Dampak yang Terjadi.....	23
Pembahasan.....	25
Prospek Indonesia Ditengah Krisis Eropa .....	26
Krisis Eropa dan Surat Berharga Negara.....	29
Catatan Penutup.....	34
Daftar Pustaka.....	36

### Bab III

#### **Krisis Eropa Sebagai Momentum**

#### **Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia**

<i>oleh : Sahat Aditua Fandhitya Silalahi</i> .....	39
Pendahuluan.....	41
Pasar Keuangan dan Perannya dalam Perekonomian .....	44
Pasar Keuangan, Obligasi, dan Saham di Indonesia.....	46
Pendalaman Pasar Obligasi .....	50



Pendalaman Pasar Saham.....	54
Catatan Penutup.....	56
Daftar Pustaka.....	58

## **Bab IV**

### **Kondisi dan Perkembangan Ekspor Indonesia dalam Krisis Eropa**

<i>oleh : Eka Budiyantri</i> .....	61
Pendahuluan.....	63
Penyebab Terjadinya Krisis Eropa .....	64
Kondisi dan Perkembangan Ekspor Indonesia dalam Krisis Eropa.....	68
Catatan Penutup.....	76
Daftar Pustaka.....	77

## **Bab V**

### **Perkembangan Perdagangan dan Faktor Penentu**

#### **Permintaan Kakao Indonesia**

<i>oleh : Iwan Hermawan</i> .....	79
Pendahuluan.....	81
Permasalahan.....	83
Tinjauan Teori dan Empiris.....	84
Pasar Kakao Indonesia .....	87
Perdagangan Kakao di Dunia.....	90
Perdagangan Kakao Indonesia dan Krisis Finansial.....	92
Penutup.....	102
Daftar Pustaka.....	103

## **Bab VI**

### **Antisipasi Krisis Eropa Melalui Pemantapan**

#### **Ketahanan Pangan Indonesia**

<i>oleh : Galuh Prila Dewi</i> .....	107
Pendahuluan.....	109
Penyebab Krisis Eropa.....	110
Dampak terhadap Perdagangan Luar Negeri .....	113
Dampak terhadap Investasi dan Neraca Pembayaran.....	114
Krisis Eropa dan Ketahanan Pangan Indonesia.....	116
Antisipasi dan Kebijakan dalam Menghadapi Krisis Eropa .....	120
Catatan Penutup.....	123
Daftar Pustaka.....	124



## **Bab VII**

### **Dampak Krisis Ekonomi Eropa terhadap Upaya Penurunan Emisi Global dan Implikasinya bagi Indonesia**

<i>oleh : Hariyadi</i> .....	127
Pendahuluan.....	129
<i>The Copenhagen Accord</i> dan Politik Perubahan Iklim UE.....	131
Paradigma Tata Kelola Global: Inklusivisme Partisipatoris .....	137
Reorientasi Kebijakan Penurunan Emisi Indonesia .....	141
Penutup.....	146
Daftar Pustaka.....	148
Biografi Penulis.....	151

**BAB I**  
**STRATEGI ANTISIPASI EFEK KRISIS EKONOMI EROPA**  
**TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

*Rasbin\**

---

\* Penulis adalah Peneliti Muda dalam Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: ras9bin@yahoo.co.id.



## PENDAHULUAN

Dunia, tampaknya tak pernah sepi dari peristiwa yang namanya krisis. Seperti yang dinyatakan oleh Hyman P. Minsky dan Charles P. Kindleberger. Hyman P. Minsky pernah mengatakan bahwa dunia akan selalu dihantui oleh krisis yang datang silih berganti, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan bermutasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hal senada juga dikemukakan oleh Charles P. Kindleberger yang menyatakan bahwa krisis akan selalu menjadi topik yang aktual dalam cabang ilmu ekonomi. Artinya krisis akan selalu terjadi dan menimpa dunia ini tetapi yang membedakannya hanya tempat terjadinya krisis.<sup>1</sup>

Tahun 1997/1998, dunia khususnya kawasan Asia termasuk Indonesia, dikejutkan dengan krisis ekonomi yang parah. Krisis ekonomi 1997/1998 ini telah menghancurkan perekonomian beberapa negara di Asia seperti Indonesia dan Thailand. Setelah berlalunya krisis ekonomi 1997/1998, krisis ekonomi kembali melanda dunia yakni krisis surat utang berkualitas rendah (*subprime mortgage*) yang melanda perbankan dan pasar keuangan Amerika Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2008. Belum juga reda krisis *subprime mortgage* melanda AS, krisis ekonomi dalam bentuk krisis surat utang pemerintah (*government bond*) sudah melanda kawasan Eropa (*Euro Zone*) atau yang lebih dikenal dengan Krisis Eropa.

Krisis Eropa yang melanda negara-negara *Euro Zone* dimulai dengan bangkrutnya neraca keuangan pemerintah Yunani akibat terlalu besarnya defisit anggaran negara tersebut, yakni lebih dari 12 persen. Padahal, menurut kesepakatan negara-negara *Euro Zone*, defisit anggaran tak boleh lebih dari 3 persen dari *Gross Domestic Bruto* (GDP). Dari Yunani, krisis tersebut menyebar dan menyerang negara Eropa lapis pertama lainnya, seperti Portugal dan Irlandia.<sup>2</sup> Penularan krisis ini ternyata tidak berhenti di negara lapis pertama, karena kemudian menjalar ke negara-negara Eropa lapis kedua, seperti Italia dan Spanyol.<sup>3</sup>

Selain defisit anggaran yang lebar, faktor pemicu utama krisis Eropa lainnya adalah sangat tingginya rasio utang terhadap GDP sejumlah negara di *Euro Zone* ditambah penggunaan utang yang tidak efisien dan terarah. Utang negara-negara *Euro Zone* sudah lebih dari 100 persen dari GDP-nya.<sup>4</sup> Ambil

<sup>1</sup> A.Prasetyantoko, *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> BAPPENAS, *Krisis Keuangan Eropa: Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Triwulanan, Triwulan IV 2011* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

<sup>4</sup> "Krisis Zona Euro: Tsunami Ekonomi Global Tahun 2013 Semakin Nyata", *Kompas*, 10 Mei 2012.

contoh Swiss, Denmark, Belgia, dan Belanda yang memiliki rasio utang diatas 300 persen, diikuti oleh Austria, Finlandia dan Swedia (diatas 200 persen) serta Italia, Spanyol, Yunani dan Jerman (diatas 100 persen). Bahkan Irlandia memiliki rasio utang yang sangat fantastis, yaitu sebesar 1382 persen.<sup>5</sup> Seharusnya utang negara maksimum hanya 60 persen dari GDP-nya.

Oleh karena itu, negara-negara *Euro Zone* sudah dibilang terbelit utang (*debt over-hang*).<sup>6</sup> Fakta-fakta ini menyebabkan beberapa lembaga pemeringkat utang, seperti Moody's, Standard & Poor, dan Fitch, menurunkan peringkat utang negara-negara *Euro Zone*, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Peringkat Utang Euro Zone**

No.	Negara	Moody's	S&P	Fitch
1.	Prancis	Aaa	AA+	AAA
2.	Austria	Aaa	AAA	AAA
3.	Malta	A2	A	A+
4.	Slovakia	A1	A+	A+
5.	Slovenia	A1	AA-	AA-
6.	Italia	A2	A	A+
7.	Spanyol	A1	AA-	AA-
8.	Portugal	Ba2	BBB	BB+
Peringkat Investment Grade				
Aaa/AAA Resiko Minimal		Aa/AA Sangat Rendah	A/A Resiko Rendah	Baa/BBB Resiko Substansial
				Ba/BB Resiko Substansial

Sumber: "Waspadai Imbas Rating Eropa", Republika, 18 Januari 2012

Sampai saat ini, krisis Eropa belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal ini karena belum ditemukannya solusi yang tepat untuk pemecahan krisis Eropa tersebut. Berlarut-larutnya krisis Eropa, berdasarkan Laporan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), menyebabkan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya sekitar 3,4 persen pada tahun 2012 ini atau turun 0,2 persen tahun 2011 yang lalu. Selain itu, sebanyak 34 negara OECD akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 1,8 persen pada tahun 2011 menjadi 1,6 persen pada tahun 2012 ini. Negara-negara yang menggunakan mata uang euro (sebanyak 17 negara) diprediksi pertumbuhan ekonominya hanya 0,1 persen. Oleh karena itu, perekonomian negara-negara *Euro Zone* benar-benar menghadapi situasi sulit dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah (*flat growth*).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Fred Benu, "Belajar dari Krisis Ekonomi Eropa", *Suara Pembaruan*, 2 Februari 2012.

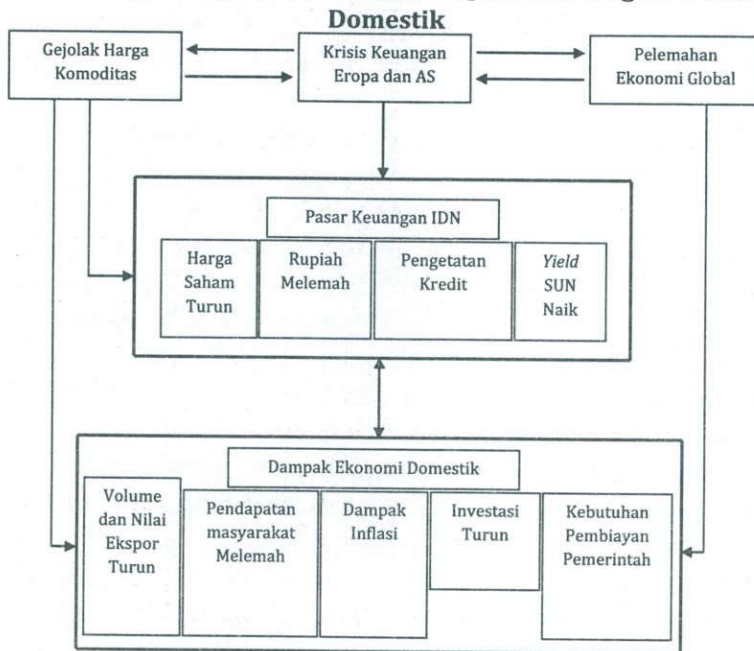
<sup>6</sup> *Loc.cit.*

<sup>7</sup> A. Prasetyantoko, "Mengantisipasi Krisis Eropa", *Kompas*, 29 Mei 2012.



Indonesia pun tak lepas dari efek krisis ekonomi yang melanda Eropa, mengingat perekonomian Indonesia yang semakin terbuka. Krisis Eropa diperkirakan akan memberi pengaruh terhadap perekonomian domestik Indonesia melalui berbagai transmisi. Secara umum, pengaruh krisis Eropa terhadap perekonomian Indonesia mengalir melalui beberapa kemungkinan transmisi yaitu: (1) transmisi moneter dan keuangan melalui perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, kredit, dan *yield* surat utang pemerintah; (2) transmisi fiskal seperti utang luar negeri; (3) transmisi perdagangan berupa ekspor dan impor; (4) transmisi investasi berupa *foreign direct investment* (FDI) dan Portofolio dan (5) transmisi komoditas berupa perubahan harga komoditas (lebih lengkapnya lihat Gambar 1).<sup>8</sup>

**Gambar 1. Dampak Gejala Ekonomi di Eropa dan AS Bagi Perekonomian Domestik**



Sumber: William Wallace (2009) dalam BAPPENAS (2011)

Salah satu efek Krisis Eropa terhadap perekonomian Indonesia adalah perubahan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sudah mencetak rekor tertinggi pada kisaran 4.224,18 pada 3 Mei 2012 kemudian merosot lagi akibat koreksi yang terjadi berkali-kali.<sup>9</sup> Pada tanggal 31 Mei 2012 IHSG ditutup melemah 103,48 poin (2,64

<sup>8</sup> BAPPENAS, *op.cit.*

<sup>9</sup> "Krisis Eropa dan Teori Random Walk", 20 Juni 2012 ([www.seputar-indonesia.com](http://www.seputar-indonesia.com), diakses tanggal 20 Juni 2012).

persen) ke level 3.814,432. Kemudian tanggal 6 Juni 2012 IHSG menyentuh besaran 3.841,33. Hal ini karena tidak adanya kepastian tentang perkembangan krisis yang terjadi di Eropa terutama Yunani.<sup>10</sup>

Selain mempengaruhi harga saham di BEI, Krisis Eropa juga memperlemah nilai tukar rupiah karena adanya aksi jangka pendek investor menarik portfolionya. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sepanjang tahun 2012 per 31 Mei 2012 (*year to date*) mengalami depresiasi sebesar 4,06 persen ke tingkat Rp9.453 per dollar AS.<sup>11</sup>

Pada akhirnya krisis Eropa terasa pada sektor riil seperti ekspor, investasi dan pendapatan masyarakat. Akibat krisis Eropa, kinerja ekspor Indonesia mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekspor Indonesia pada Triwulan I 2012 turun dari 27,7 persen menjadi 6,9 persen. Pangsa pasar ekspornya juga mengalami perubahan yang sebelumnya terbesar ke Eropa sekarang bergeser ke Cina dengan nilai 4,99 miliar dollar AS, Jepang 4,52 miliar dollar AS, dan Amerika Serikat 3,68 miliar dollar AS.<sup>12</sup>

Efek krisis Eropa akan mempengaruhi perekonomian domestik Indonesia baik sektor moneter maupun sektor riil seperti sektor ekspor, pangan, surat berharga negara, dan pasar uang, juga sektor diluar sektor moneter dan riil yaitu emisi global. Hal itu merupakan alarm sekaligus tantangan antisipatif bagi Indonesia. Tujuannya agar Indonesia tidak terjebak lagi dalam kubangan krisis seperti krisis ekonomi 1997/1998 yang lalu. Oleh karena itu, pentingnya penyusunan strategi untuk mengantisipasi efek yang lebih dalam dan buruk dari krisis Eropa terhadap perekonomian Indonesia.

Bab ini tujuannya fokus pada pembahasan tentang strategi-strategi antisipasi efek dari krisis Eropa terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pada bagian kedua berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan konsep umum tentang krisis, penyebab krisis dan jalur penyebaran efek krisis ekonomi sebagai latar belakang analisis. Kemudian di bagian ketiga dibahas strategi-strategi antisipasi efek dari krisis Eropa terhadap perekonomian Indonesia. Akhirnya, catatan penutup untuk melaksanakan strategi-strategi antisipasi efek dari krisis Eropa terhadap perekonomian Indonesia secara efektif dan efisien diberikan di bagian keempat.

---

<sup>10</sup> "Saham: IHSG Uji Support, Wait and See Saja", 31 Mei 2012 ([www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), diakses tanggal 31 Mei 2012).

<sup>11</sup> "Menkeu: Per 31 Mei 2012, Rupiah Terdepresiasi 4,06%", 31 Mei 2012 ([www.pasarmodal.inilah.com](http://www.pasarmodal.inilah.com), diakses tanggal 31 Mei 2012).

<sup>12</sup> "Krisis Eropa Pengaruhi Ekspor", *Kompas*, 23 Mei 2012.



## PENGERTIAN DAN KONSEP UMUM TENTANG KRISIS, PENYEBAB KRISIS DAN JALUR PENYEBARAN EFEK KRISIS EKONOMI

Krisis ekonomi, menurut Charles P. Kindleberger, selalu terjadi dari waktu ke waktu sedangkan yang membedakan antara krisis ekonomi yang satu dengan lainnya adalah sumber penyebab krisis ekonomi tersebut.<sup>13</sup> Namun, sebelum mengulas sumber-sumber penyebab krisis ekonomi, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari krisis ekonomi.

Kata krisis dapat diartikan sebagai keadaan yang genting, kemelut, atau keadaan yang suram.<sup>14</sup> Jadi, krisis ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang genting juga suram dalam bidang ekonomi sehingga dapat menurunkan kegiatan ekonomi di suatu negara, wilayah bahkan dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa krisis ekonomi adalah transisi yang tajam menuju resesi.<sup>15</sup>

Sumber-sumber penyebab terjadinya krisis ekonomi dapat bermacam-macam jenisnya. Beberapa tipologi penyebab krisis ekonomi (khususnya krisis keuangan), secara umum meliputi 5 hal berikut ini:<sup>16</sup>

### 1. Kebijakan Ekonomi Makro yang Tidak Konsisten

Kebijakan ekonomi makro yang tidak konsisten dapat dilihat dengan menganalisis krisis yang terjadi pada neraca pembayaran negara yang bersangkutan. Untuk negara yang menganut sistem nilai tukar tetap dengan cara melihat kejatuhan nilai tukar mata uang akibat ekspansi kredit domestik oleh bank sentral adalah tidak konsisten dengan target nilai tukar mata uang. Biasanya krisis neraca pembayaran dibarengi dengan defisit anggaran belanja pemerintah.<sup>17</sup>

### 2. Kepanikan di Pasar Uang

Krisis ekonomi terjadi karena penarikan besar-besaran atas dana kredit yang diberikan oleh kreditor asing. Hal ini menyebabkan kekurangan likuiditas terhadap mata uang asing (cadangan devisa). Dampak akhirnya adalah mata uang domestik semakin jatuh (*flight to quality*).

### 3. Pecahnya Gelembung Finansial

Terjadinya gelembung finansial (*financial bubble*) jika spekulasi membeli aset keuangan pada harga di atas harga fundamentalnya dengan harapan

<sup>13</sup> A.Prasetyantoko, *op. cit.*

<sup>14</sup> A.Prasetyantoko, *loc. cit.*

<sup>15</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

<sup>16</sup> Radelet dan Sachs, "The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects", p.1-74, dikutip tidak langsung oleh M. Handry Imansyah, *Krisis Keuangan di Indonesia Dapatkah Diramalkan?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2009), p.12-17.

<sup>17</sup> Krugman, "A Model of Balance-of-Payments Crises", p.311-325, dikutip tidak langsung oleh M. Handry Imansyah, *ibid.*

mendapatkan *capital gain*.<sup>18</sup> Tetapi, krisis akan terjadi bila pelaku pasar mulai menyadari mengenai *bubble*. Ini artinya bahwa krisis sebenarnya bukannya tidak terdeteksi. Setelah pelaku pasar menyadarinya, maka para pelaku pasar segera menjual seluruh aset yang dimilikinya dengan menukarkannya dalam mata uang asing, sehingga mata uang domestik mengalami kejatuhan.

#### 4. Moral Hazard

*Moral hazard* terjadi karena adanya jaminan pemerintah dan lemahnya penegakan aturan. Hal ini menjadi salah satu penyebab investasi yang berlebihan dan berisiko oleh perbankan dan lembaga keuangan yang dapat meminjam kredit sehingga mereka berhutang lebih besar dari modal mereka sendiri.<sup>19</sup> Kreditor asing dan domestik melakukan pemberian kredit yang berisiko tinggi karena mereka mengetahui bahwa pemerintah dan lembaga keuangan internasional akan memberikan talangan bila mereka menghadapi masalah.

#### 5. Ketidadaan Aturan Baku

Tidak adanya sistem kebangkrutan atau kepailitan dalam kasus di mana korporasi menghadapi masalah likuiditas merupakan salah satu penyebab krisis, karena berkaitan erat dengan pemegangan aset-aset yang harus dilikuidasi.<sup>20, 21</sup> Tidak adanya cara dalam menata ulang tagihan untuk kasus masalah likuiditas internasional maka akan mengakibatkan timbulnya kredit macet.

Literatur yang lain menyebutkan bahwa sumber penyebab krisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>22</sup>

#### 6. Kelemahan fundamental

Interaksi antara lembaga keuangan domestik yang lemah dan *capital inflows* yang besar. Over investasi dalam proyek yang buruk menimbulkan *moral hazard* di lembaga keuangan dan penggunaan pinjaman yang buruk di antara debitur.

#### 7. Kepanikan finansial yang tidak dapat dihindarkan, rational “bank runs” terhadap ekonomi.

Tingginya *short-term debt* menyebabkan tingginya *default risks* dan ekspektasi *default* di sisi investor. Kepanikan selanjutnya mendorong *self-fulfilling crises*.

---

<sup>18</sup> Blanchard dan Watson, “Bubbles, Rational Expectations, and Financial Markets”, dikutip tidak langsung oleh M. Handry Imansyah, *ibid*.

<sup>19</sup> Akerlof dan Romer, “Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit”, dikutip tidak langsung oleh M. Handry Imansyah, *ibid*.

<sup>20</sup> Sachs, Tornell dan Velasco, “Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995”, dikutip tidak langsung oleh M. Handry Imansyah, *ibid*.

<sup>21</sup> Miller dan Zhang, “Sovereign Liquidity Crisis: The Strategic Case for a Payments Standstill”, dikutip tidak langsung oleh M. Handry Imansyah, *ibid*.

<sup>22</sup> Modul Kuliah Ekonomi Keuangan Internasional: Teori, Model Empiris, dan Kebijakan, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.



Krisis ekonomi, seperti yang terjadi di Eropa, akan mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur finansial (*financial channel*) dan jalur perdagangan (*trade channel*) atau jalur makroekonomi.<sup>23</sup>

#### 8. Jalur Finansial

Dampak krisis melalui jalur finansial dimungkinkan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung akan muncul apabila bank atau lembaga keuangan memiliki eksposur langsung terhadap aset-aset yang bermasalah (*toxic assets*), atau meskipun tidak memiliki aset bermasalah namun memiliki kaitan dengan lembaga keuangan yang memiliki eksposur yang besar terhadap aset bermasalah. Selain itu, transmisi dampak krisis melalui jalur finansial langsung juga muncul melalui aktivitas *deleveraging*, di mana investor asing yang mengalami kesulitan likuiditas terpaksa menarik dana yang tadinya ditanamkan di Indonesia.

Selain melalui keterkaitan terhadap aset bermasalah dan *deleveraging*, dampak langsung jalur finansial juga muncul melalui aksi *flight to quality*, yaitu penyesuaian portfolio dari aset yang dipandang beresiko ke aset yang lebih aman. Kondisi ini dipicu oleh munculnya perilaku *risk aversion* yang berlebihan dari investor menyusul goncangan yang terjadi di pasar keuangan. Sementara itu dampak tidak langsung dari jalur finansial akan muncul melalui terganggunya ketersediaan pembiayaan ekonomi.

#### 9. Jalur Perdagangan

Intensitas dampak krisis melalui jalur perdagangan telah mengakibatkan menurunnya kinerja pembayaran Indonesia (NPI). Tekanan pada kondisi NPI diantaranya didorong oleh memburuknya kinerja neraca berjalan yang dipicu oleh menurunnya kinerja ekspor, menyusul melemahnya permintaan global dan anjloknya harga-harga komoditas dunia. Rentannya ekspor Indonesia terhadap *shock* di kondisi eksternal ini sesungguhnya tidak terlepas dari karakteristik komoditas ekspor Indonesia.

##### a. Struktur Ekspor

Beberapa hal yang terkait dengan struktur ekspor yang berpotensi memperbesar dampak krisis melalui jalur perdagangan adalah ketergantungan terhadap komoditas primer, komoditas ekspor yang kurang terdiversifikasi, dan tingginya kandungan impor pada komoditas ekspor. Kontribusi sektor primer dalam struktur ekspor Indonesia tercatat cukup besar. Secara rata-rata dari 2005-2008 pangsa komoditas primer dalam total ekspor mencapai hampir 50 persen. Komoditas minyak dan gas merupakan komoditas primer dengan kontribusi terbesar, disusul oleh kelompok komoditas pertambangan dan pertanian.

<sup>23</sup> "Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014" (Jakarta: Bank Indonesia, Januari 2009).

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara emerging lainnya, ketergantungan Indonesia terhadap ekspor berbahan baku primer terlihat cukup tinggi, namun sedikit dibawah Brasil dan Vietnam. Negara-negara yang memiliki dependensi tinggi dengan sektor primer akan rentan terhadap shock eksternal yang bersumber dari boom-bust dalam harga komoditas internasional.<sup>24</sup>

b. Negara Tujuan Ekspor

Negara tujuan utama ekspor Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sejumlah negara, di mana lebih dari separuh pangsa ekspor tertuju ke empat sampai lima negara saja, yaitu Jepang, AS, Singapura, Korea, dan Cina. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Kurniati *et.al* (2008), sensitivitas pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia yang terbesar adalah dengan Singapura (1,19), dan selanjutnya adalah AS (0,84), Jepang (0,81), dan Cina (0,3).<sup>25</sup> Apabila dibandingkan dengan beberapa negara emerging market lain, tingkat diversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia juga terlihat cenderung lebih rendah.

Dengan karakteristik ekspor seperti yang diuraikan di atas, dampak krisis ke kinerja ekspor diperkirakan akan signifikan. Sektor-sektor yang paling terkena imbas krisis global adalah sektor yang mengandalkan permintaan eksternal (*tradable*), seperti industri manufaktur, pertanian, dan pertambangan. Ketiga sektor ini menyumbang lebih dari 50 persen GDP dan menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja nasional. Terpukulnya kinerja sektor-sektor ini pada akhirnya akan berujung pada gelombang pemutusan hubungan tenaga kerja.

## **STRATEGI-STRATEGI ANTISIPASI DAMPAK KRISIS EROPA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

Krisis Eropa telah mempengaruhi perekonomian negara-negara di dunia baik negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia. Pengaruh krisis Eropa terhadap perekonomian Indonesia secara umum dapat terjadi melalui beberapa jalur, yaitu: jalur moneter dan keuangan, jalur fiskal, jalur perdagangan, jalur investasi, dan jalur komoditas.<sup>26</sup> Namun, setidaknya terdapat dua jalur transmisi utama krisis ekonomi Eropa mempengaruhi perekonomian domestik Indonesia, yaitu melalui jalur sektor finansial dan jalur perdagangan.<sup>27, 28</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014, *op. cit.*

<sup>26</sup> BAPPENAS, *op. cit.*

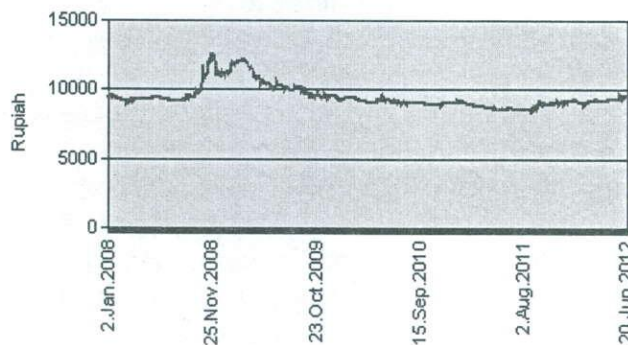
<sup>27</sup> *Loc. cit.*

<sup>28</sup> "Ketika Dampak Krisis Eropa Mulai Terasa di Indonesia", *Business news*, 25 Juni 2012.



Efek transmisi krisis ekonomi Eropa terhadap perekonomian Indonesia melalui jalur finansial dapat dilihat dari depresiasi rupiah yang tajam sepanjang tahun 2012 dan anjloknya IHSG di BEI.<sup>29</sup> Data terakhir menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami depresiasi sebesar 0,13 persen dibandingkan penutupan tanggal 22 Juni 2012 yaitu sebesar Rp 9.470 per dolar AS. Begitu juga IHSG di BEI terus mengalami kontraksi. Pada tanggal 25 Juni 2012 IHSG ditutup pada besaran 3.860,24 atau turun 0,75 persen dibandingkan penutupan minggu sebelumnya.<sup>30</sup> Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.

**Gambar 2.**  
**Kurs Transaksi - USD**  
(Exchange Rates on Transaction)



Source : Bank Indonesia

Akibat krisis ekonomi Eropa melalui jalur perdagangan menyebabkan pertumbuhan ekspor Indonesia mengalami perlambatan. Bulan April 2012, nilai ekspor Indonesia turun sebesar 3,3 persen, yakni sebesar 15,98 miliar dolar AS, dibandingkan April 2011. Ini mencakup ekspor migas sebesar 3,36 miliar dolar AS (naik 9,8 persen) dan ekspor non migas sebesar 12,62 miliar dolar AS (turun 2,4 persen). Meskipun pada Januari-April 2012 masih naik 4,1 persen menjadi 64,5 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini mencakup ekspor migas sebesar 13,3 miliar dolar AS (naik 12 persen) dan ekspor non migas sebesar 1,2 miliar dolar AS (naik 2,3 persen). Melemahnya kinerja ekspor periode Januari-April 2012 diakibatkan oleh menurunnya permintaan negara-negara mitra dagang utama Indonesia terhadap ekspor barang-barang non migas Indonesia, seperti Jepang, AS, Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Thailand.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> [www.finance.yahoo.com](http://www.finance.yahoo.com).

<sup>31</sup> *Loc. cit.*

Mengantisipasi efek yang lebih dalam dan buruk dari krisis ekonomi Eropa terhadap perekonomian Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu menyusun strategi-strategi yang tepat baik untuk jalur finansial maupun perdagangan. Diantaranya adalah:

1. Memperkuat daya tahan ekonomi sektor perdagangan

Salah satu cara untuk memperkuat daya tahan ekonomi di sektor perdagangan adalah dengan mengembangkan industri hilirisasi seperti tambang. Industri hilirisasi merupakan salah satu kebijakan pengaturan ekspor untuk semua komoditi yang dihasilkan tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri di dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*). Program industri hilirisasi ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan pada tahun 2014.<sup>32</sup>

Kebijakan ini diharapkan akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia diantaranya adalah penciptaan nilai tambah baru dari kegiatan pengolahan sehingga nilai ekspor menjadi semakin tinggi, penciptaan industri baru, penyerapan tenaga kerja, juga peningkatan kesempatan kerja.<sup>33</sup>

Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai dukungan dalam rangka program hilirisasi. Salah satunya dengan merevisi ketentuan ekspor produk pertambangan tertentu (yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ekspor tidak dilakukan dalam bentuk *raw material*). Adanya ketentuan ekspor tersebut, pemerintah memperketat ekspor barang tambang mentah dengan memberlakukan bea masuk 20 persen. Selain itu juga dengan melakukan penyiapan *data base* eksportir dan revisi ketentuan ekspor timah batangan, ketentuan ekspor pupuk dan pelepasan wewenang penandatanganan perizinan di bidang ekspor dan impor melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP).<sup>34</sup>

Selain itu, untuk memperlancar pelaksanaan program industri hilirisasi perlu ada dukungan dari kebijakan energi nasional. Pemerintah perlu menjamin pasokan energi untuk kebutuhan industri hilirisasi. Karena, seperti diketahui, hampir semua sumber-sumber energi di Indonesia sudah banyak dikuasai asing, yaitu sekitar 85-90 persen ladang minyak dikuasai perusahaan asing, 90 persen produksi gas dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70 persen produksi batubara dikuasai asing.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> "Tantangan Program Hilirisasi Industri", 13 Mei 2012 (<http://www.metrotvnews.com/read/tajuk/2012/05/13/1134/Tantangan-Program-Hilirisasi-Industri/tajuk>, diakses 27 Juni 2012).

<sup>33</sup> "Menagih Keseriusan Program Hilirisasi Industri", 15 Mei 2012 (<http://dir.groups.yahoo.com/group/Diskusi-Pembebasan/message/3022>, diakses 27 Juni 2012).

<sup>34</sup> "Ketika Dampak Krisis Eropa Mulai Terasa di Indonesia", *op. cit.*

<sup>35</sup> *Loc. cit.*



## 2. Diversifikasi Pasar

Selama ini, tujuan ekspor utama Indonesia adalah negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Saat ini, mitra dagang utama Indonesia, yakni Eropa dan AS, mengalami krisis ekonomi sehingga menyebabkan daya beli masyarakatnya melemah. Akibatnya, volume dan nilai ekspor ke kawasan Eropa dan AS terus turun. Mengantisipasi penurunan ekspor lebih lanjut, pemerintah Indonesia harus berani membuat terobosan baru dalam kegiatan ekspornya. Yakni melakukan diversifikasi pasar ekspor nasional ke pasar non tradisional yang potensial.<sup>36</sup>

Pemerintah Indonesia saat ini gencar menggelar misi dagang dengan melakukan diversifikasi pasar. Ada 4 (empat) kawasan yang menjadi target bagi diversifikasi pasar ekspor Indonesia. *Pertama*, Amerika Latin dengan jumlah penduduk 400 juta jiwa dan total nilai perdagangan 1 triliun dollar AS. *Kedua*, Eropa Timur dengan penduduk 400 juta jiwa dan total nilai perdagangan 2,3 triliun dollar AS. *Ketiga*, Afrika Bagian Selatan dengan 160 juta jiwa dan total perdagangan 300 miliar dollar AS. *Keempat*, Asia Tengah dengan 75 juta jiwa dan total perdagangan 150 miliar dollar AS.<sup>37</sup>

## 3. Mendorong Sektor Riil

Berkaca pada krisis 1997/1998, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan dan *survive* ditengah terpaan badai krisis. Hal ini dikarenakan empat hal utama, yakni *pertama*, tidak memiliki utang luar negeri. *Kedua*, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*. *Ketiga*, menggunakan input lokal. *Keempat*, berorientasi ekspor. Selama 1997 – 2006, jumlah perusahaan berskala UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.<sup>38</sup> Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus sadar bahwa sektor riil/UMKM merupakan denyut nadi perekonomian Indonesia sebagai sabuk pengaman ekonomi nasional dari berbagai krisis ekonomi (seperti krisis ekonomi global dan krisis ekonomi Eropa).

Peran strategis sektor UMKM terlihat dari sumbangan UMKM terhadap *product domestic bruto* (PDB) Indonesia mencapai 54 – 57 persen.<sup>39</sup> Terdapat 51,26 juta unit UMKM, atau sekitar 99 persen dari seluruh unit usaha yang menyerap tenaga kerja sekitar 90 juta jiwa atau 97,04 persen dari total tenaga kerja Indonesia.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> "Hadapi Persaingan Global, Diversifikasi Pasar Ekspor", 19 Juni 2012 (<http://www.lensaindonesia.com/2012/06/19/hadapi-persaingan-global-diversifikasi-pasar-ekspor.html>, diakses 27 Juni 2012).

<sup>37</sup> "Krisis Eropa Pengaruhi Ekspor", *op. cit.*

<sup>38</sup> Idris Laena, *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Lugas, 2010).

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> "Antisipasi Dampak Krisis Eropa", 13 Desember 2011 ([www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com), diakses 31 Mei 2012).

#### 4. Pembentukan *Crisis Management Protocol*

Pembentukan aturan Protokol Penanggulangan Krisis (PPK) atau *Crisis Management Protocol* (CMP) di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk krisis ekonomi Eropa merupakan hal yang penting dilakukan Pemerintah Indonesia. Hal ini karena CMP merupakan peringatan dini (*early warning*) mengantisipasi krisis ekonomi. Standar pengelolaan krisis ekonomi melalui CMP adalah strategi terstruktur untuk menghadapi krisis ekonomi Eropa bahkan global, agar Indonesia tidak terjebak seperti krisis Ekonomi 1997/1998 lalu.<sup>41</sup>

Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) bersama BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membentuk CMP sebagai mekanisme menghadapi dampak krisis ekonomi Eropa dengan nama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem keuangan (FKSSK). Pembentukan FKSSK merupakan implementasi dari Undang-undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>42</sup>

Di dalam CMP tersebut tersusun berbagai langkah strategis yang harus dilakukan otoritas moneter dan fiskal dalam meredam krisis ekonomi agar tidak meluas dan tambah parah.<sup>43</sup> Selain itu, karena pemicu krisis bisa berasal dari segala arah maka dalam CMP dimasukkan hal-hal lain seperti pasar modal, fiskal dan obligasi.<sup>44</sup>

Di dalam CMP, ada empat hal yang menjadi faktor utama sebagai *early warning* yaitu indeks saham, surat berharga negara (SBN), nilai tukar dan aliran dana masuk. CMP mengatur mekanisme *surveillance* terhadap indikator deteksi dini yang dapat mengindikasikan kemungkinan timbulnya krisis, penetapan status tekanan yang timbul, respon kebijakan yang perlu ditempuh, serta organisasi dan proses pengambilan keputusan untuk memastikan *governance* berjalan baik dan transparan.<sup>45</sup>

Artinya, protokol itu merupakan tindakan riil yang diperlukan untuk mengantisipasi, mencegah, dan menangani krisis. Ini penting, karena krisis akan menimbulkan biaya dan kerugian bagi perekonomian, negara, dan

<sup>41</sup> "Protokol Penanganan Krisis Sudah sangat Mendesak", 10 Oktober 2008 (<http://finance.detik.com/read/2008/10/10/114108/1018109/5/protokol-penanganan-krisis-sudah-sangat-mendesak>, diakses 26 Juni 2012).

<sup>42</sup> "Pemerintah Bentuk Protokol Krisis", 7 Juni 2012 (<http://bisnis.vivanews.com/news/read/322232-pemerintah-bentuk-protokol-krisis>, diakses 26 Juni 2012).

<sup>43</sup> "Percepat Protokol Manajemen Krisis", 28 April 2008 (<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/07541172/percepat.protokol.manajemen.krisis>, diakses 26 Juni 2012).

<sup>44</sup> *Loc. cit.*

<sup>45</sup> "Pantau Krisis Pasar Modal via CMP", 6 November 2011 (<http://www.topsaham.com/new1/index.php?view=article&catid=38:propil-emiten&id=5460:alex&tmpl=component&print=1&page=>, diakses 26 Juni 2012).



masyarakat bila penanganan tidak dilakukan secara dini. Adalah lebih baik mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya krisis ketimbang harus menanggung biaya yang mahal kalau krisis sudah terjadi.<sup>46</sup>

Namun dalam teknis pelaksanaannya, protokol manajemen krisis nasional akan mencakup beberapa sub-protokol seperti krisis nilai tukar, krisis perbankan dan lembaga keuangan, krisis pasar modal (obligasi, saham), krisis fiskal dan utang, serta krisis ekonomi. Lalu masing-masing sub-protokol itu akan dijalankan oleh lembaga sesuai kewenangan yang diberikan UU. Misalnya sub-protokol krisis nilai tukar dan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), sub-protokol krisis pasar modal oleh Bapepam-LK. Untuk fiskal dan utang oleh Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Tapi yang pasti, setiap sub-protokol itu harus terkoordinasi dan terintegrasi secara utuh dan terpadu.<sup>47</sup>

## CATATAN PENUTUP

Meskipun dampaknya masih minim, lesunya ekonomi global akibat krisis ekonomi Eropa mulai perlahan menerpa Indonesia baik melalui jalur perdagangan maupun finansial walaupun efeknya masih kecil. Mengantisipasi efek yang lebih dalam dan buruk dari krisis ekonomi Eropa terhadap perekonomian Indonesia, strategi-strategi perlu disusun oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu strategi yang penting untuk mengantisipasi efek krisis ekonomi Eropa adalah memperkuat daya tahan ekonomi sektor riil.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Op.cit.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Imansyah, M. H. *Krisis Keuangan di Indonesia Dapatkah Diramalkan?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2009, p.12-17.

Laena, Idris. *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lugas, 2010.

Prasetyantoko, A. *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, hal. 1-2.

### Artikel dalam Koran

Basuki, Orin. "Krisis Eropa: Ekonomi Dunia Terseret Olang", *Kompas*, 2 Maret 2012.

Benu, Fred. "Belajar dari Krisis Ekonomi Eropa", *Suara Pembaruan*, 2 Februari 2012.

Prasetyantoko, A. "Mengantisipasi Krisis Eropa", *Kompas*, 29 Mei 2012.

### Tulisan/Berita dalam Koran (tanpa nama pengarang)

"Krisis Eropa Pengaruhi Ekspor". *Kompas*, 23 Mei 2012.

"Krisis Zona Euro: Tsunami Ekonomi Global Tahun 2013 Semakin Nyata". *Kompas*, 10 Mei 2012.

"Ketika Dampak Krisis Eropa Mulai Terasa di Indonesia", *Business news*, 25 Juni 2012.

### Dokumen Resmi

Bank Indonesia. "Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014". Jakarta: Bank Indonesia, Januari 2009.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Krisis Keuangan Eropa: Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Triwulanan, Triwulan IV 2011*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



Modul Kuliah Ekonomi Keuangan Internasional: Teori, Model Empiris, dan Kebijakan, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

**Internet (karya individual)**

"Antisipasi Dampak Krisis Eropa", 13 Desember 2011 ([www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com), diakses 31 Mei 2012).

"Hadapi Persaingan Global, Diversifikasi Pasar Ekspor", 19 Juni 2012 (<http://www.lensaIndonesia.com/2012/06/19/hadapi-persaingan-global-diversifikasi-pasar-ekspor.html>, diakses 27 Juni 2012).

"Krisis Eropa dan Teori Random Walk". ([www.seputar-indonesia.com](http://www.seputar-indonesia.com), diakses tanggal 20 Juni 2012).

"Menagih Keseriusan Program Hilirisasi Industri", 15 Mei 2012 (<http://dir.groups.yahoo.com/group/Diskusi-Pembebasan/message/3022>, diakses 27 Juni 2012).

"Menkeu: Per 31 Mei 2012, Rupiah Terdepresiasi 4,06%". ([www.pasarmodal.inilah.com](http://www.pasarmodal.inilah.com), diakses tanggal 31 Mei 2012).

"Pantau Krisis Pasar Modal via CMP". (<http://www.topsaham.com/new1/index.php?view=article&catid=38:propil-emiten&id=5460:alex&tmpl=component&print=1&page=>, diakses 26 Juni 2012).

"Pemerintah Bentuk Protokol Krisis". (<http://bisnis.vivanews.com/news/read/322232-pemerintah-bentuk-protokol-krisis>, diakses 26 Juni 2012).

"Percepat Protokol Manajemen Krisis". (<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/07541172/percepat.protokol.manajemen.krisis>, diakses 26 Juni 2012).

"Protokol Penanganan Krisis Sudah sangat Mendesak". (<http://finance.detik.com/read/2008/10/10/114108/1018109/5/protokol-penanganan-krisis-sudah-sangat-mendesak>, diakses 26 Juni 2012).

"Saham: IHSG Uji Support, Wait and See Saja". ([www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), diakses tanggal 31 Mei 2012).

"Tantangan Program Hilirisasi Industri", 13 Mei 2012 (<http://www.metrotvnews.com/read/tajuk/2012/05/13/1134/Tantangan-Program-Hilirisasi-Industri/tajuk>, diakses 27 Juni 2012).

**Internet (artikel dalam jurnal online)**

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

[www.finance.yahoo.com](http://www.finance.yahoo.com).

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).



## **BAB II**

# **IMPLIKASI KRISIS EROPA TERHADAP SURAT BERHARGA NEGARA**

*Ari Mulianta Ginting\**

---

\* Penulis adalah peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi Setjen DPR RI dengan email : [ari.ginting@dpr.go.id](mailto:ari.ginting@dpr.go.id)

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 yang lalu dunia perekonomian dunia mengalami krisis global. Belum pulih dari dampak krisis global tersebut kini dunia harus berhadapan lagi dengan krisis yang dialami oleh zona euro yang menghadang di depan mata. Zona euro yang terdiri dari 17 negara pada saat ini sedang kembali terjebak ke dalam resesi buruk. Persoalan utama zona euro adalah kebangkrutan lembaga keuangan akibat kejatuhan sektor properti di Amerika Serikat tahun 2008, yang dampaknya terasa hingga sekarang. Kejatuhan sektor properti Spanyol turut menambah penderitaan itu. Sedangkan kebangkrutan Yunani, akibat tumpukan utang yang tidak bisa terbayar lagi.<sup>1</sup>

Krisis Eropa berawal pada tahun 2009 dan diawali dengan kegagalan Uni Eropa dalam membentuk satu kesatuan mata uang yakni Euro. Hal ini dikarenakan proses pembentukan satu mata uang dalam satu kawasan Eropa ini pada awalnya memiliki ide yang bagus akan tetapi memiliki kelemahan yang dapat memicu kegagalan. Salah satunya adalah perbedaan negara yang signifikan yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat dan kekuatan ekonomi yang lemah. Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat diwakili Jerman, Italia, Perancis, dan beberapa negara Eropa lainnya, sedangkan negara-negara di Eropa yang memiliki kekuatan ekonomi yang lemah diwakili oleh Yunani, Portugal, Spanyol dan lain-lain.

Perbedaan kekuatan ekonomi tersebut sejalan dengan waktu menyebabkan kondisi yang menyulitkan bagi Eropa terutama bagi mata uang mereka. Hal ini diperparah dengan kondisi negara-negara yang memiliki ekonomi yang lemah tersebut di dalam negeri juga memiliki kondisi finansial dan keuangan yang cukup parah. Salah satu negara tersebut adalah Yunani, yang memiliki defisit yang cukup tinggi. Total utang negara Yunani pada tahun 2010 sekitar 500 miliar US \$.<sup>2</sup> Yunani sebenarnya pada tahun 1999 dinyatakan tidak lulus masuk Eurozone. Namun, dengan manipulasi laporan keuangan negara, terutama utang, Yunani diterima dalam Eurozone dua tahun kemudian.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang terdapat dalam Gambar 1. menunjukkan krisis yang terjadi di Eropa semakin nyata, hal ini ditunjukkan dengan banyak negara-negara di Eropa yang memiliki utang besarnya hampir sama atau lebih besar jika dibandingkan dengan *Gross Domestic Product (GDP)*. Jika suatu negara memiliki total utang yang sama atau bahkan lebih besar dari

<sup>1</sup> "Resesi Parah Ancam Zona Euro", Kompas, 23 Mei 2012

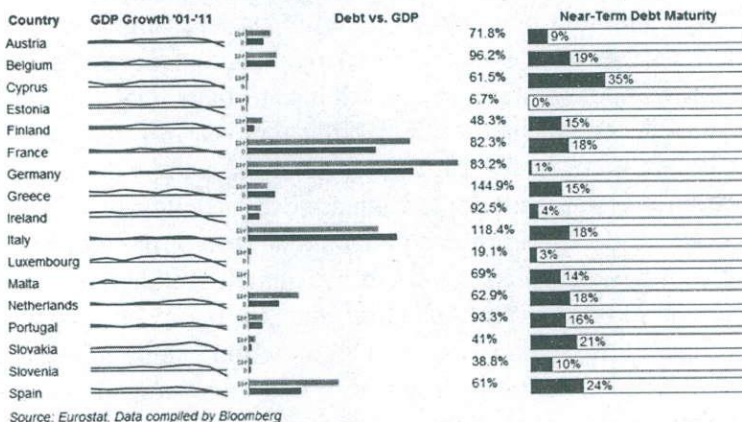
<sup>2</sup> Arifin Siregar, *The Challenge of Serious and Complex International Financial Development: Indonesia's Position*, makalah disajikan dalam Seminar The Eurozone Crisis And The Depressed US Economy: Their Impact On Global Economy, Institut Bisnis dan Informatika (Ibii), 21 Desember 2011.

<sup>3</sup> "Perekonomian: Utang dan Dosa Yunani", Harian Kompas. Rabu 25 Januari 2012



pada total GDP tentu berdampak kepada resiko gagal bayar utang akibat ketidakmampuan negara tersebut membayar atau melunasi utang tersebut. Setidaknya ada beberapa negara yang berada dalam kondisi tersebut, diantaranya adalah Belgia, Yunani, Italia, Portugal dan Spanyol. Gagal bayar utang oleh negara-negara tersebut dapat berdampak buruk terhadap Zona Eropa secara keseluruhan.

**Gambar 1. Utang dan GDP Pemerintah Eropa**



Menurut Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Primer Pertanian Kadin Indonesia Adhi S Lukman, krisis Eropa lebih berat dari pada krisis di Amerika Serikat (AS). Ini mengingat Uni Eropa terdiri 27 negara, sementara AS merupakan satu negara.<sup>4</sup> Bahkan menurut Menteri Keuangan Polandia Jacek Rostowski bahwa akibat dari kondisi krisis utang di zona euro dapat yang terjadi dapat mengganggu kestabilan dan dapat berdampak kepada membubarkan Uni Eropa. Jika zona euro terpecah, Uni Eropa tidak akan dapat selamat dan membuat Eropa dalam keadaan bahaya.<sup>5</sup>

Lebih lanjut mengenai bahaya krisis Eropa Presiden Amerika Serikat Barak Obama pada satu kesempatan di Lower Hannahs Bend Park di Minnesota, Amerika Serikat mengeluhkan bahwa krisis keuangan Eropa sangat menakutkan dunia dan berakar pada kegagalan zona euro untuk memperbaiki perbankan. Lebih lanjut Barack Obama mengemukakan bahwa krisis yang terjadi di Eropa dapat menggagalkan pemulihan Amerika Serikat,

<sup>4</sup> "Dampak Krisis Eropa Mungkin Awal 2012", Kompas Online, 17 September 2011 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/17/13513855/Dampak.Krisis.Eropa.Mungkin.Awal.2012>, diakses 24 Januari 2012).

<sup>5</sup> "Uni Eropa Terancam Bubar", Kompas Online, 16 September 2011 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/16/08181040/Uni.Eropa.Terancam.Bubar>, diakses 24 Januari 2012).

Obama menyebutkan bahwa gejolak zona euro sebagai salah satu faktor asing yang telah membantu memperlambat ekonomi Amerika.<sup>6</sup>

Di saat negara-negara Eropa mengalami krisis dan situasi tidak menentu, akan tetapi peristiwa ini membawa dampak tertentu terhadap Indonesia. Menurut ekonom Aviliani, tidak ada alternatif bagi investor untuk tidak masuk ke Indonesia. Satu-satunya negara yang market-nya besar dan tidak overheating hanya Indonesia.<sup>7</sup> Pendapat senada diungkapkan oleh Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan yang mengindikasikan bahwa krisis Eropa yang semakin memburuk karena besarnya kemungkinan negara-negara yang tersebut menunggak utang. Jika kondisi krisis Eropa sudah mencapai titik nadir, maka dana asing akan ditarik dari negara-negara tersebut dan diinvestasikan ke negara yang sudah investmen grade, pertumbuhan ekonomi tinggi, serta suku bunganya cukup tinggi, seperti Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, apakah krisis Eropa yang terjadi memberikan dampak terhadap Indonesia. Dampak tersebut diantaranya adalah masuknya dana asing (*capital inflow*) ke Indonesia terutama dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Untuk itu perlu dilakukan kajian secara deskriptif apakah krisis yang terjadi di Eropa memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia terutama dalam hal ini masuknya dana asing (*capital inflow*) yang membeli SBN.

## POTENSI DAN JENIS DAMPAK YANG TERJADI

Sebagai perekonomian terbuka yang kecil, Indonesia tidak bisa kebal dari dampak krisis yang sedang terjadi di luar negeri. Integrasi di sektor keuangan telah menempatkan banyak negara terutama negara untuk perekonomian terbuka untuk menghadapi resiko penularan. Sebuah studi empiris oleh Santoso et.al. menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hubungan penularan dengan beberapa negara di Asia, seperti Jepang, Taiwan, Korea, Hongkong dan India. Pasar keuangan domestik bergerak erat dengan gerakan di pasar keuangan global. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso juga menemukan bahwa tidak ada pengaruh penularan langsung antara bursa saham Indonesia

<sup>6</sup> "Obama: Krisis Eropa Menakutkan Dunia", Kompas Online, 27 September 2011 (<http://internasional.kompas.com/read/2011/09/27/06362255/Obama.Krisis.Eropa.Menakutkan.Dunia>, diakses 24 Januari 2012).

<sup>7</sup> "Tidak Alami Overheating, Indonesia Menarik buat Investasi", Media Indonesia Online, 20 Oktober 2011. ([http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/10/20/269746/4/2/Tidak\\_Alam\\_Overheating\\_Indonesia\\_Menarik\\_buat\\_Investasi](http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/10/20/269746/4/2/Tidak_Alam_Overheating_Indonesia_Menarik_buat_Investasi), diakses 25 Januari 2011).

<sup>8</sup> "Financial Lecture: Dana Asing Masuk ke BursaSemester II", Bisnis Indonesia Online, 18 Januari 2012. (<http://www.bisnis.com/articles/financial-lecture-dana-asing-masuk-ke-bursa-semester-ii>, diakses 25 Januari 2012).



dan indeks Dow Jones dan indeks NASDAQ. Jadi, Indonesia terpengaruh oleh krisis global, bukan efek langsung dari pasar AS tetapi lebih kepada efek tidak langsung dari pasar modal di Asia yang memiliki hubungan langsung dengan pasar modal Amerika Serikat. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia merupakan *shock absorber* ketimbang *transmitter*, khususnya berkaitan dengan negara maju.<sup>9</sup>

Masuknya modal asing tersebut akibat krisis ekonomi menurut Dumairy (1996), merupakan arus masuk, begitu pula halnya dengan pembayaran angsuran pokok utang oleh pihak luar negeri kepada Negara Indonesia.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Chuhan, Classesns, dan Schadler (1993) menemukan bahwa faktor internal berupa membaiknya faktor fundamental memiliki peran tiga kali lebih besar dari pada faktor eksternal dalam mempengaruhi aliran modal masuk ke negara emerging market Asia.<sup>11</sup> Lebih lanjut Fratzscher (2011) menemukan bahwa di negara-negara emerging market ditengah-tengah situasi global yang semakin memburuk membuat *capital flows* keluar negara tersebut yang berdampak terhadap melemahnya mata uang negara tersebut.<sup>12</sup>

Forbes dan Warnock pada tahun 2010 menggunakan *gross capital flows* untuk melakukan klasifikasi terhadap perpindahan capital dari satu negara ke negara lain menurut keparahannya yaitu *surge, stops, flights and retrechments*. Mereka menemukan bahwa faktor global, terutama menghindari resiko dan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan mempengaruhi terjadinya *capital flows*.<sup>13</sup> Bahkan beberapa penelitian lain melakukan analisa terhadap perpindahan *capital* dan menemukan adanya hubungan yang kuat antara *shock* global terhadap pasar keuangan dan *capital flows*.<sup>14</sup> Demikian juga terdapat hubungan antara global *shock* terhadap *liquidity* yang terjadi disuatu negara yang terkena aliran *capital flows*.<sup>15</sup>

Lebih lanjut mengenai krisis global saat ini, Kurniati dan Permata menemukan bahwa kejutan dalam penghindaran risiko global (*global risk*

<sup>9</sup> Santoso et al, "Impact of Contagion Risk on The Indonesian Capital Market", Bank Indonesia Financial Stability Report No. 12, 2009.

<sup>10</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996.

<sup>11</sup> Schadler, Susan et al, *Recent Experiences With Surge in Capital Inflow*, Occasional Paper IMF, 1993.

<sup>12</sup> Fratzscher, M, *Capital Flows, Push Versus Pull Factors and The Global Financial Crisis*, NBER Working Paper 17351, 2011.

<sup>13</sup> Forbes, Kristin, *Why do Foreigner Invest in The United State?* Journal of International Economics 80(1), hal 3-21, 2010.

<sup>14</sup> Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bacchetta dan Van Wincoop (2010), Grorio Siemer dan Verdelhan (2010).

<sup>15</sup> Hasil ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brunnermeir (2009), Kalemli-Ozan, Papaioannou dan Perri (2010).



*aversion*) mempunyai dampak negatif yang lebih cepat terhadap aliran modal ke Indonesia, terutama dari investasi portofolio yang menyebabkan depresiasi rupiah. Dampak melalui saluran keuangan pada variabel keuangan bersifat sementara dan relatif pulih lebih cepat. Efek putaran kedua krisis global terjadi melalui saluran perdagangan. Kejutan negatif dari pertumbuhan PDB Amerika Serikat menyebabkan penurunan kontemporer pada ekspor Indonesia yang selanjutnya berakibat pada penurunan pertumbuhan PDB domestik riil, arus modal dan depresiasi rupiah. Dampak pada ekspor tampaknya persisten dan perlu respon kebijakan dari yang berwenang.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dampak krisis eropa terhadap perekonomian Indonesia melalui analisis data sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat subyektif yang mencoba menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan diatas.

Penelitian ini bersifat subyektif berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data-datanya melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data terkait. Studi kepustakaan meliputi penelusuran buku-buku, majalah dan koran terkait dan data melalui computer secara *online*. Hasil dari penelitin ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara deskriptif dampak krisis yang terjadi di Eropa terhadap masuknya dana asing ke Indonesia yang membeli SBN.

## PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Fratzscher tahun pertengahan 2011, menunjukkan bahwa dalam keadaan situasi ekonomi global yang memburuk, dana dari negara *emerging market* akan keluar.<sup>17</sup> Keluarnya dana tersebut akan mengakibatkan depresiasi mata uang negara tersebut.<sup>18</sup> Gambar 2. Memperllihatkan bahwa pada tahun 1998 dan pada tahun 2008, ketika terjadi krisis global yang melanda dunia terjadi *capital outflows* dari *emerging market*. Aliran dana yang masuk ke *emerging markets* dalam bentuk dari investasi langsung, bank dan pinjaman pribadi, dan terakhir dalam bentuk portopolio investment. Setelah tahun 1998 sampai dengan 2007 aliran dana

<sup>16</sup> Kirniati Y dan Meily Ika Pratama, "Transmission of External Shock to Indonesian Economy", Bank Indonesia Working Paper, 2009.

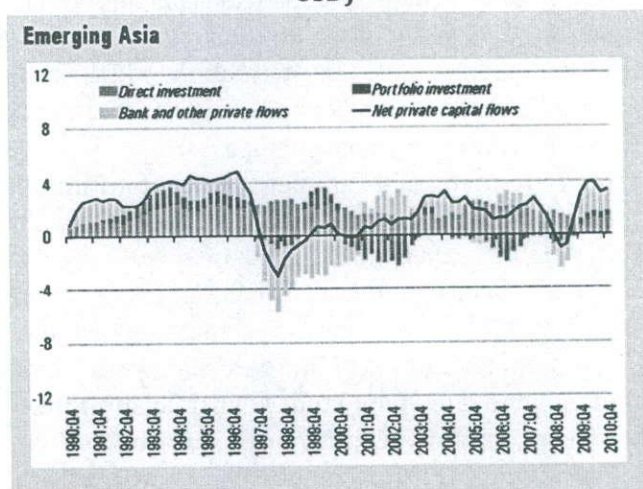
<sup>17</sup> The term emerging market implies a stock market that is in transition, increasing in size, activity, or level of sophistication. IFC classifies a stock market as emerging if it meets at least one of two general criterion: 1. It is located in a low or middle income economy as defined by the word bank ( per capita GDP less than \$ 9656) for the last three consecutive years and 2. Its investable market capitalisation is low relatif to its GDP.

<sup>18</sup> Fratzscher, *Ibid*.



banyak masuk ke *emerging markets* dan begitu juga pada tahun 2009 sampai sekarang aliran dana tersebut mulai kembali meningkat masuk ke negara-negara tersebut.

Gambar 2. Net Capital Flows to emerging markets, 1980-2009 (dalam juta USD)



Sumber : IMF, 2011

Richards (2005) dalam penelitian yang meemukan bahwa *emerging markets* mempunyai peran besar dalam meningkatkan *international portfolios*. Argumen berinvestasi pada *emerging markets* adalah prospek pertumbuhan, tingkat keuntungan yang tinggi, volatilitas yang tinggi.<sup>19</sup> Apabila pasar modal suatu negara dianggap menarik sehingga pemodal asing berbondong-bondong menanamkan modalnya maka akan meningkatkan permintaan uang domestik. Peningkatan permintaan uang akan meningkatkan suku bunga yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan *capital inflow*.<sup>20</sup>

## PROSPEK INDONESIA DITENGAH KRISIS EROPA

Pada saat negara-negara di Eropa mengalami krisis, kondisi yang lain ditunjukkan di negara-negara *Emerging Asia*. IMF memproyeksikan ekonomi

<sup>19</sup> Richards, A, *Big Fish in Small Ponds: The Trading Behavioural Price Impact Of Foreign Investors in Asian Emerging Equity Markets*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 40, hal. 1-27, 2005.

<sup>20</sup> Tim Studi Tentang Analisis Hubungan Kointegrasi dan Kausalitas serta Hubungan Dinamis antara Aliran Modal Asing, Perubahan Nilai Tukar dan Pergerakan IHSG di Pasar Modal Indonesia, *Analisa Hubungan Kointegrasi dan Kausalitas Serta Hubungan Dinamis Antara Aliran Modal Asing, Perubahan Nilai Tukar dan Pergerakan IHSG di Pasar Modal Indonesia*, BAPEPAMLK, 2008.

di Asia mengalami pertumbuhan GDP sekitar 8% untuk tahun 2012. Proyeksi ini didapat dari rata-rata proyeksi dari negara-negara yang ada di Asia. Indonesia seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Pertumbuhan GDP sebesar 6,5 % untuk tahun 2011. pertumbuhan ini lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan GDP Indonesia tahun 2010. Angka proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia tersebut lebih besar dari pada negara Asean lainnya seperti Malaysia hanya 5,2%, Filipina sebesar 5,0% , dan Thailand sebesar 4,5%.

**Tabel 1. GDP Negara-Negara Asia**

*(Year-over-year, in percent)*

	Actual data and latest projections		
	2010	2011	2012
Industrial Asia	3.7	1.7	2.4
Japan	3.9	1.4	2.1
Australia	2.7	3.0	3.5
New Zealand	1.5	0.9	4.1
Emerging Asia	9.6	8.1	9.8
<i>NIEs</i>	8.4	4.9	4.5
Hong Kong SAR	6.8	5.4	4.2
Korea	6.1	4.5	4.2
Singapore	14.5	5.2	4.4
Taiwan Province of China	10.8	5.4	5.2
China	10.3	9.6	9.5
India	10.4	8.2	7.8
<i>ASEAN-5</i>	6.9	5.4	5.7
Indonesia	6.1	6.2	6.5
Malaysia	7.2	5.5	5.2
Philippines	7.3	5.0	5.0
Thailand	7.8	4.0	4.5
Vietnam	6.8	6.3	6.8
Emerging Asia excl. China	8.8	8.5	8.3
Emerging Asia excl. China and India	7.7	5.2	5.1
Asia	8.3	6.9	6.3

Source: IMF, WEO database.

Sumber : IMF, 2011

Salah satu faktor penarik bagi asing untuk memasukkan dana mereka ke suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, karena hal ini mendeskripsikan bahwa negara tersebut masih memiliki potensi untuk berkembang dan dapat memberikan keuntungan bagi dana mereka. Kondisi ini terjadi di Indonesia, sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan lebih tinggi dibandingkan negara Asean lain. Faktor lain yang juga dapat menarik minat asing untuk *capital inflow* adalah rasio utang terhadap PDB Indonesia berdasarkan data 2006 – 2011 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006, rasio utang terhadap PDB Indonesia sebesar 40,4% maka pada tahun 2011 terjadi penurunan hingga menjadi 25,2% (Tabel 2). Berdasarkan Tabel 2. Mendeskripsikan bahwa kondisi Indonesia menjadi semakin negara yang menarik untuk diperhatikan karena rasio utang terhadap PDB lebih kecil dari pada negara-negara lain, di negara Eropa yang cukup maju seperti Jerman bahkan mengalami peningkatan rasio utang terhadap PDB, jika



pada tahun 2006 hanya sebesar 67,9% maka tahun 2011 naik menjadi 82,6%. Rasio utang terhadap PDB ini cukup memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu negara terhadap total utang yang dimilikinya dan kemampuan negara tersebut membayar utang-utang negara.

**Tabel 2. Persentase Rasio Utang Terhadap PDB di Beberapa Negara 2006-2011**

**Persentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara,  
2006-2011**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Argentina	76.5	67.1	58.5	58.7	49.1	43.3
Brazil	66.7	65.2	63.6	68.1	66.8	65.0
Germany	67.9	65.0	66.4	74.1	84.0	82.6
India	75.4	72.7	73.1	69.4	64.1	62.4
Indonesia	40.4	36.9	33.2	28.6	27.4	25.2
Italy	106.6	103.6	106.3	116.1	119.0	121.1
Japan	191.3	187.7	195.0	216.3	220.0	233.1
Turkey	46.1	39.4	39.5	46.1	42.2	40.3
United Kingdom	43.1	43.9	52.0	68.3	75.5	80.8
United States	61.1	62.3	71.6	85.2	94.4	100.0

Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011

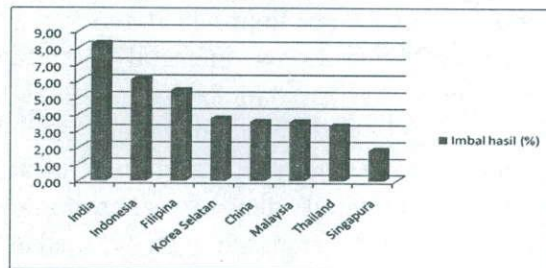
Bahkan lembaga pemeringkat Fitch Ratings pada Desember 2011 menaikkan peringkat utang luar negeri valuta asing jangka panjang (*foreign currency: long term senior dept*) dari BB+ menjadi BBB- dengan prediksi Stabil. Lembaga peringkat Moody's Investors Service juga mengikuti keputusan Fitch Ratings, Moody's menaikkan peringkat utang Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan prediksi stabil (*stabil outlook*). Baik Moody's maupun Fitch menilai perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik terhadap kejutan eksternal.<sup>21</sup>

Berdasarkan data HSBC Asian Local Bond Index yang berisi tingkat pengembalian hasil surat utang di beberapa negara Asia per tanggal 27 Januari 2012 menunjukkan obligasi Pemerintah Indonesia tercatat tertinggi kedua setelah India. Pada Grafik 1. Ditunjukkan Indeks surat utang negara (SUN) tercatat 6,10%, sedangkan *yield*<sup>22</sup> India 8,32%. Adapun *yield* Filipina berada pada posisi ketiga yaitu 5,44%, disusul kemudian oleh Korea Selatan dengan indeks *yield* 3,74%.

<sup>21</sup> "Moody's Naikkan Peringkat Utang Indonesia", Kompas, 30 Januari 2012.

<sup>22</sup> Indeks *yield* merupakan salah satu acuan dalam berinvestasi di pasar obligasi. Semakin tinggi *yield* yang diberikan mengindikasikan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh oleh investor dan sebaliknya

**Grafik 1. Tingkat Pengembalian Hasil Surat Utang**



Sumber : HSBC Asian Local Bond Index, 2012

### KRISIS EROPA DAN SURAT BERHARGA NEGARA

Dengan semakin menariknya kondisi perekonomian Indonesia bagi asing yang ditunjukkan dengan berbagai indikator diatas ditambah lagi dampak yang ditimbulkan akibat krisis Eropa yang terjadi pada saat ini, maka prospek ekonomi Indonesia yang semakin baik bagi masuknya dana asing untuk melakukan investasi yang menguntungkan terhadap dana mereka. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki *yield* yang cukup tinggi sehingga investor semakin membanjiri masuk ke dalam. Menurut *World Economic Outlook* (2011) dikatakan bahwa *capital inflow* ke negara-negara berkembang memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap kondisi ekonomi global.<sup>23</sup> Dana-dana yang berasal dari Eropa yang pada saat ini pada situasi perekonomian yang penuh dengan ketidakmenentuan dan terkena krisis serta kondisi Amerika yang mengalami stagnasi ekonomi akan mengalihkannya ke negara-negara yang memberikan hasil imbal yang tinggi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Head of Fixed Income PT. Anugrah Sekurindo, Indah Ramadhan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyo memiliki pendapat yang senada. Mereka mengatakan bahwa masih tingginya *yield* yang diberikan oleh obligasi Pemerintah Indonesia tersebut mengakibatkan SUN diserbu investor asing terutama pasca kenaikan peringkat utang Indonesia ke level *investment grade*.<sup>24</sup> Rahmat Waluyo menerangkan lebih lanjut bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh krisis utang kawasan Eropa dan faktor perlambatan ekonomi Amerika Serikat yang membuat suku bunga imbal hasil tertahan di level rendah hingga 2014. Kondisi tersebut membuat investor global berpikir ulang untuk memutar modalnya di kedua wilayah tersebut dan memilih Indonesia yang berperingkat layak investasi.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> "World Economic Outlook", 2011.

<sup>24</sup> "Yield Obligasi RI Tertinggi Kedua Asia", Harian Bisnis Indonesia, 30 Januari 2012.

<sup>25</sup> *Ibid.*



Lebih lanjut mengenai krisis global dan Eropa Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Melchias Marcus Mekeng mengatakan terjadinya krisis finansial menyebabkan seluruh investor asing dari Amerika Serikat dan Eropa berlomba-lomba mencari negara *emerging market* yang tingkat ekonominya relatif stabil, salah satunya Indonesia dimana *capital inflow* yang semakin deras. Untuk itu pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut dengan penerbitan Surat Berharga Negara dengan jangka waktu yang lama, sehingga dana asing tersebut dalam mengendap terlebih dahulu di Indonesia.<sup>26</sup>

Penulis sependapat dengan Melchias Marcus Mekeng bahwa kondisi saat ini adalah saat yang paling tepat momentum merubah *capital inflow* dana yang berasal dari Eropa akibat krisis yang dialami oleh negara-negara di Eropa untuk masuk ke Indonesia dengan cara membeli Surat Berharga Negara. Namun Surat Berharga Negara inilah oleh Pemerintah harus dapat diendapkan terlebih dahulu di Indonesia dan digunakan untuk mendorong pembangunan perekonomian sektor riil. Artinya dana asing yang masuk, bagaimana caranya dapat digunakan dan dialirkan untuk pembangunan Hal senada dikemukakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah yang menegaskan tantangan saat ini adalah bagaimana *capital inflow* bisa terkait dengan sektor riil. Misalnya beliau mencontohkan mengenai agenda pembangunan infrastruktur, logistik nasional harus segera dibenahi. Jadi yang dana asing yang masuk ke Indonesia tidak sifatnya *hot money*, tetapi bisa tersalurkan di proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang.<sup>27</sup>

Salah satu bentuk kongkrit transformasi dana asing tersebut adalah dalam bentuk utang negara. Sebagai suatu negara yang sedang membangun dan berkembang, Indonesia tentu tidak lepas dari namanya utang. Bahkan menurut Kementerian Keuangan utang merupakan suatu bagian dari Kebijakan Fiskal yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.<sup>28</sup> Utang merupakan konsekuensi logis yang terjadi postur APBN Indonesia yang mengalami defisit, dimana pendapatan Negara lebih kecil daripada belanja Negara. Maka kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk menutupi defisit tersebut dioptimalkan potensi pendanaan urang dari sumber domestik melalui penerbitan Surat Berharga Negara dalam rupiah dan valuta asing.

<sup>26</sup> "Krisis Finansial AS dan Eropa: Tantangan atau Ancaman?", Media Keuangan, Kementerian Keuangan, Vol. VI, September 2011.

<sup>27</sup> "Dampak Krisis Tidak Terlalu Luas Bagi Indonesia", Media Keuangan, Kementerian Keuangan, Vol. VI, September 2011.

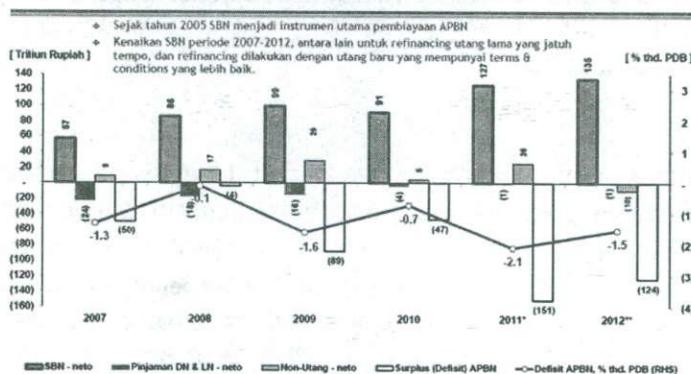
<sup>28</sup> "Perkembangan Surat Utang Negara (Pinjaman & Surat Berharga Negara)", Direktorat Jenederal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Febuari 2012.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.<sup>29</sup> Secara umum jenis SUN dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa negara SPN lebih dikenal dengan sebutan *T-Bills* atau *Treasury Bills*.
2. Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali). Sementara ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal kupon, dijual pada saat harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.

Grafik 2. Menunjukkan pada tahun 2007 defisit APBN sebesar 1,3 persen, lalu pada tahun 2011 meningkat cukup tinggi menjadi 2,1. Untuk menutupi defisit tersebut Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara. SBN periode 2007-2012 mengalami kenaikan, antara lain untuk financing utang lama yang telah jatuh tempo dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms dan kondisi yang lebih baik.

**Grafik 2. Defisit Pembiayaan APBN 2007 - 2012**



Sumber : Kementerian Keuangan, 2012

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang seperti yang terlihat dalam Grafik 3. Menunjukkan kepada kita, peningkatan kepemilikan

<sup>29</sup> "Mengenal Surat Utang Negara", Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

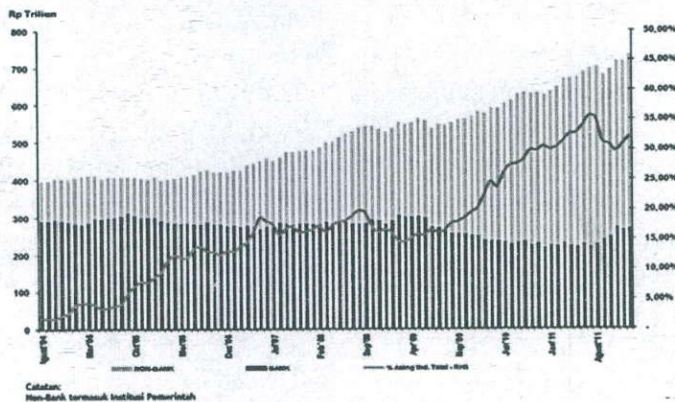
<sup>30</sup> *Ibid.*



asing terhadap Surat Berharga Negara dibandingkan dengan kepemilikan oleh Bank yang cenderung turun. Lebih lanjut terjadi peningkatan kepemilikan SBN oleh asing yang cukup tinggi tahun 2008 pada saat krisis Global melanda dunia dibandingkan dengan tahun 2004. Bahkan pada saat krisis melanda negara-negara di Eropa sekitar tahun awal tahun 2010 dari Grafik 3. ternyata peningkatan kepemilikan asing terhadap SBN mengalami trend yang meningkat.

Maka dapat disimpulkan pada saat terjadinya awal krisis global tahun 2008 hingga terjadi krisis perekonomian di kawasan Eropa yang terjadi pada awal tahun 2010 banyak dana asing masuk ke Indonesia membeli SBN, bahkan trend tersebut setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN.

**Grafik 3. Posisi Kepemilikan Surat Berharga Negara per 31 Januari 2012**



Sumber : Kementerian Keuangan, 2012.

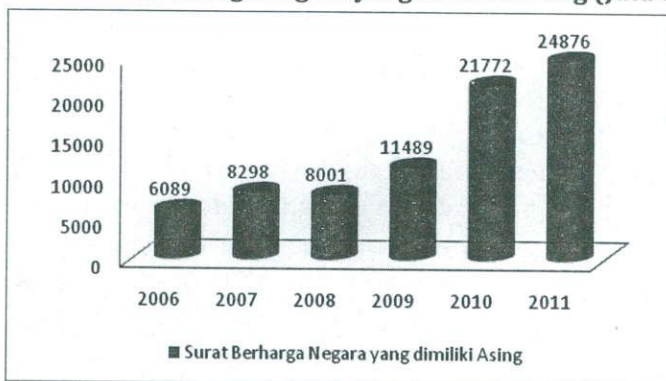
Fakta diatas menunjukkan bahwa kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara yang dimiliki asing laris menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Berdasarkan Grafik 4. Terlihat pada tahun 2006 Surat Berharga Negara yang dimiliki oleh asing hanya berjumlah \$ 6.098 juta pada tahun 2006 tetapi pada tahun 2011 naik menjadi \$ 24.876 Juta. Hal ini seiring dengan terjadinya krisis di Eropa dan stagnasi ekonomi yang dialami oleh Amerika maka terjadi aliran masuk dana asing ke Indonesia. Dana-dana asing tersebut berdasarkan penelitian Forbes dan Warnock (2010) mengemukakan faktor global, terutama menghindari resiko dan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan terjadinya *capital inflow* ke suatu negara.<sup>31</sup> Ketidaknyamanan dan kondisi perekonomian di Eropa menyebabkan dana asing tersebut mencari negara yang memberikan *yield* yang tinggi dan faktor stabilitas dari negara tersebut,

<sup>31</sup> Forbes, Kristin, *Ibid*.

akibatnya banyak masuk dana asing tersebut ke Indonesia dan mendorong Surat Berharga Negara.

Fakta menunjukkan bahwa tingkat *yield* SBN yang tinggi menyebabkan banyak salah satu alasan banyak pihak Asing membeli SBN Indonesia karena mampu memberi *return* rata-rata 34,4 persen. Bandingkan dengan *return* obligasi Amerika Serikat (AS) bertenor sama. Diperiode yang sama, *return* US *treasury* bertenor 10 tahun yang aktif diperdagangkan Cuma 18,2 persen.<sup>32</sup> Fakta ini tentu semakin menunjukkan akan semakin banyak investor yang akan memburu SBN Indonesia, yang akan berdampak semakin besarnya dana asing yang masuk ke Indonesia.

**Grafik 4. Surat Berharga Negara yang dimiliki Asing (Juta USD)**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2012

Masuknya dana asing yang membeli SBN dari sisi pemerintah adalah salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada tingkat rasio penerimaan pajak yang rendah ini. Masuknya dana asing akan membuat pemerintah akan semakin mudah mendapatkan pinjaman dari luar untuk menutupi *budget deficit*.<sup>33</sup> Pembiayaan pembangunan melalui SBN dinilai lebih murah untuk melunasi utang dibandingkan dengan penarikan utang dari luar negeri. Karenanya, pemerintah memilih opsi pembiayaan melalui SBN hingga 80 persen dari penambahan utang Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp134 triliun.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> "Harga Meroket Terkerek Sentimen Investment Grade", Kontan Mingguan, 6-12 Februari 2012.

<sup>33</sup> Kaminsky, Reinhart and Vegh, *The Unholy Trinity of Financial Contagion*, Journal of Economic Perspective 17, 51-74, 2003.

<sup>34</sup> "SBN Lebih Murah Dibandingkan Utang Luar Negeri", *Suara Merdeka*, 12 Juni 2012, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/11/121003/SBN-Lebih-Murah-Dibanding-Utang-Luar-Negeri-> diakses 26 Juni 2012.



Namun disisi yang lain, besarnya modal yang masuk tersebut ke Indonesia membuat Bank Indonesia sulit menjalankan kebijakan moneter. Dengan besarnya modal portofolio yang mudah masuk dan keluar membuat nilai tukar rupiah berfluktuasi. Dana masuk memperkuat rupiah, sedangkan dana keluar melemahkan rupiah. BI harus mensterilkan dana yang masuk dengan membeli dollar dengan rupiah. Akibatnya uang beredar makin besar. Karena itu, BI harus menarik kembali uang tersebut supaya tidak mendorong inflasi. Besarnya PMA juga mendorong peningkatan permintaan dollar untuk kebutuhan belanja modal dan modal kerja. Kredit dollar tumbuh sekitar 36 persen sementara dana pihak ketiga dalam dollar hanya tumbuh sekitar 3,5 persen. Kesejangan yang besar ini membuat BI harus berusaha keras menyediakan pasokan dollar.<sup>35</sup>

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah terhadap Surat Berharga Negara, bahwa utang yang lebih besar daripada GDP dari negara menurut Sofyan (2002) merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis disuatu negara. Pelajaran dari negara-negara Asia pada saat krisis pinjaman luar negeri menyebabkan boom dalam pinjaman domestik di seluruh negara Asia. Banyaknya dana atau pinjaman luar negeri yang masuk ke Indonesia merupakan investasi dengan sedikit investasi yang sehat. Investasi tersebut tidak mampu memberikan pendapatan devisa untuk membayar pokok dan bunga kredit asing tersebut. Bukannya membatasi pinjaman atau utang tersebut justru menggunakan dana itu untuk investasi spekulatif.<sup>36</sup> Sehingga menanggapi utang negara dalam bentuk Surat Berharga Negara yang semakin meningkat jumlahnya yang dibeli oleh asing, maka SBN tersebut harus benar-benar digunakan seperti yang disebutkan diatas yaitu untuk pembiayaan pembangunan.

## CATATAN PENUTUP

Krisis yang sedang melanda perkembangan global secara umum dan khususnya di negara-negara Eropa telah menyebabkan ketidakpastian akan ekonomi hampir di seluruh dunia. Keadaan ini membuat banyak dana asing-asing untuk berpaling dari negara-negara yang sedang krisis mencari negara lain yang lebih menguntungkan secara *yield* dan memiliki stabilitas perekonomian yang cukup baik. Salah satu negara yang menjadi incaran dana-dana tersebut adalah Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 yang diproyeksikan sekitar 6,5%, rasio utang terhadap PDB yang semakin kecil dari tahun ke tahun, dan tingkat *yield* yang cukup tinggi

<sup>35</sup> Umar Juhro, *ibid*.

<sup>36</sup> Sofyan, Harahap, *Pelajaran Dari Krisis Asia*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2002.

serta kondisi makroekonomi yang stabil tentunya akan semakin membuat dana asing banyak masuk ke Indonesia. Dana-dana asing tersebut masuk ke Indonesia, yakni melalui pembelian Surat Berharga Negara.

Yang perlu diperhatikan penentu kebijakan adalah bagaimana merubah atau mentransformasi dana asing tersebut menjadi dana yang dapat dikendalikan volatilitas aliran modal, dan nilai kurs. Salah satu caranya yakni dengan Surat Berharga Negara, selain Indonesia mendapatkan dana segar untuk menutupi defisit APBN juga didapat dengan biaya yang lebih murah dibandingkan pinjaman luar negeri. Namun satu yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kemampuan pemerintah untuk membayar kembali Surat Berharga Negara yang telah dikeluarkan. Namun yang terpenting adalah dana asing tersebut harus sepenuhnya digunakan kepentingan pembangunan nasional. Jika hal ini dilakukan dengan baik, maka terbuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi yang berkesinambungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Fratzscher, M, *Capital Flows, Push Versus Pull Factors and The Global Financial Crisis*, NBER Working Paper 17351, 2011.

Forbes, Kristin, *Why do Foreigner Invest in The United State?* Journal of International Economics 80(1):3-21, 2010.

Kementerian Keuangan, *Dampak Krisis Tidak Terlalu Luas Bagi Indonesia*, Media Keuangan, Vol VI, 2011.

Kirniarti Y, Meily Ika Pratama, *Transmission of External Shock to Indonesia Economy*, Bank Indonesia Working Paper, 2009.

Kirniarti Y, Meily Ika Pratama, *Transmission of External Shock to Indonesia Economy*, Bank Indonesia Working Paper, 2009.

Richards, A, *Big Fish in Small Ponds: The Trading Behavioural Price Impact of Foreign Investor in Asian Emerging Equity Market*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 44, 2005.

Schadler, Susan, *Recent Experience With Surge in Capital Inflow*, Occasional Paper, IMF, 1993.

Sofyan, Harapan, *Pelajaran Dari Krisis Asia*, Pustaka Quantum, Jakarta 2002.

Tim Studi Tentang Analisa Hubungan Kointegrasi dan Kausalitas Serta Hubungan Dinamis Antara Aliran Modal Asing, Perubahan Nilai Tukar dan Pergerakan IHSG di Pasar Modal Indonesia, *Analisa Hubungan Kointegrasi dan Kausalitas Serta Hubungan Dinamis antara Aliran Modal Asing, Perubahan Nilai Tukar dan Pergerakan IHSG di pasar Modal Indonesia*, BAPEPAM LK, 2008.

### Dokumen:

Arifin Siregar, *The Challenge of Serious and Complex International Financial Development: Indonesia's Position*, makalah disajikan dalam Seminar The Eurozone Crisis And The Depressed US Economy: Their Impact On Global Economy, Institut Bisnis dan Informatika (Ibil), 21 Desember 2011.

Kaminsky, Reinhart and Vegh, *The Unholy Trinity of Financial Contagion*, Journal of Economic Perspective, 2003.

"Krisis Finansial Amerika Serikat dan Eropa: Tantangan atau Ancaman?", Media Keuangan, Kementerian Keuangan, Vol. VI, 2011.

"Mengenal Surat Utang Negara", Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011.

"Perkembangan Surat Utang Negara (Pinjaman dan Surat Berharga Negara)", Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, 2012.

Santoso et. All, *Impact of Contagion Risk on The Indonesian Capital Market*, Bank Indonesia, Financial Stability Report, 2009.

#### **Artikel/ Berita Surat Kabar:**

"Apa Setelah Peringkat Naik?", Anwar Nasution, Kompas, 2 Februari 2012.

"Harga Meroket Terkerek Sentimen Investment Grade", Kontan Mingguan, 6-12 Februari 2012.

"Moody's Naikkan Peringkat Utang Indonesia", Kompas, 30 Januari 2012.

"Makna Peringkat Layak Investasi", Umar Juhro, Kompas, 30 Januari 2012.

"Perekonomian: Utang dan Dosa Yunani", Harian Kompas. Rabu 25 Januari 2012.

"SBN Lebih Murah Dibandingkan Utang Luar Negeri", Suara Merdeka, 12 Juni 2012.

"Yield Obligasi RI Tertinggi Kedua Asia", Bisnis Indonesia, 30 Januari 2012.

#### **Internet:**

"Dampak Krisis Eropa Mungkin Awal 2012", Kompas Online, 17 September 2011 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/17/13513855/Dampak.Krisis.Eropa.Mungkin.Awal.2012>, diakses 24 Januari 2012).

"Obama: Krisis Eropa Menakutkan Dunia", Kompas Online, 27 September 2011 (<http://internasional.kompas.com/read/2011/09/27/06362255/Obama.Krisis.Eropa.Menakutkan.Dunia>, diakses tanggal 24 Januari 2012).

"Uni Eropa Terancam Bubar", Kompas Online, 16 September 2011 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/16/08181040/Uni.Eropa.Terancam.Bubar>, diakses tanggal 24 Januari 2012).



### **BAB III**

## **KRISIS EROPA SEBAGAI MOMENTUM PENDALAMAN PASAR KEUANGAN INDONESIA**

*Sahat Aditua Fandhitya Silalahi\**

---

\* Penulis adalah peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat dihubungi di email: [sahat.silalahi@dpr.go.id](mailto:sahat.silalahi@dpr.go.id)

## PENDAHULUAN

Tahun 2012 kondisi perekonomian global masih menghadapi tekanan berat dari krisis keuangan Eropa. Krisis ini berawal dari defisit anggaran Pemerintah yang melebihi batas di negara-negara kawasan Eropa. Krisis ini diawali dari negara Yunani, Irlandia, dan Portugal. Sementara itu, melebarnya defisit anggaran Pemerintah juga dibarengi dengan kenaikan rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga menekan kemampuan memperoleh pembiayaan atas defisit. Tidak berfungsinya kebijakan moneter dalam kawasan Euro dan terbatasnya ruang gerak fiskal ikut mendorong perlambatan bahkan penurunan perkenomian negara lainnya dalam kawasan tersebut.

Besar kemungkinan terjadinya perambatan krisis keuangan Eropa yang bersumber dari sistem keuangan yang saling terkait dan kompleks baik di dalam maupun di luar kawasan Eropa. Beberapa pihak bahkan mengkhawatirkan krisis ini akan menjelma menjadi krisis ekonomi global. Negara yang paling mungkin mengalami dampak buruk adalah negara ekonomi maju seperti Jepang dan Amerika yang secara tradisional memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara di zona Eropa.

Kedalaman krisis keuangan Eropa yang hingga saat ini belum dapat diprediksi, dikhawatirkan akan memberi dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Walaupun demikian, kondisi perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tetap terjaga, salah satunya ditandai dengan menipisnya defisit neraca pembayaran per triwulan I 2012, yang antara lain disebabkan oleh besarnya surplus transaksi modal dan keuangan sebesar 1 miliar dolar AS.<sup>1</sup> Bank Indonesia sendiri masih optimis terhadap fundamental perekonomian Indonesia dengan menyatakan bahwa pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya bersifat sementara.<sup>2</sup>

Risiko yang mungkin dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia berkaitan dengan potensi penarikan modal besar-besaran (*sudden*) dari sistem keuangan Indonesia. Potensi risiko ini dapat terjadi kapan saja dan sulit untuk diantisipasi mengingat keterkaitan dengan tingkat kepercayaan dan faktor psikologis yang begitu erat. Bila hal ini terjadi, dapat dipastikan sistem keuangan Indonesia akan mengalami guncangan yang salah satunya ditandai dengan mengeringnya tingkat likuiditas perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Inflasi akan meningkat seiring dengan kenaikan harga barang yang membawa pelemahan daya beli masyarakat. Dampak yang paling

<sup>1</sup> Rupiah Tunggu Yunani. *Republika*. 24 Mei 2012.

<sup>2</sup> *ibid*.



dikhawatirkan adalah ambruknya sektor riil penggerak sektor perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran secara signifikan.

Indonesia pernah mengalami dampak dari *sudden reversal* pada krisis tahun 1998. Pada saat itu sebagian besar analis percaya bahwa fundamental ekonomi Indonesia akan kuat menahan krisis yang dimulai dari Thailand. Akan tetapi secara tidak terduga terjadi penarikan dana besar-besaran (*rush*) dalam waktu singkat yang mengakibatkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Faktor psikologis ikut memperburuk keadaan yang pada akhirnya mengakibatkan Indonesia jatuh pada krisis finansial.

Belajar dari pengalaman krisis 1998, krisis finansial yang berdimensi internasional memiliki kedalaman risiko yang tidak dapat diprediksi. Walaupun kondisi fundamental perekonomian dalam negeri tampak stabil yang diindikasikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, akan tetapi perlu juga diperhatikan pasar keuangan sebagai pendorong pertumbuhan tersebut. Aspek khusus yang perlu disoroti adalah aliran dana dari pelaku sektor keuangan baik dari segi kepemilikannya (apakah aliran dana didominasi oleh beberapa pihak saja), ataupun segi risiko akibat potensi *sudden reversal*. Antisipasi dari risiko inilah yang mendorong pemikiran perlunya usaha pendalaman sektor keuangan.

Pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) merupakan sebuah terminologi yang digunakan terhadap usaha meningkatkan peran dari sektor jasa keuangan terhadap ekonomi. Maksud dari terminologi ini juga mengarah kepada usaha peningkatan keberagaman pilihan jasa keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Pendalaman sektor keuangan memiliki fungsi utama untuk menurunkan risiko dan kerentanan dalam sektor keuangan yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi. Dengan kata lain pendalaman sektor keuangan memiliki fungsi sebagai diversifikasi risiko.

Pendalaman sektor keuangan secara tidak langsung akan meningkatkan akses individu dan rumah tangga terhadap kebutuhan primer, kesehatan, dan pendidikan.<sup>3</sup> Peningkatan akses ini akan berlanjut kepada turunya angka kemiskinan. Bagi lembaga-lembaga keuangan manfaat yang diperoleh dari pendalaman sektor keuangan adalah ketahanan terhadap gejolak ekonomi (*economy shock*). Risiko yang mereka tanggung telah terdiversifikasi, dalam arti akses pendapatan mereka tidak hanya tergantung kepada sebagian peminjam dana dalam jumlah besar. Namun demikian, fleksibilitas, fungsi pengawasan yang kuat, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tetap dibutuhkan dalam rangka menjaga pertumbuhan dan inovasi dalam bidang keuangan.

<sup>3</sup> Clarke, M. Z. (2004). Geographic Deregulation of Banking and Economic Growth. *Journal of Money Credit and Banking*. 36, pp.929-942.

Sebuah fakta ironis dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil risetnya yang mengungkapkan bahwa kondisi pendalaman sektor keuangan Indonesia masih dangkal bila dibandingkan beberapa negara utama di kawasan Asia. Bahkan menurut riset tersebut, kedalaman sektor keuangan terus menunjukkan penurunan atau pendangkalan sejak krisis finansial 1998.

BPS dalam riset ini menggunakan indikator yang lazim digunakan dalam mengukur kedalaman sektor keuangan, yaitu rasio jumlah uang beredar (biasa dilambangkan dengan M2) dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat pada tahun 2008 ikut serta menurunkan rasio tersebut. Pada akhir tahun 2009, tercatat rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah, yaitu sebesar 38,15 persen.<sup>4</sup>

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan dangkalnya sektor keuangan di Indonesia menurut riset ini. *Pertama*, rendahnya usaha intermediasi yang dilakukan oleh institusi di sektor keuangan. *Kedua*, rendahnya pemanfaatan pasar modal dalam pembiayaan investasi. *Ketiga*, terbatasnya instrumen investasi termasuk instrumen lindung nilai di pasar keuangan Indonesia.<sup>5</sup> Sebagai gambaran, pasar keuangan yang cukup dalam akan bermanfaat bagi pengembangan usaha melalui ketersediaan berbagai alternatif pembiayaan.

Bagi investor, pasar keuangan yang berkembang akan memberikan keuntungan berupa tersedianya beragam pilihan instrumen investasi sehingga hasil yang diperoleh akan lebih optimal. Pilihan instrumen yang beragam juga memperkecil kemungkinan adanya dana tidak produktif (*idle funds*) yang merupakan sumber dari *opportunity loss* bagi investor. Hasil akhir dari ketersediaan alternatif ini adalah menambah daya tarik investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan dananya di pasar uang sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dalam negeri.

Tahap krusial yang harus dilalui dalam usaha memperdalam pasar keuangan adalah faktor likuiditas dari pasar itu sendiri. Pasar yang likuid akan mendorong minat investor untuk melakukan transaksi di pasar tersebut mengingat potensi keuntungan dan tingkat perputaran dana yang cepat. Pasar yang likuid juga mencerminkan jumlah investor yang berperan dalam perdagangan dimana semakin banyak pihak yang terlibat dalam transaksi dan kepemilikan akan memperkecil kemungkinan terjadinya *sudden loss*.

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Agustus 2010.

<sup>5</sup> *ibid*.



Pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam merumuskan kebijakan publik memegang peranan penting disini. Kajian ini akan menganalisis kondisi dan permasalahan terkini di pasar keuangan Indonesia beserta potensi mempedalam pasar keuangan dalam negeri. Pasar yang akan dikaji oleh penulis meliputi pasar obligasi dan saham.

## **PASAR KEUANGAN DAN PERANNYA DALAM PEREKONOMIAN**

Konsep pasar keuangan adalah sebuah mekanisme dimana pemilik uang dan pihak yang membutuhkan uang bertemu dan melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan.<sup>6</sup> Levinson dalam bukunya berpendapat bahwa pasar keuangan lebih merupakan penghubung antara tabungan masyarakat dan investor aktiva riil.<sup>7</sup> Pendapat ini berdasar fakta bahwa bank berperan besar dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Pasar keuangan sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu<sup>8</sup> :

1. Pasar uang, yaitu pasar dimana instrumen kredit berkualitas tinggi diperjualbelikan. Sebagai contoh instrumen ini adalah obligasi Pemerintah dan obligasi perusahaan.
2. Pasar modal dalam arti bursa efek, yaitu sebuah tempat dimana proses jual beli efek diorganisir. Efek disini juga meliputi saham dan obligasi. Di tempat ini para penjual dan pembeli efek dipertemukan atau melalui wakil yang ditunjuk dan mengikuti sistem yang telah ditentukan oleh bursa. Fungsi utama dari bursa efek adalah menjaga agar sistem jual beli dapat terjamin dan menjaga transparansi serta kewajaran dari harga efek yang diperdagangkan.
3. Pasar derivatif yang merupakan turunan dari pasar modal. Produk yang dijual pada pasar derivatif merupakan produk turunan yang menggunakan suatu produk sebagai dasar dari harga, seperti minyak, emas, atau saham. Produk derivatif yang paling populer adalah kontrak opsi dan *future contract*. Tujuan dari keberadaan pasar derivatif adalah memperluas aktifitas jual beli di pasar modal sekaligus menyediakan alternatif instrumen lindung nilai.

Banyak analis berpendapat bahwa ketersediaan uang di sektor keuangan (atau aliran dana dalam transaksi pasar keuangan) pada jangka panjang merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu penelitian mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara

<sup>6</sup> Valdez S. 2004. *An Introduction To Global Financial Markets* 4<sup>th</sup> ed. UK: Palgrave MacMillan. pp. 132

<sup>7</sup> Levinson M. 2009. *Guide to Financial Markets* 5<sup>th</sup> ed. UK: Economist Books. pp. 54

<sup>8</sup> Mann S.V., Moorad C. (2002). *The Global Money Markets*, UK: Wiley Finance. pp. 231

ketersediaan uang di sektor keuangan dalam jangka panjang dan kestabilan pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup> Pendapat lain menyatakan pengelolaan yang baik pada sektor keuangan akan membawa perbaikan dengan indikator utama adalah meningkatnya efisiensi dari pihak perantara. Efisiensi ini ditunjukkan dengan berkurangnya biaya pengawasan, transaksi, dan informasi.<sup>10</sup> Efisiensi ini sedikit banyak didorong oleh kecenderungan pelaku sektor keuangan untuk lebih berhati-hati dalam hal pengelolaan dana.

Selanjutnya sistem keuangan yang efisien akan mendorong mobilisasi tabungan dan mendorong investasi dengan jalan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengidentifikasi dan mendanai kesempatan usaha potensial, memonitor kinerja manajemen, memungkinkan aktifitas perdagangan, lindung nilai, dan diversifikasi risiko.<sup>11</sup> Fungsi tersebut di atas pada akhirnya akan mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien, kemungkinan akumulasi modal fisik dan sumber daya manusia secara lebih efektif, dan pertumbuhan teknologi yang lebih pesat. Pada akhirnya faktor-faktor ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil sekaligus memberikan daya tahan terhadap dampak krisis yang mungkin terjadi.<sup>12</sup>

Tsuru dalam papernya menjelaskan hubungan antara pertumbuhan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan dampak pendalaman sektor keuangan kepada produktifitas modal atau kemampuan sistem keuangan dalam mendorong sumber daya finansial kepada investasi di sektor riil.<sup>13</sup> Sisi negatif pendalaman sektor keuangan dalam jangka pendek membawa risiko kepada berkurangnya jumlah tabungan masyarakat dan mengurangi jumlah konsumsi domestik. Akan tetapi, Tsuru menambahkan bahwa dalam jangka panjang penurunan jumlah tabungan dan konsumsi masyarakat akan mampu dikompensasi oleh peningkatan konsumsi akibat meningkatnya aktifitas sektor riil yang didorong oleh investasi.<sup>14</sup>

Dari sisi aliran modal, pasar keuangan yang semakin efisien akan mendorong penurunan dari biaya modal khususnya modal yang berasal

---

<sup>9</sup> Levine R. and Zervos A., 1998. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. *American Economic Review*, 88(3), pp. 537-58.

<sup>10</sup> Creane S., Goyal, A, Mushfiq M., and Sab R. 2003. *Financial Development and Growth in the Middle East and North Africa*, IMF Working Paper, Washington DC.

<sup>11</sup> Imam Alam M, Hasan T 2003. The causality between stock market development and economic growth: evidence from the United States, *Studies in Economics and Finance*, 21 (1), pp. 93-104.

<sup>12</sup> *ibid.*

<sup>13</sup> Tsuru K., 2000. Finance and Growth: Some theoretical considerations, and a review of the empirical literature, Economics Department Working papers No. 228.

<sup>14</sup> *ibid.*



dari luar negeri.<sup>15</sup> Penghematan biaya modal ini sebagian besar berasal dari berkurangnya tingkat asimetri dari informasi dan mitigasi pada konflik keagenan yang mendorong alokasi sumber daya dan pertumbuhan yang efisien.<sup>16</sup>

Pengaruh efisiensi pasar keuangan juga masuk ke dalam bursa saham dimana likuiditas pasar akan semakin tinggi yang merupakan syarat mutlak dalam perkembangan bursa saham. Sebuah penelitian menemukan fakta bahwa pengaruh pada bursa saham akan sama pada pasar modal secara umum, yaitu mengurangi keasimetrian informasi dan konflik keagenan.<sup>17</sup> Khusus untuk kepemilikan perusahaan publik melalui bursa saham, Odedokun menekankan terdapat pengaruh positif tingkat diversifikasi kepemilikan terhadap stabilitas politik<sup>18</sup> (dalam hal ini kepemilikan mungkin lebih kepada perusahaan milik negara). Stabilitas politik dalam kasus ini memegang peranan penting dalam jalannya pemerintahan dan akan berimplikasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi melalui instrumen kebijakan.

#### **PASAR KEUANGAN, OBLIGASI, DAN SAHAM DI INDONESIA**

Perkembangan pasar keuangan di Indonesia sebenarnya cukup menggembirakan. Tercatat sejak tahun 2006 hingga 2009 dari 4 sumber utama pendanaan sektor keuangan (obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, kredit, dan dana pihak ketiga) mencatat perkembangan positif. Perkembangan paling besar terjadi pada besaran dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh pihak perbankan. Pada tahun 2006 DPK yang dihimpun perbankan sebesar Rp1,32 triliun, kemudian meningkat 46% menjadi Rp1,82 triliun pada tahun 2009.<sup>19</sup> Pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia pada tahun 2006-2009 dapat dilihat pada gambar 1.

---

<sup>15</sup> Beck T. and Levine T. 2004. Stock markets, banks, and growth: Panel evidence Journal of Banking & Finance Volume 28, Issue 3, March 2004.

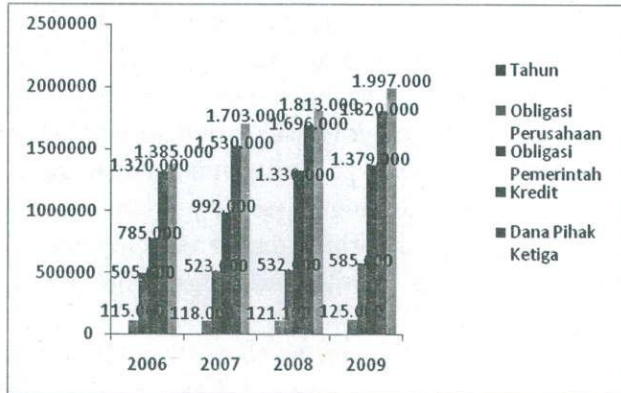
<sup>16</sup> *ibid.*

<sup>17</sup> Arestis, Phillip, Panicos Demetriades, and Kul Luintel, 2001. Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets," Journal of Money, Credit and Banking, 2001, pp. 16-41.

<sup>18</sup> Odedokun M.O. 1998, Financial Intermediation and Economic Growth in Developing Countries, Journal of Economic Studies, Vol. 25 No. 3, pp. 203-224

<sup>19</sup> Azhari Norman. 2010. *Analisis Pengaruh Financial Deepening pada Sektor Perbankan dan Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Thesis tidak dipublikasikan.

**Gambar 1 Perkembangan pasar keuangan Indonesia 2006-2009**



Sumber : Siaran pers Bank Indonesia, 2007-2010.

Berita menggembirakan diterima oleh pasar keuangan Indonesia di awal tahun 2012 ini dengan dikeluarkannya peringkat hutang Indonesia oleh Fitch Rating dari BB+ menjadi BBB- dengan *outlook* stabil.<sup>20</sup> Kenaikan peringkat hutang ini diyakini banyak pihak akan menggairahkan kinerja pasar obligasi pada tahun 2012. Keuntungan utama dari kenaikan peringkat hutang adalah reputasi yang diperoleh Pemerintah dalam mengelola hutang. Reputasi ini akan meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Selain itu Pemerintah lebih memiliki daya tawar untuk menentukan besaran bunga dan jangka waktu dari pengembalian obligasi.

Pemerintah juga telah mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah dana yang masuk ke dalam negeri diantaranya dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp134,6 triliun, lebih besar dari realisasi tahun 2011 yang sebesar Rp121,05 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar 18 persen akan dialokasikan dalam bentuk surat utang berdenominasi valas.<sup>21</sup> Persentase ini mengindikasikan Pemerintah tampaknya masih memiliki kebergantungan tinggi pada investor asing, karena *yield* yang diberikan sudah terlalu rendah sehingga tidak menarik lagi bagi investor domestik.

Terkait dengan krisis Eropa, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) menyatakan bahwa krisis tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pasar obligasi dalam negeri. Koreksi yang sempat dialami oleh IHSG selama bulan Mei memang sempat memberikan kekhawatiran pada investor, khususnya investor asing untuk menanamkan modalnya di obligasi korporasi maupun SUN. Akan tetapi kondisi likuiditas korporasi penerbit obligasi pada akhirnya mampu meredam kekhawatiran ini.

<sup>20</sup> Indonesia Raih *Investment Grade*. *Indonesia Finance Today*. 16 Februari 2012.

<sup>21</sup> *Ibid*.



Selain itu untuk lebih menarik minat investor obligasi korporasi menawarkan kupon yang cukup tinggi, antara 8 – 9,5%; sedangkan untuk SUN, Pemerintah akan menerbitkan kupon di atas bunga deposito.<sup>22</sup>

Pasar saham semakin memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era globalisasi. Dengan semakin terbentuknya interkoneksi antar pasar saham di pasar internasional, maka intensitas aliran dana antar negara semakin meningkat, sehingga kondisi pasar modal satu negara akan memiliki pengaruh terhadap pasar modal negara lain.

Secara umum pasar saham memiliki dua fungsi penting bagi perekonomian negara, yaitu:

1. Sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan antara lain untuk pengembangan usaha dan modal kerja.
2. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan demikian masyarakat memiliki kesempatan untuk menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko dari masing-masing instrumen investasi.<sup>23</sup>

Dari sisi kinerja, pasar saham Indonesia menunjukkan indikator yang menggembirakan. Sejak tahun 2005 hingga 2007 kapitalisasi pasar menunjukkan tren peningkatan dari Rp801 triliun menjadi Rp1,988 triliun. Sempat turun menjadi Rp1,076 triliun pada saat krisis finansial tahun 2008, nilai kapitalisasi ini kembali menunjukkan tren peningkatan dan mencapai Rp3,598 triliun pada akhir tahun 2011. Dari sisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pasar saham Indonesia juga menunjukkan tren positif. Pada akhir tahun 2011 nilai IHSG berada pada 3,821 setelah sebelumnya sempat mencatat level tertinggi sepanjang sejarah di angka 4,193.<sup>24</sup> Tren nilai kapitalisasi pasar dan IHSG dapat dilihat pada gambar 2.

Pergerakan nilai kapitalisasi pasar dan IHSG yang terus menunjukkan tren positif menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia menjadi salah satu tujuan dari investor untuk menanamkan dananya. Walaupun sempat terkoreksi tajam pada saat puncak terjadinya krisis 2008, aliran dana asing tetap melonjak pada bulan November dan Desember pada tahun yang sama. Bahkan IHSG mencatat angka pertumbuhan terbaik setahun setelah krisis, yaitu sebesar 86,98 persen; lebih tinggi dibandingkan indeks di beberapa bursa utama dunia

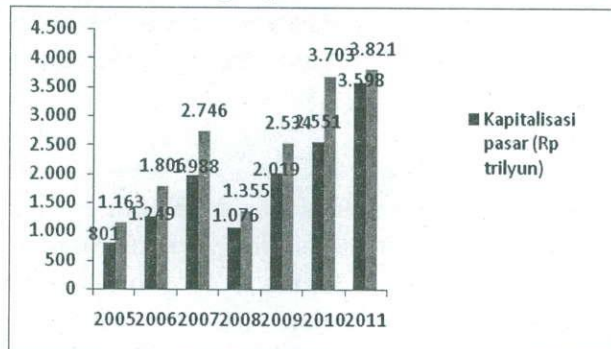
<sup>22</sup> Emisi Bond Tak Surut. *Bisnis Indonesia*. 6 Juni 2012.

<sup>23</sup> Teweles, J.R. 1998. *The Stock Market 7<sup>th</sup> ed.* UK: Wiley Trading. pp. 322.

<sup>24</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012. Masterplan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014.

seperti Strait Times (Singapura), Nikkei (Jepang), dan Dow Jones (Amerika).<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing pada kinerja emiten di bursa Indonesia sekaligus stabilitas kondisi dalam negeri yang mendukungnya.

**Gambar 2. Perkembangan pasar saham Indonesia 2005-2011**



Sumber: Pasar Saham Indonesia dan Perkembangannya, *Laporan Kinerja Bursa Efek Indonesia*, Maret 2012.

Kondisi pasar saham Indonesia saat ini masih didominasi oleh investor asing. Pada tahun 2011 dari nilai kapitalisasi sebesar Rp3,821 triliun, pihak asing tercatat memiliki 59,7 persen dari nilai tersebut.<sup>26</sup> Walaupun masih dominan, komposisi kepemilikan asing terus mencatat penurunan sejak tahun 2005 dan digantikan oleh kepemilikan domestik. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya komposisi kepemilikan domestik adalah stabilitas ekonomi politik yang mendorong investor domestik untuk menanamkan dananya di dalam negeri.

**Tabel 1. Komposisi kepemilikan saham domestik dan asing di bursa saham Indonesia**

Tahun	Domestik	Asing
2005	26,95	73,05
2006	26,6	73,4
2007	33,65	66,35
2008	32,16	67,84
2009	32,9	67,1
2010	41,8	58,2
2011	40,3	59,7

Sumber: Pasar Saham Indonesia dan Perkembangannya, *Laporan Kinerja Bursa Efek Indonesia*, Maret 2012.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *ibid.*



Di satu sisi keberadaan aliran dana asing akan memperkuat kondisi perekonomian dengan semakin melimpahnya aliran modal ke dalam sistem keuangan. Sedangkan di sisi lain, ketergantungan kepada aliran dana asing akan membawa risiko kontraksi secara mendadak apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Hal inilah yang harus memperoleh perhatian Pemerintah sehingga pendalaman pasar saham harus diprioritaskan bagi investor dalam negeri.

## PENDALAMAN PASAR OBLIGASI

Pemerintah berusaha memanfaatkan momentum kenaikan peringkat hutang luar negeri yang baru diperoleh dengan mengeluarkan obligasi valas berdenominasi dolar AS sebesar 2,5 miliar dolar sebagai salah satu alternatif pembiayaan APBN 2012.<sup>27</sup> Penjualan obligasi valas dilakukan dengan menerbitkan dua seri obligasi, yaitu RI 0422 dan RI 0142. Seri RI 0422 memiliki jangka waktu jatuh tempo selama 10 tahun dengan nominal 20 miliar dolar AS, tingkat kupon 3,75 persen, dan imbal hasil 3,85 persen. Seri RI 0422 akan jatuh tempo pada bulan April 2022. Sedangkan seri RI 0142 memiliki jangka waktu yang lebih lama, yaitu 30 tahun, senilai 0,5 miliar, dengan tingkat kupon 5,25 persen dan imbal hasil 104,64 persen. Seri RI 0142 akan jatuh tempo pada Januari 2042.<sup>28</sup>

Penerbitan obligasi berdenominasi valas merupakan salah satu langkah Pemerintah yang memiliki dua dampak sekaligus. Pertama adalah mencari alternatif pembiayaan dengan tingkat kupon relatif rendah bila dibandingkan dengan tingkat kupon obligasi dalam negeri. Kedua Pemerintah berusaha menghindari *crowding out effect* yang dapat membuat sektor swasta kekurangan sumber pembiayaan akibat dana masyarakat telah tersedot ke obligasi Pemerintah. Terlebih lagi, pembiayaan menggunakan SUN telah dilindungi undang-undang, sehingga membuat investor lebih merasa aman dalam menanamkan dananya.

Momentum yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri dengan dialihkannya sebagian alternatif pembiayaan Pemerintah ke luar negeri seharusnya direspon positif dengan ekspansi penjualan obligasi perusahaan ke pasar domestik. Akan tetapi yang terjadi di pasar adalah penurunan transaksi obligasi perusahaan bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2011. Walaupun tidak bisa dipungkiri, bahwa faktor eksternal dari kekhawatiran terhadap krisis Eropa ikut berkontribusi terhadap penurunan

<sup>27</sup> Terbitkan Obligasi Global, Bank Pemerintah Tingkatkan Likuiditas Valas, <http://financeroll.co.id/tag/penerbitan-obligasi-berdenominasi-dolar-amerika-serikat-as>, diakses 26 Juni 2012.

<sup>28</sup> *ibid.*

ini, akan tetapi satu hal yang perlu memperoleh perhatian adalah faktor pengaruh dari tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Fenomena yang kerap terjadi di Indonesia adalah pihak perbankan dinilai sangat lambat dalam merespon penurunan tingkat suku bunga BI. Akibatnya adalah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan penerbit obligasi menjadi terlampaui tinggi karena mereka harus mengeluarkan obligasi dengan tingkat kupon yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan deposito.

Pihak perbankan mengemukakan salah satu alasan pihaknya tidak dapat serta merta mengikuti penurunan suku bunga acuan BI adalah strategi usaha terutama tingkat *net interest margin* yang diminta oleh para pemegang saham. Di satu sisi perbankan dipaksa bersaing untuk memperoleh dana pihak ketiga melalui pemberian suku bunga simpanan yang menarik. Di sisi lain pihak perbankan juga dituntut memberikan tingkat keuntungan yang tinggi yang memaksa mereka mempertahankan suku bunga pinjaman yang cukup tinggi. Sebagai gambaran, pada bulan April 2012 suku bunga acuan BI sudah mencapai 5,75 persen, akan tetapi pada saat bersamaan masih terdapat bank yang mengenakan bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di atas dua digit.<sup>29</sup>

Kendala yang dihadapi perbankan dalam rangka menurunkan tingkat suku bunga pinjaman salah satunya berasal dari inefisiensi proses bisnis yang mereka jalankan. Sebagai gambaran, saat ini 4 (empat) perbankan terbesar di Indonesia (Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia) masih tetap mengoperasikan kantor cabang beserta infrastruktur pendukungnya di seluruh provinsi di Indonesia. Keberadaan kantor cabang ini turut serta menambah beban operasional yang berasal dari pengadaan karyawan, pengadaan kendaraan operasional, dan kebutuhan administratif. Usaha perbankan untuk menggalakkan teknologi informasi dalam transaksi perbankan dimana membutuhkan biaya operasional yang lebih kecil masih terkendala tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya.

Langkah BI yang meminta perbankan menurunkan tingkat suku bunga dengan cara memasukkannya dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012 patut diapresiasi. Gubernur Bank Indonesia menekankan strategi penurunan tingkat suku bunga bank merupakan keharusan di tahun 2012, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri telah mengalami koreksi dari 6,7 persen menjadi 6,3 persen.<sup>30</sup> Penurunan proyeksi ini sedikit banyak merupakan imbas dari belum pastinya penyelesaian krisis hutang yang melanda Eropa. Penurunan

<sup>29</sup> BI RATE: Suku bunga acuan hingga Mei tetap 5,75 persen, *Bisnis Indonesia*, 12 April 2012.

<sup>30</sup> BI RATE: Suku bunga acuan bertahan 5,75 persen hingga Juni 2012, *Bisnis Indonesia*, 10 Mei 2012.



tingkat suku bunga akan mencegah perlambatan ekonomi lebih dalam dengan langkah ekspansi kredit masyarakat dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Beberapa bank telah merespon positif himbauan BI ini, diantaranya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri telah menurunkan posisi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebesar 50 basis poin di semua segmen bisnis, dimana kredit korporasi dan kredit ritel menjadi masing-masing 10,5% dan 12,5%.<sup>31</sup>

Sudah sepantasnya langkah BI yang meminta perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga diikuti oleh langkah monitoring yang efektif untuk memastikan masyarakat ikut menikmati penurunan tingkat suku bunga tersebut. Monitoring yang dapat dilakukan dapat dimulai dari perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas dari bank-bank tersebut memiliki kekuasaan untuk memaksa direksi menjalankan kebijakan penurunan tingkat suku bunga.

Momentum penurunan tingkat suku bunga bank merupakan faktor fundamental dalam mendorong maraknya pasar obligasi dalam negeri. Dengan tingkat suku bunga bank yang lebih rendah, berarti beban perusahaan untuk memberikan kupon yang tinggi dalam penerbitan obligasi menjadi berkurang. Perusahaan lebih memiliki ruang untuk berhitung dalam menetapkan nilai kupon yang dapat menarik investor sekaligus tidak terlalu membebani kondisi keuangan perusahaan. Masyarakat juga memperoleh keuntungan dengan lebih maraknya pasar obligasi. Masyarakat akan memiliki alternatif yang lebih luas dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat mereka tanggung.

Hal yang harus memperoleh perhatian berikutnya adalah strategi taktikal yang lebih bersifat jangka pendek. Tidak seperti SUN, obligasi korporasi memiliki tingkat risiko yang tinggi mengingat ketergantungan yang sangat erat terhadap kondisi bisnis perusahaan. Risiko gagal bayar juga tergolong besar, terutama pada perusahaan yang bergerak pada sektor yang sangat kompetitif dan dipenuhi para pesaing. Para investor pun menyadari hal ini dimana mereka cenderung hanya membeli obligasi dari perusahaan yang sudah mapan untuk menikmati kupon yang ditawarkan. Obligasi ini tidak akan mereka perdagangkan dan akan ditahan sampai *maturity date*. Hal ini tentu berdampak tidak baik terhadap tingkat likuiditas pasar obligasi.

Pemerintah sudah sewajarnya mengakomodasi kepentingan investor untuk mengurangi risiko dengan mengeluarkan kebijakan instrumen

---

<sup>31</sup> MERRILL LYNCH berharap Bank Indonesia tahan suku bunga acuan, *Bisnis Indonesia*, 8 Mei 2012.



lindung nilai (*hedging*) terhadap obligasi yang telah dikeluarkan perusahaan. Instrumen lindung nilai yang dinilai paling aman adalah perjanjian pembelian kembali/*repurchase agreement* (repo) terhadap obligasi. Instrumen repo sudah sangat lazim diperdagangkan di pasar modal yang telah maju. Secara definisi, repo adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga yang telah disepakati.<sup>32</sup> Dari sisi kebutuhan menghindari risiko, repo juga berfungsi sebagai *secured loan*, dimana pihak pembeli akan membeli instrumen efek sebagai jaminan atas jumlah dana yang diserahkan kepada pihak penjual. Pada saat yang telah disepakati, bila sejumlah dana dibayarkan kembali dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka instrumen efek tersebut kembali menjadi milik pihak penjual. Walaupun dari mekanisme transaksi mirip seperti dana pinjaman, akan tetapi dari segi hukum terjadi perpindahan kepemilikan efek dari pihak pembeli ke pihak penjual.

Memang hanya perusahaan yang kuat secara finansial dan memiliki optimisme terhadap prospek pasar akan mampu mengeluarkan instrumen obligasi repo. Satu syarat penting dalam penerbitan obligasi repo adalah pihak perusahaan memiliki dana cadangan yang cukup untuk membeli kembali obligasi pada tanggal yang disepakati. Akan terjadi seleksi secara alamiah terhadap perusahaan mana saja yang akan mengeluarkan obligasi dengan perjanjian repo. Terdapat risiko pengurangan jumlah obligasi yang diterbitkan, akan tetapi diharapkan likuiditas pasar tetap akan terjaga seiring dengan bertambahnya volume obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang kuat secara finansial. Dengan instrumen lindung nilai, investor juga akan merasa lebih nyaman dalam bertransaksi obligasi di pasar sekunder.

Usaha meningkatkan likuiditas pasar obligasi membutuhkan waktu yang cukup. Investor membutuhkan waktu untuk melakukan analisis instrumen obligasi dengan fasilitas repo. Penambahan instrumen repo dapat menyebabkan pilihan portofolio investasi menjadi berubah dikarenakan tingkat kupon yang diberikan oleh perusahaan cenderung lebih rendah akibat pemberian fasilitas lindung nilai. Kecenderungannya adalah investor berusaha menemukan kombinasi yang optimal antara obligasi dengan tingkat kupon tinggi dengan obligasi berfasilitas repo.

Seiring dengan pertumbuhan likuiditas, Pemerintah dapat mengkaji pendalaman pasar obligasi dengan menciptakan produk derivasi. Produk ini

<sup>32</sup> Fleming, Michael J., and Kenneth D. Garbade. 2002. "When the Back Office Moved to the Front Burner: Settlement Fails in the Treasury Market after 9/11." Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review 8, No. 2 (November): 35-57.



berupa opsi obligasi yang terdiri atas opsi beli (*call option*) dan opsi jual (*sell option*). Secara definisi opsi beli efek adalah kontrak finansial antara pihak pembeli dan penjual dimana pembeli memiliki hak (bukan kewajiban) untuk membeli sejumlah efek pada saat tertentu di masa yang akan datang (sering disebut masa kadaluwarsa/*expiration date*) pada jumlah harga tertentu (*strike price*).<sup>33</sup> Berbeda dengan opsi beli, opsi jual efek (*put option*) adalah kontrak antara pembeli dan penjual dimana pembeli memiliki hak (bukan kewajiban) untuk menjual efek pada saat tertentu di masa yang akan datang pada jumlah harga tertentu.<sup>34</sup>

Dilihat dari sifatnya, kontrak opsi beli dan opsi jual mirip dengan kontrak berjangka yang memberikan pembeli hak untuk membeli efek (atau komoditas) pada harga tertentu di waktu yang telah disepakati. Perbedaan mendasar terletak pada alasan utama investor dalam mempergunakan instrumen investasi kontrak berjangka. Kontrak berjangka sering dipergunakan investor sebagai instrumen lindung nilai terutama pada saat terjadi ketidakpastian harga. Dengan kontrak berjangka, investor bisa memastikan harga yang tetap pada saat penyerahan. Opsi beli dan jual murni merupakan instrumen pendalaman pasar finansial, dimana investor baik institusi maupun perorangan berkesempatan untuk meraih keuntungan pada perdagangan efek dengan harga yang lebih terjangkau (5-10 persen dari harga efek yang mendasarinya).

## PENDALAMAN PASAR SAHAM

Fakta yang menarik dari pasar saham Indonesia adalah walaupun investor asing masih mendominasi kepemilikan di bursa, akan tetapi investor domestik mendominasi volume perdagangan harian. BEI melaporkan bahwa transaksi harian selama tahun 2011 sebesar rata-rata 64,5 persen dilakukan oleh investor domestik.<sup>35</sup> Hal ini mengindikasikan likuiditas digerakkan oleh investor domestik, investor asing sewaktu-waktu masih dapat menjadi penggerak apabila terjadi pelepasan atau pembelian saham secara besar-besaran. Implikasinya adalah sasaran peningkatan likuiditas pasar diarahkan bukan untuk meningkatkan jumlah transaksi melainkan meningkatkan jumlah kepemilikan investor domestik, terutama investor ritel.

Kembali BUMN dapat dijadikan prioritas utama dalam meningkatkan kepemilikan saham oleh domestik. PT Garuda Indonesia (GI) dapat dijadikan contoh dalam hal *initial public offering* (IPO). GI yang melaksanakan IPO awal

<sup>33</sup> Sullivan, arthur; Steven M. Sheffrin (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. pp. 288. ISBN 0-13-063085-3.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> Jamsostek Tambah Investasi di Saham, Investor Domestik Semakin Berani <http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=3190> diakses 18 Juni 2012.



tahun 2011 menjadi maskapai pertama yang terdaftar di BEI dan merupakan pemimpin di kelas *full services carrier*. Pada saat IPO, manajemen GI beserta Kementerian BUMN sepakat mengeluarkan kebijakan untuk memprioritaskan penjualan saham kepada investor domestik. Pada saat itu GI melakukan IPO dengan jumlah penawaran saham perdana sebanyak 9,3 miliar lembar saham, dimana 70-80 persen ditargetkan untuk dimiliki oleh investor domestik. Sisa dari jumlah tersebut baru diperuntukkan untuk investor asing, itupun tidak melalui mekanisme IPO melainkan melalui mekanisme *strategic partnership*.<sup>36</sup>

Dominasi pada perdagangan bursa yang diikuti dengan usaha meningkatkan kepemilikan saham oleh investor domestik secara signifikan akan meningkatkan likuiditas perdagangan. Likuiditas yang semakin tinggi merupakan kondisi ideal untuk membentuk perdagangan derivatif berupa kontrak opsi saham. Kontrak opsi saham memiliki prinsip yang sama dengan opsi obligasi hanya perbedaannya terletak pada jenis aset yang mendasarinya.

BEI sebenarnya telah melakukan kajian terhadap pengadaan instrumen derivasi kontrak opsi saham sejak tahun 2000. Pada saat itu salah satu faktor yang menghambat implementasi perdagangan produk tersebut adalah tingkat likuiditas pasar yang belum pulih pasca krisis ekonomi tahun 1998. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah belum terinformasinya masyarakat akan keberadaan instrumen derivatif akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bursa. Investor masih terbiasa untuk melakukan investasi di pasar saham dengan tujuan memperoleh dividen. Keberadaan infrastruktur perdagangan derivatif juga dirasa belum cukup mendukung. Keberadaan produk derivatif dengan didasari portofolio saham yang likuid membutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks dibandingkan perdagangan saham biasa dikarenakan mekanisme transaksinya yang lebih kompleks.

Saham-saham *blue chip* merupakan prioritas pertama dari pembuatan instrumen kontrak opsi. Alasan utamanya adalah tingkat likuiditas perdagangan yang tinggi sehingga memastikan selalu ada dasar aset yang digunakan pada saat penyerahan kontrak. Selain itu instrumen kontrak opsi saham *blue chip* memiliki kesempatan untuk *sustain* lebih besar dibandingkan saham biasa. Hal ini dikarenakan perusahaan penerbit saham *blue chip* adalah perusahaan besar pemimpin di sektor usahanya dengan reputasi yang baik di masyarakat. Perusahaan *blue chip* juga memiliki faktor fundamental kuat untuk mendukung kinerjanya dalam jangka panjang.

<sup>36</sup> Garuda Ingin Jaring Investor Jangka Panjang, [http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/01/15/15281/garuda\\_ingin\\_jaring\\_investor\\_jangka\\_panjang/#.T97m5cVTdAo](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/01/15/15281/garuda_ingin_jaring_investor_jangka_panjang/#.T97m5cVTdAo), diakses 18 Juni 2012.



Sama halnya dengan obligasi, Pemerintah juga dapat memprioritaskan penciptaan kontrak opsi saham pada perusahaan BUMN yang memiliki kinerja stabil dan menarik minat investor untuk diperdagangkan. Alternatif pilihannya adalah Bank BRI atau PT Telkom dengan rata-rata volume perdagangan perhari masing-masing mencapai 5,9 juta dan 2,1 juta lembar saham pada tahun 2011.<sup>37</sup> Dilihat dari volume perdagangan perhari, maka likuiditas untuk kedua saham BUMN tersebut kemungkinan besar akan terjaga sehingga eksekusi kontrak opsi saham dapat selalu terlaksana. Dengan asumsi harga kontrak opsi saham 7,5 persen dari harga saham, maka kontrak opsi saham Bank BRI dan PT Telkom akan jatuh pada kisaran harga Rp450,- dan Rp550,- perlembar opsi.

Berkaitan dengan prioritas peruntukkan instrumen kontrak opsi, sudah seharusnya diberikan kepada investor domestik yang telah memberikan kontribusi lebih besar pada volume perdagangan dibandingkan investor asing. Prioritas ini tentunya akan mendorong lebih banyak investor domestik di pasar modal, mengingat harga kontrak opsi saham yang sangat murah dengan potensi pengembalian yang stabil, terutama pada opsi saham perusahaan *blue chip*. Pemerintah dalam hal ini Bapepam LK hendaknya mengeluarkan regulasi yang mengatur pemberian prioritas tersebut dengan mencantumkan persentase peruntukkan baik untuk investor domestik maupun investor asing.

## CATATAN PENUTUP

Keberadaan pasar keuangan memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Di dalam pasar keuangan tersedia berbagai instrumen yang mengakomodasi investasi modal ke dalam sistem perekonomian. Modal inilah yang pada gilirannya akan digunakan baik oleh Pemerintah maupun swasta untuk menggerakkan aktifitas perekonomian yang memiliki tujuan akhir untuk mensejahterakan rakyat.

Pentingnya pendalaman pasar keuangan berkaitan erat dengan potensi minimalisasi risiko penarikan modal secara besar-besaran dari sistem keuangan. Apabila hal ini terjadi dalam waktu yang singkat maka terdapat potensi terjadinya kontraksi perekonomian secara mendadak (*sudden reversal*). Kontraksi dalam waktu singkat ini tidak akan memberikan waktu kepada Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pelaku usaha secara umum untuk bereaksi dan melakukan langkah yang efektif untuk mengantisipasinya. Akibat paling buruknya adalah sistem keuangan akan mengalami kehancuran dan negara akan terseret ke dalam krisis finansial yang melumpuhkan sektor riil.

---

<sup>37</sup> IDX Statistics 2011, Bursa Efek Indonesia Corporate Secretary, 2012.



Terkait dengan krisis finansial Eropa, banyak pihak memperkirakan Indonesia tidak akan terkena dampak signifikan. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah rendahnya nilai perdagangan antara Indonesia dan negara Uni Eropa. Nilai perdagangan yang rendah diperkirakan tidak akan mengguncang aktifitas ekspor/impor Indonesia walaupun mungkin terdapat penurunan nilai yang bersifat sementara.

Walaupun demikian, momentum krisis Eropa dapat digunakan untuk mengkaji kondisi pasar keuangan Indonesia terutama terkait dengan tingkat kedalamannya. Kedalaman pasar keuangan berkaitan erat dengan lamanya uang berada di sistem keuangan dengan cara memberikan alternatif instrumen investasi dan perdagangan yang luas. Pasar keuangan yang dalam juga cenderung melibatkan banyak pemain sehingga meminimalisir risiko terpusatnya dana pada satu golongan. Diversifikasi kepemilikan dana pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran pada jangka waktu yang pendek.

Sisi positif lain dari pasar keuangan yang dalam adalah kecenderungan untuk mendorong Pemerintah menciptakan kebijakan pengelolaan yang baik dalam artian mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku pasar, transparan, dan pruden. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi dari pasar keuangan yang ditandai dengan berkurangnya biaya pengawasan, transaksi dan informasi.

Momentum kenaikan peringkat hutang Pemerintah oleh lembaga pemeringkat hutang internasional merupakan momentum bagus dalam rangka memperdalam pasar obligasi. Penerbitan obligasi berinstrumen lindung nilai berupa *repurchase agreement* diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari pasar obligasi. Likuiditas yang tinggi merupakan syarat untuk penciptaan produk derivatif berupa kontrak beli dan kontrak jual obligasi.

Serupa dengan obligasi, penerbitan instrumen kontrak opsi saham merupakan salah satu langkah pendalaman sektor keuangan yang dapat ditempuh Pemerintah. Fakta menarik tentang pasar saham dalam negeri adalah, walaupun kepemilikan masih didominasi oleh investor asing, akan tetapi investor domestik merupakan penggerak dari likuiditas pasar. Hal ini mengimplikasikan Pemerintah tidak menemui kendala likuiditas dari penciptaan instrumen kontrak opsi. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan instrumen tersebut mengingat kompleksitas transaksinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi saham konvensional. Regulasi tentang prioritas peruntukkan kontrak opsi saham bagi investor domestik juga diperlukan agar tujuan penguatan kondisi pasar keuangan dalam negeri dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arestis, Phillip, Panicos Demetriades, and Kul Luintel, 2001. Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets," *Journal of Money, Credit and Banking*, 2001, pp. 16-41.
- Azhari Norman. 2010. *Analisis Pengaruh Financial Deepening pada Sektor Perbankan dan Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Thesis tidak dipublikasikan.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012. Masterplan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014.
- Badan Pusat Statistik. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Agustus 2010.
- Beck T. and Levine T. 2004. Stock markets, banks, and growth: Panel evidence *Journal of Banking & Finance* Volume 28, Issue 3, March 2004.
- BI RATE: Suku bunga acuan hingga Mei tetap 5,75 persen, *Bisnis Indonesia*. 12 April 2012.
- BI RATE: Suku bunga acuan bertahan 5,75 persen hingga Juni 2012, *Bisnis Indonesia*, 10 Mei 2012.
- Clarke, M. Z. (2004). Geographic Deregulation of Banking and Economic Growth. *Journal of Money Credit and Banking*. 36, 929-942.
- Creane S., Goyal, A, Mushfiq M., and Sab R. 2003. *Financial Development and Growth in the Middle East and North Africa*, IMF Working Paper, Washington DC.
- Emisi Bond Tak Surut. *Bisnis Indonesia*. 6 Juni 2012.
- Fleming, Michael J., and Kenneth D. Garbade. 2002. "When the Back Office Moved to the Front Burner: Settlement Fails in the Treasury Market after 9/11." *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review* 8, no. 2 (November): 35-57.
- Garuda Ingin Jaring Investor Jangka Panjang, [http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/01/15/15281/garuda\\_ingin\\_jaring\\_investor\\_jangka\\_panjang/#.T97m5cVTdAo](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/01/15/15281/garuda_ingin_jaring_investor_jangka_panjang/#.T97m5cVTdAo), diakses 18 Juni 2012.

- Imam Alam M, Hasan T 2003. The causality between stock market development and economic growth: evidence from the United States, *Studies in Economics and Finance*, 21 (1), 93-104.
- IDX Statistics 2011 , Bursa Efek Indonesia *Corporate Secretary*, 2012.
- Indonesia Raih *Investment Grade*. *Indonesia Finance Today*. 16 Februari 2012.
- Jamsostek Tambah Investasi di Saham, Investor Domestik Semakin Berani  
<http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=3190> diakses 18 Juni 2012.
- Levine R. And Zervos A., 1998. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. *American Economic Review*, 88 (3), pp. 537-58.
- Levinson M. 2009. *Guide to Financial Markets* 5th ed. UK: Economist Books.
- Mann S.V., Moorad C. (2002). *The Global Money Markets*, UK: Wiley Finance.
- MERRILL LYNCH berharap Bank Indonesia tahan suku bunga acuan, *Bisnis Indonesia*, 8 Mei 2012.
- Odedokun M.O. 1998, Financial Intermediation and Economic Growth in Developing Countries, *Journal of Economic Studies*, Vol. 25 No. 3, pp. 203-224
- Rupiah Tunggu Yunani. *Republika*. 24 Mei 2012.
- Sullivan, arthur; Steven M. Sheffrin (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. pp. 288. ISBN 0-13-063085-3.
- Terbitkan Obligasi Global, Bank Pemerintah Tingkatkan Likuiditas Valas,  
<http://financeroll.co.id/tag/penerbitan-obligasi-berdenominasi-dolar-amerika-serikat-as>, diakses 26 Juni 2012.
- Teweles, J.R. 1998. *The Stock Market* 7th ed. UK: Wiley Trading.
- Tsuru K., 2000. Finance and Growth: Some theoretical considerations, and a review of the empirical literature, *Economics Department Working papers* No. 228.
- Valdez S. 2004. *An Introduction To Global Financial Markets* 4<sup>th</sup> ed. UK: Palgrave MacMillan.



**BAB IV**  
**KONDISI DAN PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA**  
**DALAM KRISIS EROPA**

*Eka Budiyanthi\**

---

\* Penulis adalah Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pelayanan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. email: [eka.budiyanthi@gmail.com](mailto:eka.budiyanthi@gmail.com).

## PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian dunia tahun 2012 dihadapkan pada lima ketidakpastian. *Pertama*, tetap tingginya kekhawatiran terhadap krisis utang terutama di Eropa serta resiko terjadinya kembali krisis keuangan dan resesi global. Kekhawatiran ini masih tetap besar meskipun dana talangan ditingkatkan menjadi 1 triliun Euro dan terjadi perubahan kepemimpinan di Yunani dan Italia yang memberi harapan positif. *Kedua*, berbagai konsekuensi pokok yang timbul dari kekhawatiran terhadap krisis utang Eropa antara lain perlambatan ekonomi global, pergerakan arus modal, dan volatilitas nilai tukar mata uang. *Ketiga*, perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan potensi bencana alam yang berpengaruh pada permintaan komoditas seperti pangan dan pada perekonomian negara yang bersangkutan. *Keempat*, masih tingginya potensi krisis politik terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan *kelima*, tingginya harga beberapa komoditas pokok dunia, *supply constraint*, ketidakpastian global, dan permintaan Asia yang tetap tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi negara maju melambat. Ketidakpastian global ini perlu dicermati dengan seksama dan disiapkan antisipasinya dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Krisis utang Eropa mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui tiga jalur, yaitu jalur perdagangan, jalur perbankan, dan jalur pasar modal. Krisis di Yunani yang berlarut-larut telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Uni Eropa yang memang masih lemah. Hal ini akan mengurangi impor Uni Eropa dari negara lain termasuk Indonesia. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Uni Eropa juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Cina, maka hal ini juga akan mempengaruhi ekspor Indonesia ke kedua kawasan tersebut yang merupakan pasar utama ekspor Indonesia.<sup>2</sup>

Perlambatan ekonomi di negara-negara maju yang diperkirakan hanya tumbuh 1,9 persen pada tahun 2012 berdampak terhadap perlambatan permintaan. Kinerja ekspor Indonesia terlihat mulai melambat di kuartal terakhir tahun 2011. Sinyal ekspor yang melambat itu terlihat dari trend nilai ekspor sejak September 2011 yang terus menurun hingga Desember 2011. Beberapa produk unggulan yang trend ekspornya menurun per akhir 2011 adalah karet, minyak kelapa sawit, kopi, mebel, dan kakao. Untuk karet, misalnya, penurunan ekspor per November 2011 tercatat 9,09 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010. Ekspor karet November

<sup>1</sup> Bambang Prijambodo, "Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Tahun 2011-2012", disampaikan dalam Indonesia Economic Observation 2011-2012, 17 November 2011, Jakarta.

<sup>2</sup> "Drama Yunani dan Ekonomi Indonesia", 27 Oktober 2011, (<http://www.pelitaonline.com/read-analisis-berita/9335/drama-yunani-dan-ekonomi-indonesia/>, diakses 3 Juni 2012).



tercatat 956,5 juta dolar US, lebih rendah daripada posisi Oktober 2011 sebesar 1,29 miliar dolar US.<sup>3</sup>

Krisis keuangan Eropa sudah pasti akan sangat berdampak kepada ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor, bukan hanya ke Amerika Serikat. Pada tahun 2005-2010, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menempati urutan ke-2 setelah Jepang dengan kisaran masing-masing 12-15 persen. Selain itu negara-negara importir produk Indonesia pada urutan ke-3 s.d. 10 (Singapura, Cina, India, Malaysia, Korea, Belanda, Thailand, Taiwan) menyumbang sekitar 45 persen dari total ekspor Indonesia. Dari informasi tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa keseluruhan negara-negara tersebut sedang mengalami dampak krisis keuangan yang berakibat pada perlambatan ekonomi di setiap negara. Lebih lanjut hal ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan membeli atau bahkan membayar produk ekspor yang dihasilkan Indonesia, sehingga pada akhirnya akan memukul industri yang berorientasi ekspor di Indonesia.<sup>4</sup>

Bagi negara yang selama ini merupakan mitra dagang Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dampak dari krisis Eropa melalui jalur perdagangan sangat signifikan. Pelemahan ekonomi di Amerika Serikat mempengaruhi perekonomian negara baik yang langsung menjadi mitra dagang utama Amerika Serikat maupun yang tidak secara langsung merupakan mitra dagang Amerika Serikat. Selain itu dampak krisis Eropa melalui jalur perdagangan juga dapat mempengaruhi negara berkembang melalui jatuhnya harga komoditas seiring dengan menurunnya permintaan global.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai penyebab terjadinya krisis Eropa baik faktor-faktor penyebab eksternal maupun internal, kondisi dan perkembangan ekspor Indonesia dalam krisis Eropa, yang kemudian diakhiri dengan penutup.

## **PENYEBAB TERJADINYA KRISIS EROPA**

Krisis Eropa merupakan keberlanjutan dari krisis mortgage yang terjadi di Amerika Serikat. Selama terjadinya krisis mortgage, Amerika terus menekan perekonomian Eropa yang pada akhirnya menyebabkan krisis Eropa. Krisis

<sup>3</sup> "Ringkasan Perkembangan Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional", 22 Februari 2012, (<http://www.bappenas.go.id/node/77/3466/ringkasan-perkembangan-perdagangan-investasi-dan-kerjasama-ekonomi-internasional-bulan-februari-2012/>), diakses 20 Mei 2012).

<sup>4</sup> "Dampak Krisis Keuangan Global Tahun 2008 Terhadap Ekonomi Indonesia", 30 Oktober 2008, (<http://rutacs.wordpress.com/2008/10/30/dampak-krisis-keuangan-global-tahun-2008-terhadap-ekonomi-indonesia>), diakses 4 April 2012).

Eropa diawali dengan krisis utang Yunani, yang kemudian menjalar ke Irlandia dan Portugal serta menimbulkan efek domino ke beberapa negara Uni Eropa lainnya. Yunani merupakan negara yang sangat berkembang pesat tetapi saat ini Yunani adalah sebuah negara dengan *corruption perceptions index* berada pada peringkat 71 dari 180 negara.

Pada tahun 2000-2007, pertumbuhan ekonomi Yunani mencapai 4,2 persen per tahun yang merupakan angka tertinggi di Eropa. Tingginya pertumbuhan ekonomi Yunani disebabkan membanjirnya modal asing yang masuk ke negara tersebut. Pasca krisis global tahun 2008, dimana negara-negara lain mulai memperbaiki perekonomiannya, dua dari sektor ekonomi utama Yunani yaitu sektor pariwisata dan perkapalan justru mengalami penurunan pendapatan hingga 15 persen.

Keadaan semakin memburuk ketika pada awal tahun 2010 Pemerintah Yunani membayar Goldman Sachs dan beberapa bank investasi lainnya untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka jumlah utang Pemerintah sesungguhnya. Pemerintah Yunani juga diketahui telah memanipulasi data-data statistik ekonomi makro, sehingga kondisi perekonomiannya tampak baik-baik saja. Pada Mei 2010, Yunani mengalami defisit anggaran hingga 13,6 persen. Salah satu penyebab utama dari defisit anggaran tersebut adalah banyaknya kasus penggelapan pajak yang diperkirakan telah merugikan negara hingga 20 miliar dolar US per tahun.<sup>5</sup>

Di Irlandia sendiri sedang terbelit imbal hasil (*yield*) surat utang (obligasi) yang diterbitkan oleh Pemerintah serta anggaran negara yang mengalami defisit hingga sebesar 32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebagai defisit anggaran terbesar di kawasan Eropa. Melihat fakta tersebut, sangat wajar jika krisis Irlandia mulai menebarkan kekhawatiran global. Sebab posisi keuangan Irlandia yang tidak stabil tersebut berisiko tinggi terhadap gagal bayar obligasi yang diterbitkan Pemerintah. Adapun keadaan Portugal yang tidak jauh berbeda dengan keadaan Yunani yang terbelit utang, mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi yang berefek terhadap kehidupan politik dan sosial di Portugal.

Selain Irlandia dan Portugal, kini perluasan krisis Eropa telah menjalar ke Italia seiring melonjaknya tingkat imbal hasil surat utang Pemerintah. Tingkat imbal hasil surat berharga tersebut melonjak hingga 7,5 persen, tertinggi sejak Euro diperkenalkan pada tahun 1999. Hal ini mengakibatkan para investor terpaksa menjual surat-surat berharga Italia setelah kustodian Eropa menaikkan *collateral* (jaminan) yang dibutuhkan untuk meminjam dengan

<sup>5</sup> "Penyebab Krisis Ekonomi Eropa", 20 Desember 2011, (<http://mss-feui.com/?p=605>, diakses 5 Mei 2012).



surat utang itu. Investor menjadi semakin khawatir dengan ketidakstabilan kondisi politik setelah mundurnya Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi yang dapat menyebabkan reformasi ekonomi tertunda.

Tidak hanya pada keempat negara di atas, krisis ekonomi yang terjadi di Eropa sekarang semakin terasa mempengaruhi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, seperti Spanyol hingga Perancis. Kisruh ketidakstabilan ekonomi tersebut semakin mengkhawatirkan negara-negara Eropa bagian utara khususnya Jerman yang memiliki peran penting dalam mekanisme perekonomian anggota Uni Eropa agar lebih bekerja ekstra mengamankan Euro sebagai mata uang anggota Uni Eropa hingga tidak terpuruk pada nilai terendah. Sehingga untuk saat ini yang ditunggu adalah bagaimana upaya Uni Eropa dapat mengatasi imbas krisis yang semakin membesar.

Secara umum, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya krisis Eropa.<sup>6</sup> Faktor internal penyebab krisis Uni Eropa adalah sebagai berikut:

- Daya saing yang lemah

Sebelum suatu negara melepas jubah proteksi yang biasa digunakan untuk bertahan dalam masa sulit, selayaknya mereka sudah mengukur daya saing yang dimilikinya. Integrasi ekonomi akan membawa suatu ekonomi (negara) berhadapan dengan kekuatan ekonomi (negara) lain dalam sistem yang terintegrasi tersebut. Yang tidak mampu bersaing akan tereliminasi melalui hukum rimba mekanisme pasar. Dampak nyata terhadap suatu ekonomi yang memiliki daya saing rendah dan melepas jubah proteksi secara massif adalah tingkat pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi stagnan, rentan terkena resesi panjang dan rentan terjerat utang karena akumulasi defisit anggaran. Daya saing dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi, diantaranya adalah kinerja ekonomi suatu negara termasuk kinerja ekspor, ketersediaan sumber daya termasuk bahan baku, kepemilikan teknologi produksi serta produktivitas. Semuanya bermuara kepada tiga faktor yaitu efisiensi, inovasi dan kecanggihan.

- Tidak berjalannya fungsi kontrol fiskal yang dikenal sebagai pakta stabilitas dan pertumbuhan Uni Eropa

Kegagalan dari fungsi kontrol ini disebabkan antara lain oleh beberapa sebab. Diantaranya adalah aturan main yang dikenakan adalah sama untuk semua negara anggota yang notabene memiliki tingkat kekuatan ekonomi yang berbeda. Negara-negara tidak bisa memberikan respon cepat terhadap krisis karena semua harus didiskusikan dan dikoordinasikan dari pusat.

<sup>6</sup> "Krisis Ekonomi Uni Eropa (Bagian II: Sebab Musabab Eksternal)", 6 April 2012, (<http://kajianeropa.wordpress.com/>, diakses 4 Mei 2012)

Banyak negara yang melanggar ketentuan Kriteria Maastricht tapi tidak diberikan sanksi. Kurangnya kontrol dan lemahnya pemberian sanksi sudah terjadi sejak tahun 2001 hingga krisis benar-benar membuka mata dunia.

- Dana kohesi yang diberikan Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan dari segi infrastruktur dan lapangan kerja terbukti tidak efektif mengatasi ketertinggalan daerah periferi.

Dana yang diberikan diharapkan dapat memacu pertumbuhan di daerah periferi untuk mengurangi perbedaan dari segi infrastruktur dan lapangan kerja. Tetapi pada kenyataannya hal ini tidak berhasil, penyebabnya bisa disebabkan oleh dana yang dikeluarkan terlalu sedikit atau memang sumber daya dan lokasi daerah tersebut tidak terlalu menarik bagi investor untuk berinvestasi.

Sedangkan faktor-faktor eksternal penyebab krisis Eropa adalah sebagai berikut:

- Krisis Ekonomi Amerika

Hal ini disebabkan karena krisis eksternal di Amerika sulit dicari korelasinya dengan krisis Uni Eropa. Karena krisis utang di Amerika dan di Uni Eropa sebetulnya krisis yang sudah terindikasi sejak lama yang sering disebut para ekonom sebagai *bubble economy* yang sewaktu-waktu bisa meledak. Namun karena Amerika merupakan pasar terbesar bagi Uni Eropa dengan nilai ekspor tahun 2008 mencapai 368 miliar dolar US, maka kemungkinan itu memang ada, tapi hanya bersifat sementara. Ekspor Uni Eropa menurun 22 persen di tahun 2009 tapi kembali meningkat 13 persen di tahun 2010. Data awal tahun 2011 menunjukkan ekspor kembali normal. Menurunnya daya serap pasar Amerika akan melesukan produksi untuk ekspor yang pada akhirnya akan berdampak terjadinya PHK.

- Pergeseran Sentra Produksi Global (*Offshoring and Outsourcing*)

Mahalnya biaya produksi dan minimnya insentif dari negara di Eropa, memaksa para produsen untuk memindahkan sentra produksinya ke lokasi yang lebih menguntungkan. Pilihan itu jatuh pada negara berkembang dengan biaya produksi rendah (upah dan energi murah), peraturan yang sederhana, pajak rendah serta insentif investasi asing yang menggiurkan. Keputusan ini memiliki konsekuensi terhadap ketersediaan lowongan kerja dalam Uni Eropa sendiri. Hal ini juga terjadi dalam kasus krisis di Amerika. Dengan jumlah penduduk terbesar dunia, Cina yang waktu itu dipimpin Deng Xiao Ping sangat menyadari bahwa jumlah penduduk yang besar saja tidak cukup, mereka butuh modal dan investor asing untuk mentransfer modal dan teknologi.

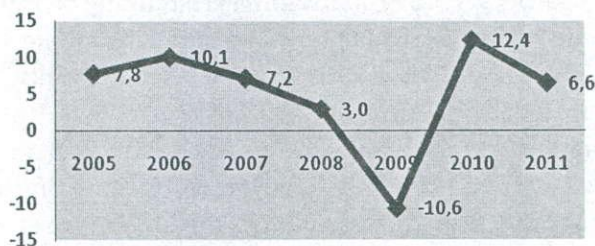


- Kelangkaan Bahan Mentah

Efek berikutnya dari pergeseran sentra produksi tersebut adalah langkanya bahan mentah untuk produksi yang menyebabkan kenaikan harga yang tak tertahankan. Untuk mempertahankan pertumbuhan, Cina dan India mencari dan menimbun pasokan faktor-faktor produksi termasuk *rare earth*, energi (batubara) dan baja. Mahalnya harga faktor produksi dan energi tentu berdampak kepada harga pokok produksi dan dengan sendirinya mengurangi daya saing produk di tataran internasional.

### KONDISI DAN PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA DALAM KRISIS EROPA

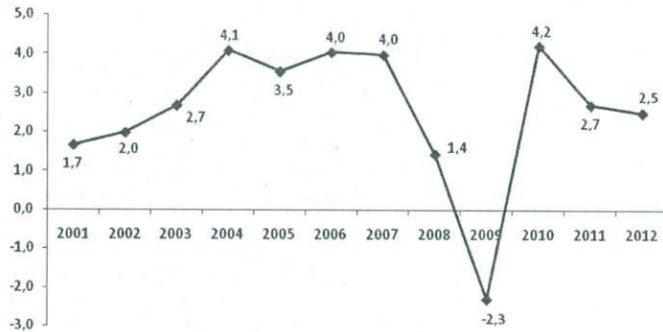
Pertumbuhan volume perdagangan barang dan jasa global tahun 2008 mencapai 3,0 persen dan pada tahun 2009 menurun drastis sebesar 13,6 persen menjadi minus 10,6 persen. Penurunan ini lebih besar dibandingkan penurunan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,2 persen. Memasuki tahun 2010, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global maka pola perdagangan juga mengalami peningkatan menjadi 12,4 persen (Grafik 1).



Sumber: Worldbank 2012, diolah.

**Grafik 1. Pertumbuhan Volume Perdagangan Global (dalam Persen)**

Grafik 2 di bawah ini menunjukkan dampak dari krisis global sudah mulai terlihat sejak tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008 menurun cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan penurunan ini terus berlangsung di tahun 2009. Melemahnya pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan permintaan menurun, sehingga volume perdagangan dunia pun mengalami penyusutan yang cukup besar. Perlambatan volume perdagangan dunia juga sudah mulai terlihat di tahun 2008, dan terus berlangsung di tahun 2009. Penurunan ekspor dan impor dari negara maju di tahun 2009 akan menjadi pemicu utama penurunan ekspor negara-negara berkembang, yang merupakan konsumen utama dari produk-produk ekspor negara berkembang.



Sumber: Worldbank 2012, diolah.

**Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Dunia (dalam Persen)**

Tahun	Indonesia	Malaysia	Phillipina	Thailand	Singapura
2005	5,7	5,3	5,0	4,6	7,4
2006	5,5	5,8	5,3	5,1	8,7
2007	6,3	6,5	7,1	5,0	8,8
2008	6,0	4,7	3,7	2,5	1,5
2009	4,6	-1,7	1,1	-2,3	-0,8
2010	6,1	7,2	7,3	7,8	14,5
2011	6,2	5,5	5,0	4,0	5,2

Sumber: Worldbank 2011, diolah.

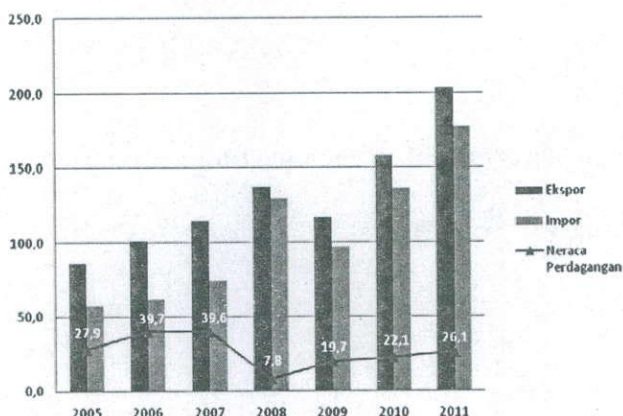
**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN (dalam Persen)**

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa beberapa negara di ASEAN termasuk Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang cukup tajam pada tahun 2008-2009. Negara yang pertumbuhan ekonominya paling merosot tajam adalah Singapura dimana sejak tahun 2007- 2009 telah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,6 persen. Jika dibandingkan dengan Singapura dan beberapa negara di ASEAN lainnya, perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008-2009 relatif tidak terlalu besar. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 6 persen dan turun kembali sebesar 1,4 persen menjadi 4,6 persen di tahun 2009. Karenanya dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu cukup kuat dalam menghadapi krisis global yang terjadi pada tahun 2008-2009.

Seiring dengan terjadinya krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008, perdagangan internasional Indonesia mengalami penurunan tajam pada surplus perdagangan total (neraca perdagangan). Pada tahun 2007 surplus perdagangan Indonesia mencapai angka 39,6 miliar dolar US. Akan tetapi pada tahun 2008 surplus perdagangan tersebut menurun drastis hingga



hanya sebesar 7,8 miliar dolar US. Di tahun 2009 terjadi peningkatan surplus dan membaik ke tingkat 19,7 miliar dolar US. Sementara itu di tahun 2010 kembali terjadi peningkatan pada neraca perdagangan Indonesia sehingga menjadi sebesar 22,1 miliar dolar US. Total nilai ekspor pada tahun 2011 mencapai 203,6 miliar dolar US atau meningkat 29,1 persen dibanding tahun 2010 (Grafik 3).



Sumber: BPS 2012, diolah.

**Grafik 3. Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Indonesia (dalam miliar dolar US)**

Peningkatan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2011 didorong oleh peningkatan ekspor non-migas sebesar 162,02 miliar dolar US atau 24,8 persen dan ekspor migas sebesar 41,59 miliar dolar US atau 48,3 persen (Tabel 2).

Tahun	Minyak Mentah (Crude Oil)	Hasil Minyak	Gas	Total Ekspor Migas
2007	9,23	2,88	9,98	22,09
2008	12,42	3,55	13,16	29,13
2009	7,82	2,26	8,94	19,02
2010	10,40	3,97	13,67	28,04
2011	13,82	4,90	22,87	41,59

Sumber: BPS, diolah.

**Tabel 2. Perkembangan Ekspor Migas Indonesia (dalam Miliar Dolar US)**

Ekspor non-migas di sektor pertanian mengalami peningkatan sekitar 25,3 persen pada tahun 2008, meskipun pada tahun 2009 sempat menurun sekitar 5,1 persen dibanding tahun sebelumnya, tetapi kemudian meningkat kembali pada tahun 2010-2011. Sektor industri juga mengalami hal yang sama dengan sektor pertanian. Pada tahun 2008 meningkat sebesar 15,6

persen kemudian di tahun berikutnya menurun sebesar 16,9 persen. Pada tahun 2011, ekspor non-migas di sektor industri ini merupakan sektor yang paling besar nilainya dibanding sektor lainnya yaitu sebesar 122,19 miliar dolar US. Hal yang berbeda terjadi pada sektor pertambangan, sejak tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan. Artinya, ekspor non-migas di sektor pertambangan di Indonesia tidak terpengaruh dengan terjadinya krisis global pada tahun 2008 (Tabel 3).

Sektor	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	3,66	4,59	4,35	5,00	5,17
Industri	76,45	88,39	73,43	98,01	122,19
Pertambangan	11,89	14,91	19,69	26,71	34,65
Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total	92,01	107,90	97,48	129,73	162,02

Sumber: BPS, diolah.

**Tabel 3. Perkembangan Ekspor Non-Migas Utama Menurut Sektor (dalam Miliar US)**

Cashin dan McDermott (2002)<sup>7</sup> membuktikan bahwa penurunan trend dalam harga komoditas memiliki pengaruh yang lebih kecil jika dibandingkan dengan meningkatnya volatilitas harga. Pergerakan harga komoditas yang cepat, tidak terduga dan besar justru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan, pendapatan riil, dan kondisi fiskal dari negara-negara yang memiliki dependensi tinggi terhadap komoditas primer.

Cashin, McDermott, dan Scott (1999)<sup>8</sup> juga membuktikan bahwa untuk sebagian besar komoditas, kemerosotan harga berlangsung lebih lama dibandingkan peningkatan harga. Negara-negara yang memiliki dependensi tinggi dengan sektor primer akan rentan terhadap gangguan eksternal yang bersumber dari meningkatnya harga komoditas internasional.

Dampak dari krisis Eropa terhadap perekonomian Indonesia dapat melalui beberapa jalur transmisi, diantaranya adalah jalur perdagangan, khususnya ekspor Indonesia ke Eropa, terutama ke negara-negara zona euro yang bermasalah tersebut. Jalur ekspor dalam prosesnya bisa langsung dan tidak langsung. Ekspor langsung adalah barang dan jasa dari Indonesia langsung dijual ke Eropa tanpa perantara negara ketiga. Saat krisis ekonomi Eropa terjadi, impor Eropa terhadap produk-produk Indonesia akan menurun yang kemudian akan menyebabkan ekspor Indonesia ke Eropa juga akan menurun.

<sup>7</sup> Paul Cashin dan C. John. McDermott, "The Long-Run Behavior of Commodity Prices: Small Trends and Big Variability", *IMF Staff Papers* Vol. 49 No. 2, 2002.

<sup>8</sup> Paul Cashin, C. John McDermott, dan Alasdair Scott, "Booms and slumps in world commodity prices", *International Monetary Fund, Research Department*, 1999.



Sedangkan jalur ekspor tidak langsung adalah melalui negara ketiga. Misalnya, sebuah perusahaan di Cina mengekspor mesin ke Eropa, dan beberapa komponen dari mesin tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan di Indonesia. Jadi, apabila ekspor mesin Cina tersebut ke Eropa menurun maka permintaan (impor) Cina untuk komponen-komponen mesin yang dibuat di Indonesia juga menurun yang berarti ekspor Indonesia ke Cina merosot. Contoh lainnya adalah misalnya ekspor Indonesia ke Thailand, yang ekonominya mengalami penurunan akibat langsung dari krisis ekonomi Eropa. Hal ini membuat impor Thailand, termasuk untuk produk-produk buatan Indonesia menurun yang berarti dengan sendirinya ekspor Indonesia ke Thailand merosot.<sup>9</sup>

Negara	Mitra Dagang (Ekspor)
Malaysia	AS, Singapura, Jepang, Cina, dan Thailand
Cina	AS, Hongkong, Jepang, Korea, dan Jerman
Korea	Cina, AS, Jepang, Hongkong, Singapura, dan India
Singapura	Malaysia, Cina, Hongkong, Indonesia, AS, Jepang, Korea, India, Negara Asia lainnya, dan Thailand
India	AS, Uni Emirat Arab, Cina, Singapura, Inggris, Hongkong, dan Belanda
AS	Kanada, Cina, Jerman, Jepang, Inggris, dan Meksiko
Jepang	AS, Cina, Korea, Singapura, Hongkong, dan Thailand

Sumber: Comtrade.

**Tabel 4. Mitra Dagang Utama dari Tujuh Negara Tujuan Utama Ekspor Indonesia**

Berdasarkan tabel 4, hanya sedikit negara dari mitra dagang dari tujuh negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia yang mengekspor ke wilayah Eropa yaitu Cina, India dan Amerika Serikat. Artinya pangsa ekspor Indonesia didominasi untuk wilayah Asia.

Pada tahun 2011, Cina merupakan negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia. Selama 2011, ekspor Indonesia ke Cina tumbuh sebesar 53,4 persen lebih besar dibandingkan negara tujuan lain. Selain Cina, ekspor Indonesia ke India juga meningkat signifikan sebesar 34,8 persen. Peningkatan tersebut menggeser posisi Singapura dan Malaysia dari posisi ketiga menjadi keempat sebagai negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Ekspor ke Cina dan India memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia selama 2011 (Tabel 5).

No	Negara	2010	2011
1	Singapura	20.2	16.3
2	Malaysia	37.6	18.7

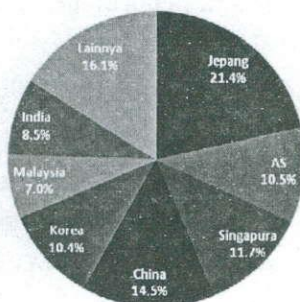
<sup>9</sup> Tulus Tambunan, "Apakah Krisis Utang Zona Euro akan Berdampak pada Perekonomian Indonesia?", *Policy Discussion Paper Series* No. 32, 2011.

3	Cina	57.9	53.4
4	Jepang	37.7	11.1
5	Amerika Serikat	27.3	17.7
6	India	34.0	34.8
7	Korea	32.8	10.1

Sumber: Kemendag, diolah.

**Tabel 5. Pertumbuhan Ekspor Indonesia berdasarkan Negara Tujuan Utama (dalam Persen)**

Transaksi ekspor Indonesia ke Jepang sekitar 21,4 persen dari total ekspor Indonesia pada tahun 2011. Kemudian ke Cina sekitar 14,5 persen, Singapura 11,7 persen, Amerika Serikat 10,5 persen, Korea 10,4 persen, India 8,5 persen, Malaysia 7,0 persen dan negara lainnya 16,1 persen. Karenanya dampak krisis Eropa tidak akan terlalu besar pada perdagangan di Indonesia yang pasar ekspor utamanya adalah kawasan Asia (Grafik 4).

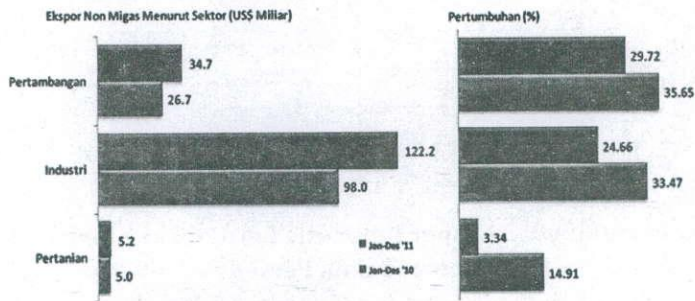


Sumber: Comtrade, diolah.

**Grafik 4. Transaksi Ekspor Indonesia Tahun 2011**

Ekspor non-migas Indonesia selama tahun 2011 didominasi oleh barang-barang industri dengan komposisi sekitar 60 persen dari total ekspor sektor non-migas. Ekspor produk industri non-migas mencapai 122,2 miliar dolar US, meningkat 24,7 persen dari periode yang sama tahun 2010. Peningkatan tertinggi terjadi pada ekspor sektor pertambangan sebesar 29,7 persen, dari 26,7 miliar dolar US menjadi 34,7 miliar dolar US. Sementara ekspor sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 3,3 persen, dari 5,0 miliar dolar US menjadi 5,2 miliar dolar US (Grafik 5).

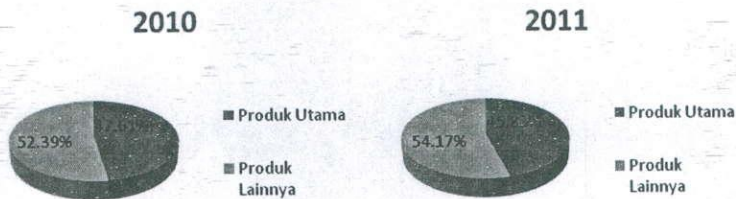




Sumber: BPS, diambil dari Siaran Pers Kemendag pada 1 Februari 2012.

**Grafik 5. Struktur Ekspor Non-Migas Indonesia**

Adapun terdapat 10 (sepuluh) produk ekspor non-migas utama yaitu antara lain sawit; karet dan produk karet; tekstil dan produk tekstil; elektronik; produk hasil hutan; alas kaki; otomotif, kopi, kakao; dan udang. Dalam hal diversifikasi produk ekspor non-migas, dominasi sepuluh produk utama dalam ekspor non-migas pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sekitar 45 persen dari tahun sebelumnya sebesar 47 persen (Grafik 6).



Sumber: BPS, diambil dari Siaran Pers Kemendag pada 1 Februari 2012.

**Grafik 6. Struktur Produk Ekspor Non-migas dan Perkembangan Ekspor Produk Utama**

Krisis yang mulai melanda Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2011 lalu tentunya berdampak pada perekonomian Indonesia. Krisis tersebut menandakan adanya perlambatan ekonomi masyarakat Eropa dan AS yang berimbas pada penurunan permintaan sehingga dampak yang paling dirasakan oleh Indonesia adalah menurunnya ekspor. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), surplus perdagangan Indonesia sampai pada kuartal III tahun 2011 memang meningkat sebesar 37,5 persen dari tahun 2010 pada periode yang sama. Namun, kinerja ekspor Indonesia mulai melemah pada bulan September 2011, dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada bulan September, ekspor Indonesia mengalami penurunan dibanding bulan Agustus. Hal itu ditunjukkan oleh nilai ekspor

bulan September yang hanya mencapai 17,54 miliar dolar US dibanding bulan Agustus yang mencapai 18,64 miliar dolar US. Penurunan terus terjadi pada bulan Oktober di mana ekspor hanya mencapai 16,95 miliar dolar US. Dari data tersebut, menurunnya jumlah ekspor ke Eropa dan AS berkontribusi besar pada penurunan kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan. BPS melansir, ekspor Indonesia ke Uni Eropa menurun 543 juta dolar US dan ekspor ke AS menurun 200 juta dolar US pada bulan September 2011. Dan penurunan ini akan terus terjadi apabila Indonesia belum mendapatkan pasar baru sebagai alternatif tujuan ekspor, mengingat kondisi perekonomian Eropa dan AS yang masih labil.<sup>10</sup>

Dalam mengatasi masalah ini, salah satu langkah yang bisa diambil oleh Pemerintah adalah dengan reorientasi pasar ekspor ke Asia (terutama Cina), Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Dalam jangka menengah, reorientasi ekspor akan mampu mendongkrak ekspor yang sempat menurun akibat krisis. Dalam jangka panjang, reorientasi ekspor akan bisa memperluas pasar ekspor Indonesia dengan menciptakan target-target pasar yang baru. Terjadinya krisis ini menuntut Indonesia untuk mampu memanfaatkan semua peluang yang ada, misalnya ACFTA, untuk dapat meningkatkan nilai ekspor. Memang, semenjak diberlakukannya ACFTA, terjadi defisit pada neraca perdagangan Indonesia dengan Cina. Namun secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Oleh karena itu, peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara menjadikan Cina sebagai sasaran utama ekspor Indonesia, mengingat tidak lagi ada hambatan tarif dan kuota.<sup>11</sup>

Selain itu, reorientasi pasar perlu juga ditujukan ke dalam negeri, dalam artian memanfaatkan pasar domestik untuk menampung produk yang mengalami penurunan ekspor. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan kualitas produk yang tinggi agar mampu bersaing dengan produk-produk impor, agar masyarakat Indonesia juga turut menikmati produk dalam negeri yang memiliki kualitas lebih baik. Langkah lain yang bisa diambil oleh Pemerintah adalah dengan diversifikasi komoditas, mengingat penyebab utama penurunan kinerja ekspor Indonesia pada akhir tahun 2011 bukan terletak pada berkurangnya volume ekspor melainkan akibat turunnya harga komoditas. Pada bulan Oktober 2011 misalnya, Indonesia berhasil mengekspor 52,55 miliar kg dibandingkan bulan September yang hanya 49,67 miliar kg. Namun, jumlah itu tidak diimbangi dengan nilai ekspor yang menurun dari 17,54 miliar dolar US pada bulan September menjadi 16,95 miliar dolar US

<sup>10</sup> "Tantangan 2012: Mengatasi Penurunan Kinerja Ekspor Akibat Krisis Global", 12 Maret 2012, (<http://bem.feb.ugm.ac.id/index.php/publication/kajian/9-tantangan-2012-mengatasi-penurunan-kinerja-ekspor-akibat-krisis-global>, diakses pada 3 Juni 2012).

<sup>11</sup> *Ibid.*



pada bulan Oktober. Oleh karena itu, para eksportir harus pandai-pandai memilih komoditas apa saja yang permintaannya masih tinggi sehingga harga komoditas itu tidak menurun drastis. Dengan demikian, apabila Indonesia mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan baik, tentunya perekonomian Indonesia akan mampu bertahan dan tetap berkembang di tengah goncangan krisis global.<sup>12</sup>

## CATATAN PENUTUP

Krisis yang mulai melanda Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu tentunya berdampak pada perekonomian Indonesia. Krisis Eropa dan Amerika Serikat dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur, salah satunya melalui perdagangan. Krisis tersebut menandakan adanya perlambatan ekonomi masyarakat Eropa dan Amerika Serikat yang berimbas pada penurunan permintaan sehingga dampak yang paling dirasakan oleh Indonesia adalah menurunnya ekspor.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global sekarang ini, aktivitas perdagangan antar negara di dunia juga terus meningkat. Diharapkan perbaikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan global ini merupakan sinyal positif bagi perbaikan permintaan atas ekspor Indonesia yang mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian domestik.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar konsumen yang besar, dan daya beli masyarakat yang tinggi, disertai langkah-langkah strategis yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, diharapkan krisis Eropa dan Amerika Serikat tidak akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Dalam Jurnal

Cashin, Paul dan Mcdermott, C. John. "The Long-Run Behavior of Commodity Prices: Small Trends and Big Variability". *IMF Staff Papers* Vol. 49 No. 2, 2002.

\_\_\_\_\_, dan Scott, Alasdair. "Booms and Slumps in World Commodity Prices". International Monetary Fund Research Department, 1999.

Tambunan, Tulus. "Apakah Krisis Utang Zona Euro akan Berdampak pada Perekonomian Indonesia?". *Policy Discussion Paper Series* No. 32, 2011.

### Artikel Dalam Seminar

Prijambodo, Bambang. "Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Tahun 2011-2012". Disampaikan dalam Indonesia Economic Observation 2011-2012, 17 November 2011.

### Tulisan Dalam Internet

"Dampak Krisis Keuangan Global Tahun 2008 Terhadap Ekonomi Indonesia". (<http://rutacs.wordpress.com/2008/10/30/dampak-krisis-keuangan-global-tahun-2008-terhadap-ekonomi-indonesia>, diakses 4 April 2012).

"Krisis Ekonomi Uni Eropa (Bagian II: Sebab Musabab Eksternal)". (<http://kajianeropa.wordpress.com/>, diakses 4 Mei 2012).

"Penyebab Krisis Ekonomi Eropa". (<http://mss-feui.com/?p=605>, diakses 5 Mei 2012).

"Ringkasan Perkembangan Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional". (<http://www.bappenas.go.id/node/77/3466/ringkasan-perkembangan-perdagangan-investasi-dan-kerjasama-ekonomi-internasional-bulan-februari-2012/>, diakses 20 Mei 2012).

"Tantangan 2012: Mengatasi Penurunan Kinerja Ekspor Akibat Krisis Global". (<http://bem.feb.ugm.ac.id/index.php/publication/kajian/9-tantangan-2012-mengatasi-penurunan-kinerja-ekspor-akibat-krisis-global>, diakses pada 3 Juni 2012).

"Drama Yunani dan Ekonomi Indonesia". (<http://www.pelitaonline.com/read-analisis-berita/9335/drama-yunani-dan-ekonomi-indonesia/>, diakses pada 3 Juni 2012).



**BAB V**  
**PERKEMBANGAN PERDAGANGAN DAN**  
**FAKTOR PENENTU PERMINTAAN KAKAO INDONESIA**

*Iwan Hermawan\**

---

\* P3DI, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270 dan email di: [iwan.hermawan@dpr.go.id](mailto:iwan.hermawan@dpr.go.id).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekspor kakao memiliki arti penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Tahun 1990 hingga tahun 2011, ekspor kakao Indonesia menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 1990 ekspor kakao Indonesia sebesar 119,72 ribu ton atau setara dengan USD 127.091 ribu dan diproyeksikan pada tahun 2012 mencapai USD 2 miliar atau tumbuh 11 persen dari tahun 2011.<sup>1</sup> Kakao Indonesia banyak diekspor ke Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Perancis, Belanda, Belgia, Inggris, Malaysia, Singapura, Thailand, Cina, India, Taiwan, Kanada, Arab Saudi, Estonia, Rusia, Brazil, Selandia Baru, dan Australia.

Pantai Gading dan Ghana memiliki nilai ekspor kakao yang lebih tinggi daripada Indonesia di pasar dunia. Salah satu faktornya karena negara-negara Afrika memiliki akses pasar ke wilayah Uni Eropa, khususnya dengan tidak membayar tarif ekspor. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Afrika, Sao Tome<sup>2</sup> memiliki nilai ekspor kakao yang lebih rendah dari Indonesia, hal ini lebih disebabkan oleh kualitas produk kakao yang berbeda.<sup>3</sup>

Di sisi lain situasi politik Pantai Gading yang kurang kondusif menjadikan pemilik industri kakao dunia mulai melirik negara lain, termasuk Indonesia. Menurut Kepala Bidang Usaha Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Suryo Wardani, hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan produksi kakao nasional. Oleh sebab itu kini banyak petani berswadaya memperluas areal tanaman kakao karena memiliki prospek yang sangat baik.<sup>4</sup> Di wilayah Asia dan Oseania, Indonesia memiliki *share* produksi kakao lebih dari 80 persen selama tahun 2008-2010. *Share* produksinya terhadap produksi kakao dunia juga terus meningkat, yaitu dari 12,92 persen pada tahun 2008 menjadi 14,81 persen pada tahun 2010 dan dengan luas tanaman kakao mencapai 1,65 juta hektar.

Pada sisi konsumsi, seiring dengan peningkatan konsumsi coklat dan kakao *dark* dengan tujuan kesehatan dan nutrisi, hal ini mendorong konsumsi

<sup>1</sup> Rosmiyati Dewi Kandi. 2012. Nilai Ekspor Kakao Diproyeksikan Mencapai USD 2 Miliar. <http://www.indonesiainancetoday.com/read/20480/Nilai-Ekspor-Kakao-Diproyeksikan-Mencapai-US-2-Miliar>. Diakses 6 September 2012.

<sup>2</sup> Republik Demokratik Sao Tome dan Principe adalah negara kepulauan yang terletak di sebelah utara-barat lepas pantai Gabon. Salah satu negara terkecil di Afrika dan luasnya hanya 67 persen dari luas Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

<sup>3</sup> Mareike Meyn and Jane Kennan. 2009. The Implications of the Global Financial Crisis for Developing Countries' Export Volumes and Values. Working Paper 305. Overseas Development Institute, London, p. 16.

<sup>4</sup> Syamsul Hadi dan Laksono Hari W. 2011. Indonesia Berpeluang Kuasai Pasar Kakao. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/28/19351828/Indonesia.Berpeluang.Kuasai.Pasar.Kakao>. Diakses 27 Juni 2012.



kakao dunia cenderung terus meningkat.<sup>5</sup> Konsumsi kakao dunia<sup>6</sup> meningkat sebesar 4,8 persen pada tahun 2010 dibanding tahun sebelumnya.<sup>7</sup> Di mana wilayah Uni Eropa memiliki *share* konsumsi total terbesar, yaitu 40,97 persen terhadap total konsumsi kakao dunia. Sedangkan konsumsi kakao Indonesia sendiri relatif stabil, yaitu di kisaran 120 ribu ton antara tahun 2009 dan 2010.<sup>8</sup> Diprediksikan konsumsi kakao dunia akan terus meningkat sebesar 3 persen per tahun dan bahkan dengan potensi kenaikan yang lebih besar lagi jika ekonomi Cina dan India terus tumbuh.<sup>9</sup>

Produksi kakao di Indonesia dan konsumsi kakao di wilayah Uni Eropa dapat terganggu sebagai akibat adanya krisis finansial yang melanda negara-negara di kawasan Uni Eropa. Meskipun banyak pihak<sup>10</sup> yang menyatakan bahwa krisis Uni Eropa tidak banyak mempengaruhi perekonomian Indonesia. Namun sisi perdagangan internasional harus tetap mendapat perhatian, khususnya ekspor kakao. Menurut Gita Wiryawan, selain berdampak pada sisi keuangan, krisis Uni Eropa juga mempengaruhi perdagangan internasional. Krisis Uni Eropa yang terus menerus terjadi akan mempengaruhi, salah satunya pelemahan nilai tukar rupiah, di samping penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan menipisnya likuiditas valuta asing. Pelemahan nilai tukar rupiah sebagai akibat kebutuhan valas, seperti dolar yang meningkat, dapat berdampak pada ekspor Indonesia ke sejumlah negara di wilayah Uni Eropa. Faktor utama yang harus diperhatikan adalah depresiasi nilai tukar rupiah akan mendorong harga sejumlah barang ekspor Indonesia lebih murah.<sup>11</sup> Menurut Hatta Rajasa, di saat bersamaan ternyata kondisi

<sup>5</sup> International Cocoa Organization. 2010<sup>a</sup>. The World Cocoa Economy: Past and Present. One Hundred and Forty-Second Meeting 14-17 September. International Cocoa Organization, London, p. 4.

<sup>6</sup> Dihitung dari *grinding* biji kakao oleh industri, sebagai permintaan turunan.

<sup>7</sup> International Cocoa Organization. 2010<sup>b</sup>. Annual Report 2009/2010. International Cocoa Organization, London, p. 3.

<sup>8</sup> International Cocoa Organization. 2010<sup>b</sup>. *Op.Cit.*, p. 3.

<sup>9</sup> Eny Prihtiyani. 2012. Harga Kakao di Bursa Berjangka Menguat. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/28/16251618/Harga.Kakao.di.Bursa.Berjangka.Menguat>. Diakses 30 Agustus 2012.

<sup>10</sup> Menurut Adhitya Wardhono, Pengamat Ekonomi Universitas Jember, dan Sigit Pramono, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) bahwa krisis finansial Uni Eropa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sisi keuangan atau moneter di Indonesia karena eksposur perbankan Indonesia dan pihak swasta ke wilayah Uni Eropa relatif kecil. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak begitu terpengaruh oleh krisis finansial Uni Eropa karena utang Indonesia pada negara-negara di zona Uni Eropa relatif kecil.

<sup>11</sup> "Pengamat: Perkuat Nilai Rupiah Atasi Krisis Eropa". [http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/23/58439/pengamat\\_perkuat\\_nilai\\_rupiah\\_atasi\\_krisis\\_eropa/#.UD8vwqMW640](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/23/58439/pengamat_perkuat_nilai_rupiah_atasi_krisis_eropa/#.UD8vwqMW640). Diakses 30 Agustus 2012.



ekonomi Cina dan India juga mengalami penurunan yang pada akhirnya berdampak pula pada ekspor Indonesia.<sup>12</sup> Contohnya harga biji kakao kering di tingkat petani di Provinsi Aceh pada minggu ketiga Juni 2012 mengalami penurunan sebesar 23 poin. Krisis finansial yang terjadi di kawasan Uni Eropa berdampak pada penurunan daya beli komoditas tersebut.<sup>13</sup>

## PERMASALAHAN

Jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika, sebenarnya *share* ekspor kakao Indonesia ke wilayah Uni Eropa relatif sangat kecil. Bahkan secara total, wilayah Asia hanya mampu memenuhi kebutuhan biji kakao di pasar Uni Eropa sebesar 0,5 persen pada tahun 2009 dan negara-negara Afrika memenuhi kebutuhan pasar Uni Eropa hingga 63,8 persen dengan mendapat fasilitas bebas tarif melalui skema *General System of Preferences* (GSP). Fasilitas tersebut tidak diberlakukan sama antara satu negara dengan negara lainnya. Negara produsen kakao yang merupakan negara miskin akan memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk. Sedangkan Indonesia, masuk kelompok negara berkembang, hanya memperoleh pengurangan tarif rata-rata sebesar 3,5 persen dari tarif yang berlaku umum (*Most Favoured Nations*). Di samping itu, perlakuan khusus diberikan bagi negara (Swiss dan Norwegia) yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Di sisi lain ekspor biji kakao Indonesia ke wilayah Amerika *share*-nya ternyata relatif mendekati *share* ekspor dari negara-negara Afrika walaupun kualitas kakao Indonesia masih banyak menghadapi masalah.

Sekecil apapun *share* ekspor kakao Indonesia ke wilayah Uni Eropa tetap dapat mengalami gangguan dari krisis finansial Uni Eropa. Menurut Tulus Tambunan<sup>14</sup> bahwa transmisi pengaruh krisis Uni Eropa akan dirasakan melalui jalur perdagangan tidak langsung, di mana krisis tersebut dapat mempengaruhi permintaan komoditas dari Indonesia, termasuk kakao, oleh negara lain sebagai mitra dagang dari negara di wilayah Uni Eropa. Pada perdagangan secara langsung, krisis Uni Eropa dapat menstimulasi terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah. Hal ini seharusnya menjadikan biji kakao dan produk-produk turunannya menjadi lebih murah atau kompetitif dan akhirnya

<sup>12</sup> Suhendra. 2012. Hatta: Krisis Eropa Jadi Ancaman Sekaligus Peluang untuk RI. <http://finance.detik.com/read/2012/06/13/154144/1940500/4/hatta-krisis-eropa-jadi-ancaman-sekaligus-peluang-untuk-ri>. Diakses 30 Agustus 2012.

<sup>13</sup> Antara. 2012. Ekonomi Eropa Pengaruhi Kakao Aceh. <http://antara-aceh.com/ekonomi-eropa-pengaruhi-kakao-aceh.html>. Diakses 30 Agustus 2012.

<sup>14</sup> Tulus Tambunan. 2011. Apakah Krisis Utang Zona Euro akan Berdampak pada Perekonomian Indonesia? Policy Discussion Paper Series. Center for Industry, SME & Business Competition Studies. Trisakti University, Jakarta. hal. 12.



dapat meningkatkan ekspor biji kakao Indonesia. Akhirnya jika dampak krisis Uni Eropa tidak dapat diantisipasi, maka dapat mengganggu kinerja ekspor kakao pada khususnya dan ekspor nonmigas Indonesia pada umumnya.

Beberapa contoh kasus terkait dengan dampak krisis Uni Eropa dengan perdagangan kakao di Indonesia terjadi di daerah Sumatera Utara dan Lampung Selatan. Selama semester I tahun 2012 ini, nilai ekspor kakao Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 26,62 persen. Sepanjang tahun 2012, musim panen tidak begitu mendukung dan harga biji kakao domestik yang lebih mahal dibandingkan dengan ekspor, maka membuat kakao lebih banyak dijual di pasar domestik.<sup>15</sup> Sedangkan harga biji kakao di wilayah Kecamatan Merbaumataram, Kecamatan Way Sulan, dan Kecamatan Katibung daerah Lampung Selatan mengalami kenaikan Rp1.500-Rp2.000/kg. Saat ini harga biji kakao naik menjadi Rp18.500-Rp19.000/kg dari sebelumnya Rp16.000-Rp17.000/kg.<sup>16</sup> Hal tersebut disebabkan depresiasi nilai rupiah akibat dampak krisis finansial yang melanda negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Berdasarkan fakta dan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan dan faktor penentu permintaan kakao Indonesia. Sebagai salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia, maka akan sangat menarik menganalisis pula pengaruh krisis finansial Uni Eropa terhadap perkembangan ekspor kakao Indonesia.

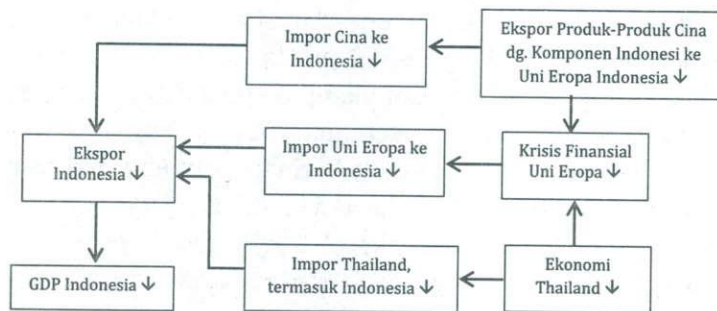
## **TINJAUAN TEORI DAN EMPIRIS**

### **A. Tinjauan Teori**

Dampak krisis finansial Uni Eropa terhadap ekonomi Indonesia dapat dijelaskan melalui sejumlah jalur transmisi, salah satu di antaranya adalah jalur perdagangan, khususnya ekspor Indonesia ke negara-negara wilayah Uni Eropa yang bermasalah tersebut. Jalur ekspor dalam prosesnya dapat terjadi langsung dan tidak langsung (Gambar 1).

<sup>15</sup> Tempo.2012.IndonesiaKebalKrisisEropa.<http://www.tempo.co/read/news/2012/05/25/087406099/Indonesia-Kebal-Krisis-Eropa>. Diakses 30 Agustus 2012.

<sup>16</sup> Prihtiyani. *Loc.Cit*.



Sumber: Tambunan, 2011.<sup>17</sup>

**Gambar 1. Dampak Krisis Finansial Uni Eropa terhadap Ekonomi Indonesia melalui Jalur Ekspor Barang**

Ekspor langsung terjadi jika barang dan jasa dari Indonesia langsung dijual ke wilayah Uni Eropa tanpa perantara negara ketiga. Misalnya jika terjadi krisis finansial Uni Eropa, maka membuat impor Uni Eropa terhadap produk-produk Indonesia menurun karena daya beli yang menurun dan hal ini mengakibatkan ekspor Indonesia pada akhirnya juga menurun. Sedangkan jalur ekspor tidak langsung adalah melalui negara ketiga. Misalnya jika sebuah perusahaan di Cina mengekspor mesin ke wilayah Uni Eropa dan beberapa komponen dari mesin tersebut dibuat oleh perusahaan di Indonesia. Apabila ekspor mesin Cina tersebut ke wilayah Uni Eropa menurun akibat krisis tersebut, maka permintaan (impor) Cina untuk komponen-komponen mesin yang dibuat di Indonesia juga menurun yang berarti ekspor Indonesia ke Cina juga menurun. Contoh lainnya adalah ekspor Indonesia ke Thailand, di mana ekonominya sedang *lesu* akibat langsung dari krisis finansial Uni Eropa. Hal ini membuat impor Thailand, termasuk untuk produk-produk buatan Indonesia menurun yang berarti ekspor Indonesia ke Thailand juga menurun.<sup>18</sup>

## B. Tinjauan Empiris

La Saharun menunjukkan jika krisis finansial pada tahun 1997/1998 memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan kakao. Dampak positif antara lain meningkatnya pendapatan petani kakao sebagai akibat dari peningkatan harga kakao dunia, peningkatan investasi pada perkebunan rakyat, dan daya saing di pasaran dunia juga meningkat.<sup>19</sup> Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing sejak Juli tahun 1997, menyebabkan

<sup>17</sup> Tambunan. *Loc.Cit.*, hal. 12.

<sup>18</sup> Tambunan. *Loc.Cit.*, hal. 12.

<sup>19</sup> La Saharun. 2001. Analisis Respon Areal dan Produksi Kakao pada Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar di Propinsi Irian Jaya. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, hal. 1.



harga komoditas kakao semakin meningkat. Harga kakao kering sebelum krisis finansial berkisar Rp2.000-2.500 per kg, sementara pada saat krisis menjadi Rp22.000 per kg.<sup>20</sup> Selain dampak positif, krisis finansial juga berdampak negatif terhadap perkebunan besar yang *capital intensive*. Contohnya diberlakukan suku bunga kredit tinggi, sehingga perkebunan besar sulit melakukan ekspansi karena terkendala modal.<sup>21</sup>

Pada tahun 2006, produksi biji kakao di banyak negara produsen menurun hampir 9 persen akibat perubahan cuaca. Afrika Barat sebagai wilayah utama produksi biji kakao didera angin dingin dan cuaca kering yang dimulai pada akhir tahun 2006 hingga Februari 2007. Bahkan di Ghana, panen kedua sangat mengecewakan karena tanaman tidak kembali pada kondisi yang maksimal akibat tingkat kelembaban tanah dan kekurangan curah hujan, sehingga menyebabkan buah kakao (*pods*) mengecil. Sedangkan di Asia dan Amerika Selatan, El Nino juga melanda dari September tahun 2006 hingga awal tahun 2007. Produksi kakao Indonesia menurun sebesar 3,97 persen pada periode tahun 2006-2007.<sup>22</sup> Di sisi lain ekspor Indonesia tetap meningkat sebesar 31,36 persen dari tahun 2005, di mana hal ini lebih banyak distimulasi oleh kenaikan harga kakao dunia sebesar 19,07 persen.

Pada tahun 2008/2009 saat terjadi krisis global, Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menurunkan daya beli masyarakat Amerika Serikat. Hal ini sangat mempengaruhi ekspor Indonesia karena Amerika Serikat merupakan pangsa pasar kakao yang besar. Penurunan daya beli tersebut pada akhirnya menurunkan permintaan impor dari Indonesia.

Secara umum, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil sampai pertengahan September tahun 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja transaksi berjalan yang masih surplus serta kebijakan makroekonomi yang *prudent*. Namun sejak pertengahan September tahun 2008, krisis global yang semakin dalam telah memberi efek depresiasi terhadap mata uang.<sup>23</sup> Depresiasi nilai tukar tersebut menjadikan komoditas kakao Indonesia memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan kakao dari negara lain. Oleh sebab itu pada tahun 2009, ekspor biji kakao Indonesia meningkat sebesar 3,82 persen dibandingkan tahun 2008.

Namun menjelang tahun 2012 potensi penurunan harga komoditas kembali terbuka mengingat terjadinya krisis finansial di kawasan Uni Eropa

<sup>20</sup> Saharun. *Ibid.*, hal. 2.

<sup>21</sup> Saharun. *Ibid.*, hal. 2.

<sup>22</sup> International Cocoa Organization. 2008<sup>c</sup>. Annual Report 2006/2007. International Cocoa Organization, London, p. 19.

<sup>23</sup> Purna, Hamidi, dan Prima. *Loc. Cit.*



dan dikhawatirkan dampaknya merambat luas sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan faktor fundamental, permintaan global terhadap komoditas kakao pada tahun 2011-2012 diperkirakan tumbuh positif. Di mana volume permintaannya selalu naik setiap tahun dan relatif tidak terpengaruh dengan kondisi perekonomian global. Hal ini karena komoditas tersebut termasuk kebutuhan primer (untuk konsumsi).<sup>24</sup> Selain itu organisasi kakao internasional (*International Cocoa Organization* atau ICCO) meneliti bahwa kakao memiliki elastisitas permintaan yang rendah, peningkatan atau penurunan 10 persen harga kakao akan menurunkan atau meningkatkan konsumsi kakao kurang dari 1 persen.<sup>25</sup> Menurut laporan ICCO bulan Mei tahun 2012, bahwa permintaan kakao tumbuh positif khususnya dipicu dari *emerging markets*. Di wilayah Uni Eropa, industri menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap dampak krisis *Eurozone* terhadap kakao dan konsumsi produk cokelat, bagaimanapun permintaan *cocoa powders* masih tinggi di pasar Asia. Laporan ICCO yang perlu mendapat perhatian penting bahwa pada akhir tahun 2012 perlu mewaspadai El Nino yang berpotensi menurunkan produksi kakao pada musim tahun 2012/2013. *Climate Prediction Center* pada *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) Amerika Serikat melaporkan jika 50 persen El Nino akan berkembang pada paruh kedua tahun 2012. Defisit penawaran kakao pada tahun 2011/2012 dan ditambah dengan prediksi defisit kakao tahun 2012/2013 akan menekan harga kakao dunia.<sup>26</sup>

## PASAR KAKAO INDONESIA

Kakao (*Theobroma cacao* L.) menjadi salah satu andalan komoditas ekspor yang tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya.<sup>27</sup> Pengusahaan kakao<sup>28</sup> di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh perkebunan rakyat, di mana sekitar 965 ribu keluarga tani terlibat langsung dengan usaha

<sup>24</sup> International Cocoa Organization. 2012<sup>d</sup>. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. International Cocoa Organization, London, p. 2.

<sup>25</sup> Meyn and Kennan. *Loc.Cit.*, p. 17.

<sup>26</sup> International Cocoa Organization. 2008<sup>c</sup>. *Op.Cit.*, p. 2.

<sup>27</sup> BisnisUKM.com. Prospek Cerah Bisnis Kakao. <http://bisnisukm.com/prospek-cerah-bisnis-kakao.html>. Diakses 21 Mei 2012.

<sup>28</sup> Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan industri kakao pada tahun 1975, setelah PTP VI berhasil meningkatkan produksi kakao per hektar dengan menggunakan bibit unggul *Upper Amazon Interclonal Hybrid* (hasil persilangan antar klon dan sabah). Tanaman tropis tahunan ini berasal dari Amerika Selatan, di mana penduduk Maya dan Aztec sebagai perintis pengguna kakao dalam makanan dan minuman. Pertengahan abad ke XVI, selain bangsa di Amerika Selatan, hanya bangsa Spanyol yang mengenal tanaman kakao. Kemudian dari Amerika Selatan tanaman ini menyebar ke Amerika Utara, Afrika, dan Asia.



tani kakao.<sup>29</sup> Pengusahaan kakao memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, antara lain (1) kakao Indonesia memiliki kandungan lemak cokelat yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan bubuk kakao dengan mutu baik,<sup>30</sup> (2) produksi kakao fermentasi baru dihasilkan 10 persen dari volume produksi yang ada, padahal harganya jauh lebih tinggi dibanding kakao biasa,<sup>31</sup> dan (3) dimulainya perdagangan kakao di *Jakarta Futures Exchange* (JFX) sehingga harga kakao Indonesia dapat menjadi *reference price* di pasar dunia dan tidak selalu mengacu pada bursa *New York Board of Trade* (Nybot).<sup>32</sup>

Pasar biji kakao utama Indonesia yang berasal dari daerah Sulawesi adalah Amerika Serikat dan pembeli lainnya adalah Malaysia, Uni Eropa, Brazil, Cina, dan Filipina. Industri coklat menggunakan biji kakao Sulawesi sebagai bahan pengisi, berdasarkan kandungan lemak dan biaya yang rendah untuk campuran biji kakao fermentasi lain sehingga menambah *flavor*.<sup>33</sup> Peluang substitusi impor biji kakao masih sulit dilakukan karena kakao yang diimpor digunakan memenuhi tujuan *blending* yang berkaitan dengan keunikan cita rasa, seperti aroma dan kandungan lemak. Sedangkan peluang untuk mensubstitusi kakao olahan cukup terbuka.<sup>34</sup>

Harga kakao di berbagai daerah bervariasi dan sangat dipengaruhi sistem tata niaga, sarana komunikasi, transportasi, dan informasi pasar. Contohnya petani kakao di Sulawesi Selatan menerima harga jual biji kakao relatif tinggi karena sistem tata niaga dan informasi pasar yang sangat terbuka, di mana harga kakao di tingkat petani ditentukan dari harga kakao di Nybot. Oleh sebab itu margin tata niaga kakao menjadi relatif rendah dan petani menerima harga relatif tinggi, yaitu antara 80-90 persen dari harga pasar internasional. Sementara itu, petani kakao daerah lainnya umumnya berperan sebagai *price taker* yang ditentukan oleh pedagang pengumpul. Di Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, petani berperan sebagai *price taker* karena rantai tata niaga yang panjang. Kakao dari petani dikumpulkan oleh pedagang

<sup>29</sup> Teguh Wahyudi dan Misnawi. 2007. Fasilitas Perbaikan Mutu dan Produktivitas Kakao Indonesia. Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 23(1): 34.

<sup>30</sup> BisnisUKM.com. *Loc.Cit.*

<sup>31</sup> Menurut hasil survei di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dalam Wahyudi dan Misnawi tahun 2007 bahwa kadar biji kakao yang tidak terfermentasi di tingkat petani sebesar 53 persen, di tingkat pedagang sebesar 50 persen, dan di tingkat eksportir sebesar 43 persen.

<sup>32</sup> "RI Target Kendalikan Biji Cokelat". <http://www.fajar.co.id/read-20120515004402-ri-target-kendalikan-biji-cokelat>. Diakses 23 Mei 2012.

<sup>33</sup> Bambang Dradjat. 2011. Peluang Peningkatan Nilai Tambah Kakao Domestik melalui Regulasi Perdagangan. Pelita Perkebunan, 27(2): 137.

<sup>34</sup> Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia. Kiat Memperkokoh Agribisnis Kakao Indonesia. *Leaflet*. <http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr243023.pdf>. Diakses 6 September 2012.

pengumpul desa dan dijual ke pedagang pengumpul kecamatan. Selajutnya biji kakao dari pedagang kecamatan dibeli oleh pedagang besar untuk dipasarkan ke eksportir biji kakao di Medan. Kakao di tingkat petani dihargai kurang dari 70 persen harga ekspor di Medan.<sup>35</sup>

Industri pengolahan kakao banyak berada di pulau Jawa.<sup>36</sup> Jumlahnya bertambah setiap tahun, namun tingkat kapasitas industrinya baru setengah dari kapasitas produksinya (Tabel 1).<sup>37</sup> Kapasitas terpasang industri pada tahun 2010 sebesar 345.000 ton, sedangkan realisasi produksi sebesar 180.000 ton atau 52,17 persen. Tingkat kapasitas terpakai ini relatif rendah karena dari 15 perusahaan ternyata hanya 7 perusahaan beroperasi normal. Sisanya tidak beroperasi karena kesulitan modal kerja sehingga sulit memperoleh bahan baku dengan harga yang terjangkau.<sup>38</sup>

**Tabel 1. Profil Industri Kakao Indonesia Tahun 2009**

No.	Uraian	Satuan	Produk Antara	Produk Akhir
1.	Jumlah Perusahaan	-	15	5
2.	Kapasitas	Ton	345.000	248.507
3.	Produksi	Ton	180.000	87.000
4.	Utilisasi	Persen	52,17	35,33
5.	Konsumsi	Ton	98.100	17.768
6.	Ekspor	Ton	81.990	69.232
7.	Impor	Ton	18.290	9.175

Sumber: Kemenperin, 2010 dalam Dradjat.<sup>39</sup>

Pengembangan industri pengolahan kakao terhambat rendahnya pasokan bahan baku biji kakao terfermentasi dari dalam negeri. Di Sulawesi, sebagai sentra produksi biji kakao, biji kakao yang dipasok ke pengolah lokal hanya sekitar 10 persen. Oleh sebab itu kebutuhan produksi kakao olahan dipenuhi dengan impor biji kakao terfermentasi dari Ghana. Penetapan PPN 10 persen bagi kakao yang dijual ke industri pengolahan dan 0 persen untuk ekspor turut menghambat kontinuitas pasokan kakao di dalam negeri.

Pengembangan industri hilir kakao sangat penting karena tingginya nilai tambah dan prospek peningkatan pendapatan negara. Berdasarkan program revitalisasi pertanian, khususnya komoditas kakao, dalam jangka

<sup>35</sup> Bambang Dradjat dan Herman. Keragaan dan Usulan Alternatif Strategi Pengembangan Bisnis Ekspor Kakao Indonesia. *Pelita Perkebunan*, 25(2): 153-154.

<sup>36</sup> Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. 2007. *Gambaran Sekilas Industri Kakao*. Kementerian Perindustrian, Jakarta, hal 19.

<sup>37</sup> Dradjat. *Loc.Cit.*, hal. 138.

<sup>38</sup> Dradjat. *Ibid.*, hal. 138-139.

<sup>39</sup> Dradjat. *Ibid.*, hal. 138.



pendek industri hilir yang dikembangkan adalah tepung kakao, kakao cair, kakao pasta, dan coklat makanan. Sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang, berupa pengembangan industri makanan, produk farmasi, kosmetika, dan kembang gula.<sup>40</sup>

Di Indonesia perdagangan biji kakao banyak dikuasai oleh perusahaan multinasional<sup>41</sup>. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi perdagangan, investasi melalui kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA), dan kebebasan perusahaan multinasional membeli kakao langsung dari petani. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 11/MPP/SK/I/1996 berisi kebebasan perusahaan multinasional membeli biji kakao langsung dari petani. Kebijakan lain yang terkait adalah kebijakan pengendalian ekspor biji kakao melalui instrumen bea keluar dan kebijakan impor biji kakao dengan instrumen pajak impor.<sup>42</sup> Pada akhirnya perusahaan multinasional tersebut dapat diarahkan untuk mengembangkan industri pengolahan kakao di Indonesia, seperti yang dilakukan Mars dengan Effem-nya dan Petra Foods dengan Ceres dan Delfi-nya, di mana komposisi biji kakao impor diperkecil dan penggunaan biji kakao dalam negeri diperbesar melalui industri pengolahan. Berdasarkan nilai konsentrasi pasar 4 perusahaan terbesar (3 perusahaan PMA dan 1 perusahaan nasional) dan Index Herfindahl-Hirschman<sup>43</sup>, bahwa struktur pasar kakao mengarah ke oligopoli dengan persaingan ketat.<sup>44</sup> Hal ini juga dialami negara-negara di Afrika, di mana struktur pasarnya juga cenderung oligopoli dengan persaingan yang tinggi.<sup>45</sup>

## PERDAGANGAN KAKAO DI DUNIA

Perdagangan biji kakao di dunia dapat divisualisasikan seperti Gambar 2. Produsen kakao terbesar di dunia berada di negara-negara berkembang, sedangkan konsumen kakao terbesarnya justru berada di negara-negara maju. Impor kakao di dunia didominasi oleh wilayah Uni Eropa, tahun 2009 *share* impor kakaonya mencapai 58,88 persen, di mana Jerman sebagai negara

<sup>40</sup> Dradjat. *Ibid.*, hal. 138.

<sup>41</sup> Perusahaan Multinasional tidak melanggar hukum persaingan usaha, merujuk pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun perlu diwaspadai karena perusahaan multinasional mempunyai potensi melakukan *price setting* dan mengontrol *supply chain*.

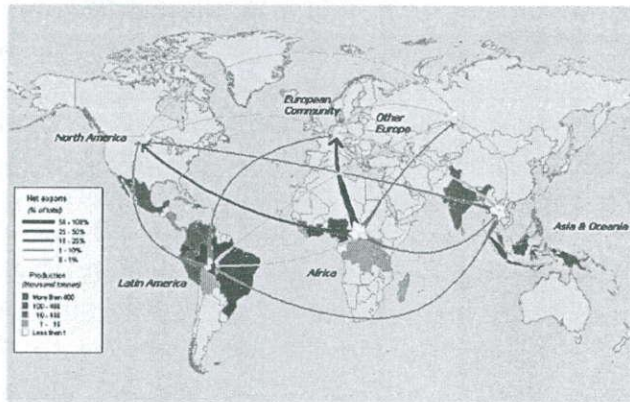
<sup>42</sup> Dradjat. *Loc.Cit.*, hal. 148.

<sup>43</sup> Indeks yang mengukur ukuran perusahaan dalam suatu industri dan sebagai indikator persaingan antara perusahaan dalam suatu industri.

<sup>44</sup> Dradjat. *Loc.Cit.*, hal. 139.

<sup>45</sup> United Nations Conference on Trade and Development. 2008. *Cocoa Study: Industry Structures and Competition*. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, p. 45.

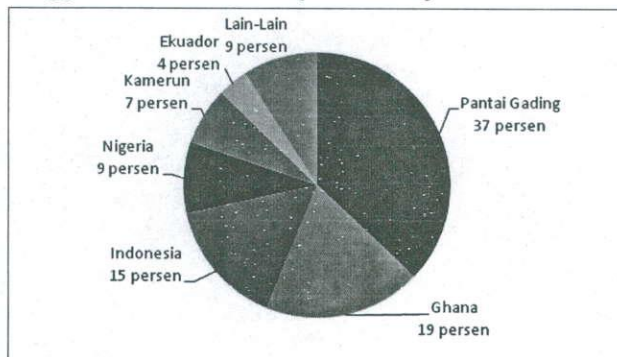
pengimpor terbesarnya. Sedangkan wilayah Amerika memiliki *share* impor hingga 27,25 persen terhadap total impor dunia dan Amerika Serikat sebagai negara pengimpor terbesar.<sup>46</sup>



Sumber: ICCO, 2010.<sup>47</sup>

**Gambar 2. Produksi dan Aliran Ekspor Biji Kakao di Dunia Tahun 2009/2010**

Benua hitam banyak berkontribusi dalam perdagangan kakao di dunia, di mana lebih dari 50 persen ekspor kakao berasal dari Afrika. *Share* ekspor kakao Pantai Gading sebesar 37 persen, Ghana sebesar 19 persen, dan Nigeria sebesar 9 persen. Sedangkan *share* ekspor kakao Indonesia sebesar 15 persen dan masih tertinggi di kawasan Asia (Gambar 3).



Sumber: ICCO, 2010.<sup>48</sup>

**Gambar 3. *Share* Ekspor Kakao di Dunia Tahun 2009**

<sup>46</sup> International Cocoa Organization. 2010<sup>b</sup>. *Loc.Cit.*, p. 38.

<sup>47</sup> International Cocoa Organization. 2010<sup>a</sup>. *Op.Cit.*, p. 19.

<sup>48</sup> International Cocoa Organization. 2010<sup>b</sup>. *Loc.Cit.*, p. 34.



## PERDAGANGAN KAKAO INDONESIA DAN KRISIS FINANSIAL

### A. Determinan Permintaan Ekspor Kakao Indonesia

Pendekatan ekonometrika digunakan untuk menganalisis faktor determinan ekspor kakao Indonesia dan dikonstruksikan berdasarkan teori perdagangan internasional. Ekspor kakao merupakan selisih antara penawaran dengan permintaan kakao di dalam negeri,  $Q_t^X = Q_t^S - Q_t^D$ . Di mana penawaran kakao adalah penjumlahan antara produksi, stok, dan impor,  $Q_t^S = Q_t^P + Q_{t-1}^{St} + Q_t^M$  dan permintaan kakao adalah fungsi dari harga kakao dalam negeri, harga komoditas substitusi, pendapatan, dan jumlah penduduk,  $Q_t^D = f(P_t^D, P_t^S, Y_t, N_t)$ . Pengaruh dari luar negeri dilihat melalui harga luar negeri ( $P_t^X$ ), di mana harga tersebut sama dengan harga domestik setelah dikoreksi dengan biaya angkut dan biaya penanganan antar pelabuhan ( $C_t$ ) dan dinilai dengan satuan mata uang yang sama ( $ER_t$ ). Pada akhirnya persamaan ekspor dipengaruhi oleh harga luar negeri, nilai tukar, biaya, harga komoditas substitusi, pendapatan, kebijakan, teknologi, jumlah penduduk, stok, dan impor,  $Q_t^X = \alpha_0 + \alpha_1 P_t^X + \alpha_9 ER_t^X - \alpha_{10} C_t - \alpha_2 P_t^S + \alpha_3 Y_t + \alpha_4 E_t + \alpha_5 T_t + \alpha_6 N_t + \alpha_7 Q_{t-1}^{St} + \alpha_8 Q_t^M$ . Beberapa peubah eksogenus disesuaikan berdasarkan ketersediaan data tahunan dari tahun 1982-2009. Sumber data sekunder berasal dari Ditjenbun, ICCO, indexmundi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil pendugaan paramater dari persamaan ekspor Indonesia diselesaikan dengan pendekatan metode pendugaan *Ordinary Least Square* (OLS). Persamaan tersebut telah melalui serangkaian uji *goodness and fit* dan telah memenuhi *first order necessary condition*. Persamaan ekspor kakao Indonesia adalah sebagai berikut:

$$EKI_t = -397.255 + 74.54(HKWR_t - HKWR_{t-1}) - 4.49(HKDR_{t-1}) + 8.68(ERIR_{t-1}) + 331.541,20(YPR) \\ t\text{-hitung: } -3,13^A \quad 1,84^B \quad -0,73 \quad 1,12 \quad 2,60^A \\ \text{Elastisitas jangka pendek: } 0,03 \quad -0,03 \quad 0,15 \quad 0,71 \\ \text{Elastisitas jangka panjang: } 0,06 \quad -0,05 \quad 0,32 \quad 1,50 \\ + 293.235,40(YPN) + 514.754,8(YPS_{t-1}) - 120.661(DC) - 4.674,72(DKE) - 123.570(DKI) + 0,53(EKI_{t-1}) + \varepsilon_t \\ 1,97^B \quad 2,86^A \quad -2,10^B \quad -0,09 \quad -2,16^A \quad 3,60^A \\ 0,66 \quad 0,78 \\ 1,40 \quad 1,65$$

$$R^2 = 0,96; F\text{-hitung} = 35,51; DW = 2,23; \text{ dan } VIF < 08,00.$$

Sumber: Diolah dengan SAS 9,0.

Keterangan:

- <sup>A</sup> : Signifikan pada taraf  $\alpha = 5$  persen (1-tailed).
- <sup>B</sup> : Signifikan pada taraf  $\alpha = 10$  persen (1-tailed).
- $EKI_t$  : Ekspor kakao Indonesia tahun t.
- $EKI_{t-1}$  : Ekspor kakao Indonesia tahun t-1.
- $HKWR_t$  : Harga kakao dunia tahun t.
- $HKWR_{t-1}$  : Harga kakao dunia tahun t-1.
- $HKDR_t$  : Harga kakao Indonesia tahun t.
- $ERIR_{t-1}$  : Nilai tukar rupiah/USD tahun t-1.

$YPR_t$	: Produktivitas kakao perkebunan rakyat tahun t.
$YPN_t$	: Produktivitas kakao PTPN tahun t.
$YPR_{t-1}$	: Produktivitas kakao perkebunan swasta tahun t-1.
DC	: <i>Dummy</i> protokol cokelat.
DKE	: <i>Dummy</i> krisis finansial Uni Eropa.
DKI	: <i>Dummy</i> krisis finansial Indonesia.
$\varepsilon_t$	: <i>Error term</i> .

Sebesar 96 persen harga kakao dunia, harga kakao Indonesia, nilai tukar rupiah, produktivitas kakao, *dummy* protokol cokelat, *dummy* krisis finansial Indonesia, dan *lag* ekspor kakao Indonesia dapat menjelaskan keragaan ekspor kakao Indonesia dan sebesar 14 persen ditentukan oleh faktor lainnya. Berdasarkan olah data maka harga kakao dunia, produktivitas kakao Indonesia (produktivitas kakao rakyat, produktivitas kakao PT. Perkebunan Negara (PTPN), *lag* produktivitas kakao swasta), *dummy* protokol cokelat, *dummy* krisis finansial Indonesia, dan *lag* ekspor kakao Indonesia yang secara signifikan mempengaruhi ekspor kakao Indonesia.

Harga kakao dunia menjadi sinyal positif bagi eksportir kakao untuk melakukan ekspor. Ketika harga kakao dunia naik sebesar 1 persen, maka ekspor kakao Indonesia akan naik sebesar 0,03 persen dalam jangka pendek dan sebesar 0,06 persen dalam jangka panjang, ceteris paribus. Ekspor kakao Indonesia tidak responsif terhadap perubahan harga kakao dunia, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Harga kakao Indonesia di pasaran dunia, terutama hasil dari perkebunan rakyat, ternyata dihargai paling rendah. Hal ini karena biji kakao didominasi (1) kandungan biji-biji tanpa fermentasi dan (2) kandungan non kakao, seperti kadar kotoran yang tinggi, terkontaminasi serangga, jamur, dan mikotoksin, serta cita rasa yang lemah.<sup>49</sup>

Di sisi lain produktivitas kakao rakyat, PTPN, dan swasta juga mampu meningkatkan ekspor kakao Indonesia. Produksi kakao rakyat lebih banyak dibandingkan dari perkebunan PTPN dan swasta. Ketika produktivitas kakao rakyat meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkat ekspor kakao Indonesia sebesar 0,71 persen dalam jangka pendek dan sebesar 1,50 persen dalam jangka panjang, ceteris paribus. Ekspor kakao Indonesia responsif terhadap perubahan produktivitas kakao rakyat dalam jangka panjang. Menurut *World Cocoa Foundation*<sup>50</sup>, lebih dari 90 persen produksi kakao dunia memang berasal dari perkebunan kakao rakyat. Selain produktivitas kakao rakyat, ternyata ekspor kakao Indonesia juga responsif terhadap perubahan produktivitas kakao PTPN dan swasta dalam jangka panjang. Hal

<sup>49</sup> Wahyudi dan Misnawi. *Loc.Cit.*, hal. 33.

<sup>50</sup> World Cocoa Foundation. *Loc.Cit.*, p. 1.



ini sesuai dengan hasil penelitian Dradjat dan Herman<sup>51</sup> di mana produksi kakao paling menentukan pertumbuhan ekspor kakao Indonesia. Lebih lanjut menurut Direktur Perkebunan Tanaman Rempah dan Penyegar Kementerian Pertanian, Azwar AB, dan Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, bahwa rendahnya tingkat produktivitas kakao nasional dalam beberapa waktu terakhir disebabkan faktor cuaca ekstrem dan kualitas tanaman kakao.<sup>52</sup>

Salah satu kebijakan Pemerintah terhadap perkembangan kakao adalah melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas kakao), di mana telah dilakukan peremajaan kebun seluas 20.000 hektar di 9 provinsi. Gernas kakao ditujukan untuk memperbaiki pertanaman kakao rakyat melalui intensifikasi, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman serta meningkatkan kemampuan petani mengelola kebunnya. Sebagai kompensasi, petani peserta diberikan bantuan benih tanaman sela (semusim) untuk ditanam di areal kakao yang diremajakan. Tahun 2010 kegiatan peremajaan kebun seluas 15.150 hektar dilaksanakan di 12 provinsi pada 50 kabupaten, pada tahun 2011 dilaksanakan di 24 provinsi pada 92 kabupaten seluas 49.500 hektar, dan pada tahun 2012 di 5 provinsi dan 19 kabupaten seluas 4.900 hektar.<sup>53</sup> Perpanjangan program ini hingga tahun 2012 menjadikan adanya optimisasi target tahun 2013-2014 di mana produksi kakao Indonesia diharapkan mampu mencapai 1 juta ton per tahun.<sup>54</sup>

Dirjen Perkebunan, Gamal Natsir, mengakui produksi kakao tidak naik secara signifikan walaupun Gernas sudah berjalan tahun 2009-2011. Menurut Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang, selama rentang waktu pelaksanaan program Gernas kakao, tidak mampu meningkatkan produksi kakao. Penurunan produksi itu disebabkan (1) ketidaksesuaian antara program Gernas Kakao dengan kebutuhan di lapangan, khususnya kontinuitas pengadaan bibit unggul *Somatic Embryogenesis* (SE) dan pupuk formula khusus, penggantian tanaman tua, dan serangan hama penyakit dan (2) saat kondisi hujan sepanjang tahun 2011 dan perawatan kurang memadai sehingga tanaman rentan terserang hama dan penyakit.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Bambang Dradjat dan Herman menganalisisnya dengan *Consistency Ratio* pada "Keragaan dan Usulan Alternatif Strategi Pengembangan Bisnis Ekspor Kakao Indonesia". Pelita Perkebunan, 25(2): 154.

<sup>52</sup> Koran Jakarta. 2012. Cuaca Ekstrem Pengaruhi Produktivitas Kakao. Edisi Digital. <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/90541>. Diakses 6 september 2012.

<sup>53</sup> Lebih lanjut dapat dilihat pada Pedoman Teknis Daerah Gernas Kakao Tahun 2012.

<sup>54</sup> Rista Rama Dhany. 2012. Dituding Gagal, Program Gernas Kakao Tetap Lanjut di 2012. <http://finance.detik.com/read/2012/01/09/115054/1810193/4/dituding-gagal-program-gernas-kakao-tetap-lanjut-di-2012>. Diakses 23 Mei 2012.

<sup>55</sup> Sepudin Zuhri. 2012. GERNAS KAKAO: Askindo Minta Program Dibenahi. <http://www.bisnis.com/articles/gernas-kakao-askindo-minta-program-dibenahi>. Diakses 23 Mei 2012.



*Dummy* protokol cokelat atau Harkin-Engel *Protocol*<sup>56</sup> berpengaruh nyata terhadap ekspor kakao Indonesia. Ketika protokol cokelat diberlakukan semenjak tahun 2001, maka ekspor kakao Indonesia cenderung menurun sebesar 120.661 ton. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki potensi masalah yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja anak-anak di sektor perkebunan. Selain itu adanya sertifikasi perusahaan kakao yang bebas perbudakan juga akan mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Preferensi konsumen untuk mengkonsumsi produk berbahan dasar kakao tanpa merusak kehidupan anak-anak, akan membuat protokol ini semakin diikuti oleh banyak perusahaan cokelat di dunia.

*Lag* ekspor kakao Indonesia berpengaruh nyata terhadap ekspor kakao tahun sekarang. Hal ini menunjukkan jika terdapat tenggang waktu yang relatif lambat bagi ekspor kakao Indonesia dalam menyesuaikan kembali pada tingkat keseimbangannya dalam merespon perubahan situasi perekonomian.

*Dummy* krisis finansial di Indonesia tahun 1997/1999 berpengaruh nyata terhadap ekspor kakao Indonesia. Di mana ketika terjadi krisis finansial di Indonesia, maka ekspor kakao Indonesia justru menurun sebesar 123.570 ton. Hal ini menunjukkan jika daya saing kakao Indonesia tidak banyak didukung oleh depresiasi nilai tukar rupiah melainkan faktor mutu kakao.

Sedangkan krisis finansial di Uni Eropa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ekspor kakao Indonesia. Menurut Meyn and Kennan, bahwa negara-negara pengekspor komoditas utama dari Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Thailand, relatif lebih sedikit terdampak dari krisis finansial karena memiliki diversifikasi komoditas yang lebih tinggi. Apalagi Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan institusi yang efektif.<sup>57</sup>

Indonesia merupakan negara *small open economy* sehingga kondisi perekonomian global mempengaruhi perekonomian dan perkembangan kakao dalam negeri. Dampak dari krisis finansial global adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008, menurunnya kinerja neraca pembayaran, depresiasi nilai tukar rupiah, dan dorongan pada laju inflasi.<sup>58</sup> Oleh

<sup>56</sup> Hasil dari respon industri cokelat terhadap eksploitasi penggunaan tenaga kerja anak-anak sesuai dengan Konvensi ILO 138, khususnya di negara-negara Afrika. Regulasi Amerika Serikat akhirnya melarang impor produk yang memperkerjakan anak-anak sebagai tenaga kerja dengan sebuah sistem berupa mandat untuk melaporkan, mengawasi, dan mensertifikasi. Lebih lanjut pernyataan protokol ini dapat dilihat dalam *Statement on Industry Protocol Regarding the Use of Child Labor in West African Cocoa Farm*, May 1, 2002.

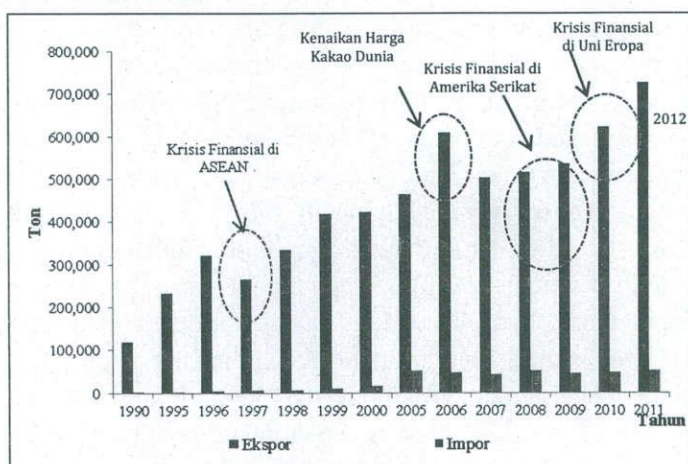
<sup>57</sup> Meyn and Kennan. *Loc.Cit.*, p. vii.

<sup>58</sup> Ibum Purna, Hamidi, dan Prima. 2009. Perekonomian Indonesia Tahun 2008 Tengah Krisis Keuangan Global. [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3698&Itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3698&Itemid=29). Diakses 28 Juni 2012.



sebab itu di beberapa titik perkembangan perdagangan kakao terjadi fluktuasi sebagai akibat dari turbulensi tersebut.

Gambar 4 menunjukkan bahwa ekspor kakao Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun 2010, kakao Indonesia masih didominasi ekspor dalam bentuk biji kakao. Namun demikian, ekspor biji kakao Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada semester pertama tahun 2012. Menurut Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) ekspor kakao hanya mencapai 66.120 ton pada semester pertama tahun 2012, atau turun sebesar 44,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 118.447 ton. Lemahnya produksi biji kakao di dalam negeri menyebabkan penurunan kegiatan eksportasi. Sedangkan menurut Sekretaris Eksekutif Askindo, Firman Bakri Anom, merosotnya produksi kakao tersebut dikarenakan anomali cuaca.<sup>59</sup>



Keterangan: Data tahun 2010 dan 2011 adalah data ramalan.

Sumber: Ditjenbun, 2011.<sup>60</sup>

**Gambar 4. Perkembangan Ekspor dan Impor Kakao Indonesia Tahun 1990-2011**

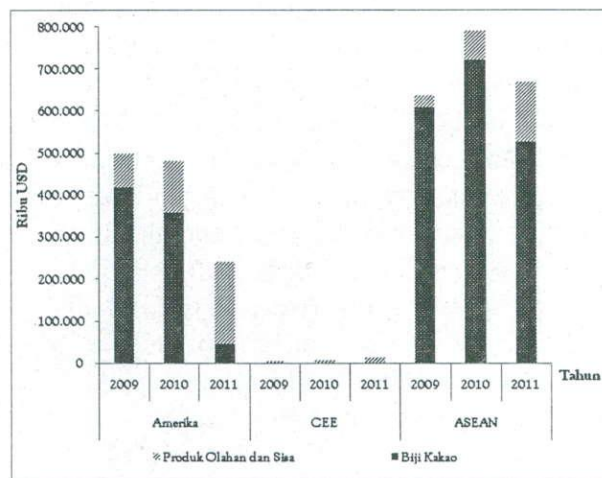
Saat ini ekspor kakao Indonesia paling besar adalah ke Malaysia dan Singapura sehingga menurut Sekretaris Eksekutif Askindo, Firman Bakri Anom, dampak krisis global tidak begitu dirasakan dampaknya. Namun demikian krisis produksi kakao di dalam negeri tidak hanya berimbas pada pelemahan ekspor tetapi juga dikhawatirkan tak mampu memberikan suplai yang cukup bagi industri hilir kakao.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Kementerian BUMN. 2012. Lokal Naik, Ekspor Kakao Anjlok. <http://www.bumn.go.id/ptpn12/publikasi/berita/lokal-naik-ekspor-kakao-anjlok/>. Diakses 6 September 2012.

<sup>60</sup> Data diperoleh dari website resmi ditjenbun di <http://ditjenbun.deptan.go.id/>.

<sup>61</sup> Kementerian BUMN. *Loc.Cit.*

Sejak diterapkannya kebijakan bea keluar kakao, biji kakao lebih diprioritaskan untuk diolah di dalam negeri. Pertumbuhan produksi kakao olahan dalam dua tahun terakhir dikarenakan terjadi pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.<sup>62</sup> Namun demikian menurut ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulawesi Selatan, Yusa Rasyid Ali, penetapan bea keluar kakao disertai pajak yang cukup tinggi menyebabkan pengeksportor kalah bersaing dengan pengusaha bermodal besar. Saat ini tersisa delapan perusahaan yang aktif melakukan ekspor komoditas kakao, padahal sebelumnya ada 80 pengeksportor kakao di Sulawesi Selatan.<sup>63</sup>



Sumber: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics dalam <http://www.trademap.org>.

**Gambar 5. Perdagangan Kakao Bilateral Indonesia dengan Wilayah Amerika, Uni Eropa, dan ASEAN Tahun 2009-2011**

## B. Perdagangan Kakao Indonesia ke Wilayah ASEAN, Uni Eropa, dan Amerika

Secara garis besar perdagangan kakao Indonesia (khususnya HS 1801-1806) mengalir ke kawasan Uni Eropa, kawasan Asia, dan kawasan Amerika. Pada Gambar 5 ditunjukkan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan wilayah Amerika, Uni Eropa (*Central and Eastern Europe*), dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Struktur perdagangan kakao di ketiga wilayah tersebut didominasi oleh komoditas kakao dalam bentuk biji (HS 1801) dibandingkan produk olahan dan hasil sampingan (HS 1802-HS 1806).

<sup>62</sup> Kementerian BUMN. *Loc.Cit.*

<sup>63</sup> Aci dan Upi. 2012. Bea Progresif Tekan Ekspor Kakao. <http://www.fajar.co.id/read-20120627235348-bea-progresif-tekan-ekspor-kakao>. Diakses 27 Juni 2012.



## 1. Perdagangan Kakao Indonesia ke Wilayah ASEAN

Ekonomi di wilayah ASEAN *relatif tahan* terhadap dampak krisis finansial Uni Eropa, sehingga pembuat kebijakan masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan.<sup>64</sup> Namun demikian para pemimpin ASEAN tidak boleh menganggap remeh dampak krisis tersebut karena pada saat yang bersamaan perekonomian Cina juga sedang mengalami penyesuaian. Sedangkan perkembangan yang terjadi di wilayah Uni Eropa, khususnya Yunani, secara langsung akan mempengaruhi perekonomian di Asia, terutama negara-negara Asia Timur, di mana model pertumbuhan ekonominya didorong oleh ekspor yang banyak dibiayai oleh bank-bank Uni Eropa.<sup>65</sup>

Ekspor kakao Indonesia pada jalur tidak langsung memungkinkan transmisi dampak krisis finansial Uni Eropa tersebut, melalui negara Cina, berdampak pada kinerja ekspor kakao Indonesia. Ekspor kakao Indonesia ke wilayah ASEAN relatif besar dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada Tabel 2 terlihat perdagangan kakao (khususnya HS 1801-1806) Indonesia ke wilayah ASEAN di mana struktur perdagangan kakao ke wilayah ASEAN didominasi oleh komoditas kakao dalam bentuk biji (HS 1801) dibandingkan produk olahan dan hasil sampingan (HS 1802-HS 1806).

Penurunan ekspor kakao dalam bentuk biji pada tahun 2011 salah satunya disebabkan oleh dampak pemberlakuan tarif ekspor. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Sindrawijaya, menilai bahwa PMK Nomor 67/PMK.011/2010 sangat positif dan efektif dalam menumbuhkembangkan industri kakao nasional. Setelah diterapkannya bea keluar pada 1 April 2010, biji kakao yang semula 70-80 persen diekspor dalam bentuk mentah maka pada tahun 2011 itu sudah mulai berubah di mana 54 persen biji kakao sudah diolah di dalam negeri dan sisanya diekspor.<sup>66</sup>

**Tabel 2. Perdagangan Kakao Bilateral Indonesia dengan Wilayah ASEAN  
Tahun 2009-2011**

(Ribu USD)				
HS-4	Label Produk	2009	2010	2011
1801	<i>Cocoa beans, whole or broken, raw, or roasted</i>	608.668	720.878	526.734
1802	<i>Cocoa shells, husks, skins, and other cocoa waste</i>	406	524	345
1803	<i>Cocoa paste, whether, or not defatted</i>	3.771	12.352	49.676

<sup>64</sup> "Sri Mulyani: Ekonomi ASEAN Kebal terhadap Krisis Eropa". <http://financeroll.co.id/news/36968/sri-mulyani-ekonomi-asean-kebal-terhadap-krisis-eropa>. Diakses 6 September 2012.

<sup>65</sup> "Krisis Eropa: Ini Dia Kata Sri Mulyani Soal Dampaknya ke Indonesia". <http://www.bisnis.com/articles/krisis-eropa-ini-dia-kata-sri-mulyani-soal-dampaknya-ke-indonesia>. Diakses 6 september 2012.

<sup>66</sup> Koran Jakarta. 2012. *Loc.Cit*.

1804	<i>Cocoa butter, fat, and oil</i>	493	3426	13.096
1805	<i>Cocoa powder, without added sugar</i>	10.158	28.886	55.794
1806	<i>Chocolate and other food preparations containing cocoa</i>	14.275	25.855	24.182

Sumber: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics dalam <http://www.trademap.org>.

## 2. Perdagangan Kakao Indonesia ke Wilayah Uni Eropa

Kemungkinan besar Indonesia tidak akan terlalu terpengaruh dari krisis finansial Uni Eropa tersebut lewat jalur ekspor langsung karena tidak satu negara anggota Uni Eropa yang secara individu merupakan mitra utama perdagangan Indonesia seperti halnya Indonesia dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Walaupun secara keseluruhan total nilai ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa lebih besar daripada total nilai eksportnya ke Amerika Serikat. Pada tahun 2009 pasar Uni Eropa hanya menyumbang sekitar 12,2 persen terhadap total nilai ekspor non-migas Indonesia dan periode Januari-Juli 2011 berkontribusi sekitar 13,3 persen.<sup>67</sup>

Perdagangan kakao Indonesia ke wilayah Uni Eropa banyak berupa produk olahan kakao, seperti *cocoa powder, fat, and oil* dan *cocoa powder without sugar* (Tabel 3). Sedangkan wilayah Uni Eropa banyak mendatangkan biji kakao dari Pantai Gading dan Ghana. Pesaing eksportir kakao Indonesia ke wilayah Uni Eropa adalah Pantai Gading dengan pangsa pasar 71,68 persen, Ghana dengan pangsa pasar lebih dari 19 persen, Nigeria pangsa pasar lebih dari 9 persen, dan Kamerun pangsa pasarnya mencapai 5 persen lebih. *Entry barrier* masuk pasar wilayah Uni Eropa, Indonesia harus membayar tarif ekspor sebesar 2,8 persen untuk *cocoa powder*, sebesar 4,2 untuk *cocoa butter, fat or oil*, dan sebesar 6,1 persen untuk *cocoa paste*, sedangkan biji kakao masih diberikan kebebasan terhadap tarif ekspor.<sup>68</sup>

**Tabel 3. Perdagangan Kakao Bilateral Indonesia dengan Wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur Tahun 2008-2011**

(Ribu USD)					
HS-4	Label Produk	2008	2009	2010	2011
1801	<i>Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted</i>	0	0	120	67
1802	<i>Cocoa shells, husks, skins, and other cocoa waste</i>	0	0	11	16

<sup>67</sup> Kuncoro, 2011 dalam Tulus Tambunan. 2011. Apakah Krisis Utang Zona Euro akan Berdampak pada Perekonomian Indonesia? Policy Discussion Paper Series. Center for Industry, SME & Business Competition Studies. Trisakti University, Jakarta. hal. 11-12.

<sup>68</sup> Mareike Meyn and Jane Kennan. 2009. The Implications of the Global Financial Crisis for Developing Countries' Export Volumes and Values. Working Paper 305. Overseas Development Institute, London, p. 16.



1803	<i>Cocoa paste, whether or not defatted</i>	0	0	0	0
1804	<i>Cocoa butter, fat, and oil</i>	3.837	600	527	5.810
1805	<i>Cocoa powder, without added sugar</i>	3.692	3.496	5.809	8.485
1806	<i>Chocolate and other food preparations containing cocoa</i>	0	0	0	113

Sumber: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics dalam <http://www.trademap.org>.

Di sisi lain melimpahnya buah kakao di Indonesia dengan kandungan lemak coklat, tidak menjamin tingginya kualitas produk yang dihasilkan. Turunnya kualitas kakao saat ini, disebabkan pengolahan yang masih kurang maksimal. Kebanyakan masyarakat menggunakan sarana pengolahan yang masih minimal dan belum menerapkan teknologi yang menghasilkan produk yang bermutu. Biji kakao yang bermutu diperhatikan para konsumen dari bentuk fisiknya, cita rasanya, kebersihan produknya, keseragaman produk, serta konsistensi kualitas produk dari proses pengolahan yang tepat. Proses pengolahan buah kakao menjadi kunci utama kualitas produk hasil kakao, karena dalam proses tersebut terjadi pembentukan fisik, cita rasa, serta faktor lain yang menjadi standar produk kakao berkualitas.<sup>69</sup>

Untuk ekspor kakao di Uni Eropa perlu memperhatikan mutu biji kakao, khususnya mutu cita rasa, yang memerlukan syarat proses fermentasi yang benar. Jerman sebagai salah satu negara pengimpor kakao secara tegas mensyaratkan biji kakao harus difermentasi sebagai syarat dasar agar biji kakao memenuhi standar yang diinginkan, standar lingkungan, dan biji kakao harus difermentasi sebelum diekspor. Pemasaran kakao Indonesia secara internasional menghadapi kendala rendahnya mutu akibat biji kakao yang tidak difermentasi dengan benar.<sup>70</sup>

### 3. Perdagangan Kakao Indonesia ke Wilayah Amerika

Krisis finansial Uni Eropa yang belum berakhir dapat mengganggu kinerja ekspor beberapa komoditas ekspor utama Indonesia, termasuk kakao ke kawasan Amerika. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Deddy Saleh, mengatakan sebagai negara berkembang Indonesia masih bergantung pada kegiatan ekspor. Dengan melihat lesunya perekonomian Uni Eropa, maka kini kebijakan ekspor lebih diarahkan untuk mendorong diversifikasi pasar yang potensial. Krisis finansial Uni Eropa meskipun tidak berdampak langsung namun

<sup>69</sup> BisnisUKM.com. *Loc. Cit.*

<sup>70</sup> F. Hero. K. Purba. 2010. Upaya Ekspansi Pasar Kakao Indonesia Ke Eropa. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta. [http://pphp.deptan.go.id/disp\\_informasi/1/5/0/507/upaya\\_ekspansi\\_pasar\\_kakao\\_indonesia\\_ke\\_eropa.html](http://pphp.deptan.go.id/disp_informasi/1/5/0/507/upaya_ekspansi_pasar_kakao_indonesia_ke_eropa.html). Diakses 27 Juni 2012.

Indonesia dapat terkena dampak tidak langsungnya, sebab krisis finansial uni Eropa mempengaruhi penurunan ekspor negara Cina dan India yang selama ini sebagai tujuan ekspor dari Indonesia. Untuk itu, kini harus dicari negara potensial ekspor baru, seperti Amerika Latin dan Afrika, yang trennya mulai menunjukkan peningkatan.<sup>71</sup>

Perdagangan kakao Indonesia ke wilayah Amerika sedikit berbeda dengan wilayah Uni Eropa. Komposisi ekspor biji kakao relatif masih besar daripada ke wilayah Uni Eropa namun lebih sedikit dibandingkan ekspor biji kakao ke wilayah Asia, yaitu sebesar 18,88 persen dan sisanya berupa produk olahan kakao (Tabel 4). Pesaing eksportir kakao Indonesia ke wilayah Amerika, antara lain Pantai Gading dengan pangsa pasar 15,45 persen, Kanada pangsa pasar 13,93 persen, Meksiko dengan pangsa pasar lebih dari 8 persen, dan Uganda pangsa pasarnya mencapai 0,02 persen lebih.

**Tabel 4. Perdagangan Kakao Bilateral Indonesia dengan Wilayah Amerika Tahun 2008-2011**

(Ribu USD)

HS-4	Label Produk	2008	2009	2010	2011
1801	<i>Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted</i>	223.533	418.187	357.680	45.583
1802	<i>Cocoa shells, husks, skins, and other cocoa waste</i>	0	0	18	43
1803	<i>Cocoa paste, whether or not defatted</i>	4351	2.098	6.236	48.660
1804	<i>Cocoa butter, fat, and oil</i>	136.578	72.076	104.480	125.981
1805	<i>Cocoa powder, without added sugar</i>	4.857	5.893	13.363	20.064
1806	<i>Chocolate and other food preparations containing cocoa</i>	253	313	667	1.130

Sumber: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics dalam <http://www.trademap.org>.

Di sisi lain, kualitas ekspor biji kakao oleh petani relatif tidak meningkat. Beberapa indikator mutu ditunjukkan dengan:<sup>72</sup> (1) kadar air naik 4-5 persen, (2) jumlah biji per 100 gram cenderung di atas 110, (3) kadar kotoran cenderung di atas 3 persen, dan (4) terdapat biji berjamur terutama pada musim hujan. Contoh kasus di Amerika Serikat, pada tahun 1990an biji kakao Indonesia dikenakan *automatic detention* karena adanya kontaminasi dengan serangga. Biji kakao yang masuk ke wilayah Amerika dikenakan biaya

<sup>71</sup> "Ekspor Eropa Lesu, RI Garap Pasar Amerika-Afrika". <http://jakarta.okezone.com/read/2012/06/29/450/656257/ekspor-eropa-lesu-ri-garap-pasar-amerika-afrika>. Diakses 6 September 2012.

<sup>72</sup> Dradjat. *Loc.Cit.*, hal. 141.



*refumigasi* dan pembersihan ulang. Potongan harga akibat mutu biji kakao yang rendah mencapai 10-25 persen dari harga rata-rata kakao dunia dan lebih rendah 40 persen dibandingkan harga kakao bermutu baik asal Ghana. Nilai pemotongan harga ini mencapai USD50-100 juta per tahun. Bahkan pada tahun 2005<sup>73</sup> pemotongan tersebut sebesar USD250 per ton. Nilai potongan harga ini mungkin akan meningkat apabila dunia dalam kondisi *over supply* yang menyebabkan negara pengimpor lebih selektif terhadap biji kakao bermutu baik.<sup>74</sup> Citra buruk kakao Indonesia menyebabkan ekspor kakao ke Cina dan beberapa negara lain, termasuk Amerika, harus melalui Malaysia dan Singapura terlebih dahulu. Keadaan ini perlahan-lahan telah diperbaiki dengan membentuk Komisi Kakao Indonesia (Komkaindo) dengan mengintensifkan kebijakan *on farm* dan *off farm* kakao.<sup>75</sup>

Oleh sebab itu salah satu cara meningkatkan produksi dan mutu kakao adalah mengefektifkan penerapan teknologi produksi kakao yang tepat di tingkat petani. Contoh kasus di Sulawesi Tengah, perbedaan penerapan teknologi berhubungan dengan faktor internal maupun eksternal, termasuk motivasi petani dalam penerapan teknologi kakao. Faktor internal yang penting diperhatikan guna meningkatkan motivasi petani dalam menerapkan teknologi produksi kakao adalah luas lahan garapan dan akses informasi, sedangkan faktor eksternalnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta sifat inovasi yang berkaitan dengan kompleksitas teknologi.<sup>76</sup>

## PENUTUP

Krisis finansial Uni Eropa tidak berpengaruh terhadap ekspor kakao Indonesia melalui jalur perdagangan secara langsung berdasarkan analisis data yang dilakukan. Namun demikian dampaknya melalui jalur perdagangan secara tidak langsung harus dapat diantisipasi oleh pembuat kebijakan di masa mendatang. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi permintaan ekspor kakao adalah tingkat produktivitas kakao di dalam negeri, baik pada perkebunan kakao rakyat, PTPN, maupun perkebunan kakao swasta. Peningkatan produktivitas tersebut dapat dilakukan dengan (1) penggunaan bibit unggul, teknik budidaya yang tepat, dan dukungan infrastruktur yang memadai dan (2) pengembangan industri kakao yang *capital intensive* melalui kerja sama dengan perusahaan *multinational companies* sehingga memberikan *value added* yang lebih tinggi.

<sup>73</sup> Wahyudi dan Misnawi. *Loc.Cit.*, hal. 33.

<sup>74</sup> Purba. *Loc.Cit.*

<sup>75</sup> Wahyudi dan Misnawi. *Loc.Cit.*, hal. 34.

<sup>76</sup> Amiruddin Saleh. 2010. Motivasi Petani dalam Menerapkan Teknologi Produksi Kakao: Kecamatan Sirenja, Sulawesi Tengah. *Pelita Perkebunan*, 26(1): 55-56.

Terjadinya krisis finansial Uni Eropa dapat menjadi peluang peningkatan ekspor biji kakao melalui diversifikasi pasar tujuan ekspor dan produk turunan kakao. *Share* ekspor kakao olahan Indonesia yang relatif kecil ke wilayah Uni Eropa dapat ditingkatkan melalui negosiasi perdagangan untuk mendapatkan *previllage* perdagangan, seperti komoditas kakao dari negara-negara Afrika yang diekspor ke wilayah Uni Eropa. Sedangkan peningkatan mutu biji kakao yang diekspor ke wilayah Amerika dilakukan dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan kepada petani kakao secara intensif, khususnya terkait dengan teknik budidaya kakao yang baik, *material handling*, dan industri pengolahan. Di sisi lain Pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana peningkatan mutu kakao tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- International Cocoa Organization. 2010<sup>a</sup>. The World Cocoa Economy: Past and Present. One Hundred and Forty-Second Meeting 14-17 September. International Cocoa Organization, London.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. 2007. Gambaran Sekilas Industri Kakao. Kementerian Perindustrian, Jakarta.
- United Nations Conference on Trade and Development. 2008. Cocoa Study: Industry Structures and Competition. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva.

### Jurnal

- Dradjat, B. 2011. Peluang Peningkatan Nilai Tambah Kakao Domestik melalui Regulasi Perdagangan. *Pelita Perkebunan*, 27(2): 130-149.
- \_\_\_\_\_ dan Herman. Keragaan dan Usulan Alternatif Strategi Pengembangan Bisnis Ekspor Kakao Indonesia. *Pelita Perkebunan*, 25(2): 141-160.
- Saleh, A. 2010. Motivasi Petani dalam Menerapkan Teknologi Produksi Kakao: Kecamatan Sirenja, Sulawesi Tengah. *Pelita Perkebunan*, 26(1): 42-56.
- Wahyudi, T. dan Misnawi. 2007. Fasilitas Perbaikan Mutu dan Produktivitas Kakao Indonesia. *Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia*, 23(1): 32-43.



### **Working Paper**

Meyn, M. and J. Kennan. 2009. The Implications of the Global Financial Crisis for Developing Countries' Export Volumes and Values. *Working Paper* 305. Overseas Development Institute, London.

### **Makalah**

Purba, F.H.K. 2010. Upaya Ekspansi Pasar Kakao Indonesia Ke Eropa. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta. [http://pphp.deptan.go.id/dispinformasi/1/5/0/507/upaya\\_ekspansi\\_pasar\\_kakao\\_indonesia\\_ke\\_eropa.html](http://pphp.deptan.go.id/dispinformasi/1/5/0/507/upaya_ekspansi_pasar_kakao_indonesia_ke_eropa.html). Diakses 27 Juni 2012.

Tambunan, T. 2011. Apakah Krisis Utang Zona Euro akan Berdampak pada Perekonomian Indonesia? Policy Discussion Paper Series. Center for Industry, SME & Business Competition Studies. Trisakti University, Jakarta. hal. 12.

World Cocoa Foundation. 2010. Cocoa Market Update. World Cocoa Foundation, Washington DC.

### **Laporan**

International Cocoa Organization. 2008<sup>c</sup>. Annual Report 2006/2007. International Cocoa Organization, London.

International Cocoa Organization. 2010<sup>b</sup>. Annual Report 2009/2010. International Cocoa Organization, London.

International Cocoa Organization. 2012<sup>d</sup>. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. International Cocoa Organization, London.

### **Tesis:**

Saharun, L. 2001. Analisis Respon Areal dan Produksi Kakao pada Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar di Propinsi Irian Jaya. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

### **Website:**

Antara. 2012. Ekonomi Eropa Pengaruhi Kakao Aceh. <http://antara-aceh.com/ekonomi-eropa-pengaruhi-kakao-aceh.html>. Diakses 30 Agustus 2012.

- Aci dan Upi. 2012. Bea Progresif Tekan Ekspor Kakao. <http://www.fajar.co.id/read-20120627235348-bea-progresif-tekan-ekspor-kakao>. Diakses 27 Juni 2012.
- BisnisUKM.com. Prospek Cerah Bisnis Kakao. <http://bisnisukm.com/prospek-cerah-bisnis-kakao.html>. Diakses 21 Mei 2012.
- Dhany, R. R. 2012. Dituding Gagal, Program Gernas Kakao Tetap Lanjut di 2012. <http://finance.detik.com/read/2012/01/09/115054/1810193/4/dituding-gagal-program-gernas-kakao-tetap-lanjut-di-2012>. Diakses 23 Mei 2012.
- "Ekspor Eropa Lesu, RI Garap Pasar Amerika-Afrika". <http://jakarta.okezone.com/read/2012/06/29/450/656257/ekspor-eropa-lesu-ri-garap-pasar-amerika-afrika>. Diakses 6 September 2012.
- Hadi, S. dan L. Hari W. 2011. Indonesia Berpeluang Kuasai Pasar Kakao. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/28/19351828/Indonesia.Berpeluang.Kuasai.Pasar.Kakao>. Diakses 27 Juni 2012.
- Kandi, R. D. 2012. Nilai Ekspor Kakao Diproyeksikan Mencapai USD 2 Miliar. <http://www.indonesiainancetoday.com/read/20480/Nilai-Ekspor-Kakao-Diproyeksikan-Mencapai-US-2-Miliar>. Diakses 6 September 2012.
- Kementerian BUMN. 2012. Lokal Naik, Ekspor Kakao Anjlok. <http://www.bumn.go.id/ptpn12/publikasi/berita/lokal-naik-ekspor-kakao-anjlok/>. Diakses 6 September 2012.
- Koran Jakarta. 2012. Cuaca Ekstrem Pengaruhi Produktivitas Kakao. Edisi Digital. <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/90541>. Diakses 6 September 2012.
- "Krisis Eropa: Ini Dia Kata Sri Mulyani Soal Dampaknya ke Indonesia". <http://www.bisnis.com/articles/krisis-eropa-ini-dia-kata-sri-mulyani-soal-dampaknya-ke-indonesia>. Diakses 6 September 2012.
- Purna, I., Hamidi, dan Prima. 2009. Perekonomian Indonesia Tahun 2008 Tengah Krisis Keuangan Global. [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3698&Itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3698&Itemid=29). Diakses 28 Juni 2012.
- Prihtiyani, E. 2012. Harga Kakao di Bursa Berjangka Menguat. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/28/16251618/Harga.Kakao.di.Bursa.Berjangka.Menguat>. Diakses 30 Agustus 2012.



"RI Target Kendalikan Biji Cokelat". <http://www.fajar.co.id/read-20120515004402-ri-target-kendalikan-biji-cokelat>. Diakses 23 Mei 2012.

Suhendra. 2012. Hatta: Krisis Eropa Jadi Ancaman Sekaligus Peluang untuk RI. <http://finance.detik.com/read/2012/06/13/154144/1940500/4/hatta-krisis-eropa-jadi-ancaman-sekaligus-peluang-untuk-ri>. Diakses 30 Agustus 2012.

"Sri Mulyani: Ekonomi ASEAN Kebal terhadap Krisis Eropa". <http://financeroll.co.id/news/36968/sri-mulyani-ekonomi-asean-kebal-terhadap-krisis-eropa>. Diakses 6 September 2012.

Tempo. 2012. Indonesia Kebal Krisis Eropa. <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/25/087406099/Indonesia-Kebal-Krisis-Eropa>. Diakses 30 Agustus 2012

Zuhri, S. 2012. Gernas Kakao: Askindo Minta Program Dibenahi. <http://www.bisnis.com/articles/gernas-kakao-askindo-minta-program-dibenahi>. Diakses 23 Mei 2012.

***Leaflet:***

Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia. Kiat Memperkokoh Agribisnis Kakao Indonesia. *Leaflet*. <http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr243023.pdf>. Diakses 6 September 2012.

**BAB VI**  
**ANTISIPASI KRISIS EROPA**  
**MELALUI PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN**  
**INDONESIA**

*Galuh Prila Dewi\**

---

\* Penulis adalah peneliti bidang Ekonomi & Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengolahan Data & Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI, dapat dihubungi melalui email: [galuhpriladewi@gmail.com](mailto:galuhpriladewi@gmail.com)

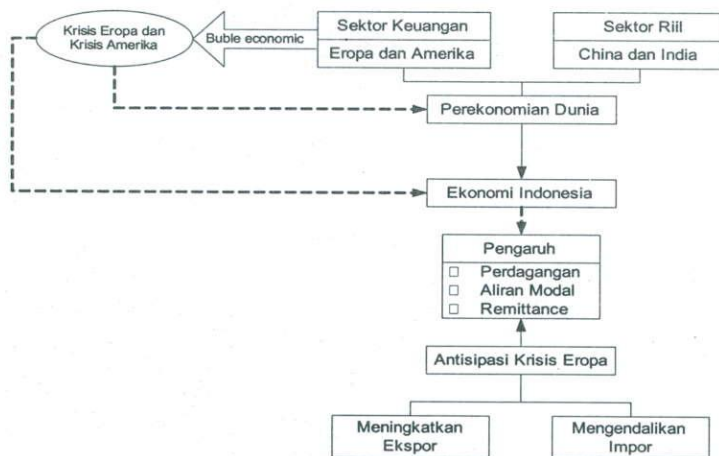


## PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Perekonomian global pada saat ini dipengaruhi oleh krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Kondisi perekonomian Amerika yang belum pulih dan penurunan peringkat utang Amerika memicu gejolak financial global. Di kawasan Eropa, krisis utang pemerintah Yunani sangat mempengaruhi bahkan menyebabkan beberapa Negara juga mengalami krisis serupa, seperti Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia.

Dampak krisis Eropa maupun Amerika Serikat (AS) terhadap ekonomi Indonesia ini secara keseluruhan relatif terkendali hingga saat ini. Dampak ke sektor keuangan cukup terasa namun lebih banyak dipengaruhi oleh adanya sentimen negatif Global meskipun fundamental ekonomi sebenarnya relatif baik. Sedangkan pada sektor rill, krisis keuangan Eropa dan AS belum memberi dampak yang signifikan. Dampak yang belum signifikan ini bukan berarti bisa diabaikan karena penanganan krisis Eropa sangat kompleks, dikhawatirkan krisis ini berkepanjangan dan akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada perekonomian Indonesia.

Salah satu antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah dampak dari krisis Eropa adalah dengan meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor. Pengendalian impor merupakan suatu upaya yang berat, semua lapisan masyarakat dan Pemerintah harus ikut mendukung pengendalian impor ini. Pengendalian impor dilakukan dengan mengendalikan dan membendung masuknya produk impor dan meningkatkan kualitas produk domestik.



**Gambar 1. Dampak Krisis Eropa bagi Indonesia**

Pengendalian impor yang harus segera dilakukan adalah pengendalian impor pangan. Saat ini, produk pangan impor sudah membanjiri pasar domestik baik pangan olahan maupun pangan segar. Krisis Eropa yang sangat berpengaruh pada krisis global, tidak menutup kemungkinan akan berakibat pada krisis pangan dunia. Hal yang perlu diwaspadai adalah negara-negara produsen pangan cenderung menahan stok untuk kebutuhan domestiknya dan tidak secara gegabah melempar ke pasar global. Jadi Indonesia harus segera melakukan pembatasan impor pangan bahkan kalau bisa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi domestik.

### **PENYEBAB KRISIS EROPA**

Kawasan Eropa menghadapi krisis utang luar negeri yang cukup serius, beberapa negara di Eropa memiliki utang publik dengan level yang tinggi. Tiga Negara di Eropa, Yunani, Irlandia, dan Portugal, meminjam uang dari Negara Eropa lain dan dari IMF dalam jumlah yang besar. Yunani memiliki jumlah utang terbesar dengan defisit anggaran terbesar di Eropa, hal ini menjadikan Yunani sebagai pusat krisis Eropa.<sup>1</sup>

Krisis Yunani berawal dari akumulasi defisit anggaran yang setiap tahunnya rata-rata mencapai sebesar 6% dari PDB selama 30 tahun. Yunani nampaknya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam kebijakan defisitnya, sehingga defisit anggaran mencapai dua kali lipat dari ketentuan *Uni Eropa* (UE) yang maksimum ditetapkan sebesar 3 persen. Sementara itu pasar obligasi di dalam negerinya juga masih sangat terbatas, untuk itu Yunani menjual Surat Utang Negara (SUN)-nya kepada investor di Prancis, Swiss, dan Jerman. Sebagai dampak akumulasi defisit, saat ini defisit Yunani mencapai 13,6 persen dari PDB. Tingginya defisit Yunani di atas nampaknya efek dari lemahnya disiplin anggaran serta buruknya administrasi perpajakan. Hal ini tercermin dari pemborosan, korupsi, maupun manipulasi pembukuan. Ketentuan batas maksimum defisit UE dilanggar dengan memanipulasi pembukuan. Dalam sistem pembukuan dan anggaran berbasis kas, yang digunakan di Yunani, tidak mengantisipasi risiko fiskal karena dalam anggaran tidak memuat informasi mengenai pengeluaran *contingency*. Akibatnya pada saat SUN jatuh tempo pada April dan Mei 2010 ini, kewajiban pembayaran utang sebesar 20 bilion euro mengalami gagal bayar. Pemerintah Yunani nampaknya sudah pasrah dan menyatakan ketidakmampuannya untuk mencari dana segar guna melunasi kewajibannya yang jatuh tempo. Hal ini semakin memperparah derita Yunani,

---

<sup>1</sup> Rebecca M. Nelson, Paul Belkin, and Derek E. Mix." Greece's Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications", paper presented at Congressional Research Service, August, 18 2011., P.1-5.



karena lembaga peringkat utang Standard and Poor's menurunkan peringkat utang Yunani dari B menjadi CCC sehingga berpotensi gagal bayar pada 14 Juni 2010. Level kredit CCC hanya empat *notch* di atas level terendah berdasarkan pengukuran lembaga pemeringkat yang berbasis di Amerika Serikat ini. Akibat turunnya peringkat utang Yunani, membuat para investor beramai-ramai melepas Euro dan beralih ke Dollar AS sehingga Euro melemah seiring ketakutan akan tidak mampunya Yunani membayar utangnya. Krisis ini tidak hanya membuat Euro saja yang jatuh namun sebagian besar bursa mata uang regional juga mengalami pelemahan tak terkecuali Rupiah.<sup>2</sup>

Kondisi perekonomian negara-negara di kawasan Eropa mendapat tekanan yang berat terutama dari sektor keuangan pemerintah yaitu berupa defisit anggaran yang relatif melebar dan beban utang yang meningkat. Penggunaan utang yang tidak efisien dan tidak terarah semakin memberi tekanan terhadap anggaran pemerintah. Tekanan fiskal berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi beberapa negara Eropa serta berkurangnya kesempatan kerja.

Defisit fiskal negara-negara Eropa masih tinggi, beberapa negara masih melebihi 3,0 persen per Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2010 pelebaran defisit fiskal terjadi pada negara Irlandia yang mencapai 32,4 persen PDB lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 (defisit 14,3 persen PDB). Sedangkan defisit fiskal negara Yunani dan Portugal pada tahun 2010 menurun menjadi 10,5 persen PDB dan 9,1 persen PDB dari sebelumnya sebesar 15,4 persen PDB dan 10,1 persen PDB di tahun 2009. Defisit yang lebar serta penggunaan utang yang tidak efisien dan terarah semakin menambah beban utang beberapa Negara Eropa hingga lebih dari setengah PDB. Negara Yunani, Irlandia, dan Portugal memiliki utang per PDB yang lebih tinggi dari tahun 2009 yaitu masing-masing sebesar 144,9 persen, 96,2 persen, dan 93,0 persen. Utang pemerintah per PDB negara lapisan kedua yaitu Italia dan Spanyol masing-masing mencapai 119,0 persen dan 60,1 persen lebih tinggi dibandingkan utang negara-negara tersebut di tahun 2009 yaitu sebesar 116,1 persen dan 53,3 persen. Demikian pula kondisi utang negara penopang Eropa yaitu Jerman dan Perancis memiliki utang per PDB yang relatif tinggi yaitu sebesar 83,2 persen dan 81,7 persen pada tahun 2010.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Lela Nurlaela Wati, "Krisis Yunani Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia", (<http://www.stiemj.ac.id/berita-129-krisis-yunani-serta-dampaknya-terhadap-ekonomi-indonesia.html>, diakses 27 Juni 2012).

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Krisis Keuangan Eropa: Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia*. Triwulan IV. (Jakarta: Kementerian Bappenas, 2011), hal.1-10.



Ketahanan ekonomi negara-negara kawasan Eropa mulai melemah, kondisi ini ditunjukkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi serta kondisi kesempatan kerja yang berkurang. Perlambatan ekonomi terjadi pada hampir seluruh negara-negara Eropa termasuk Jerman dan Perancis sebagai negara penopang Eropa. Penurunan perekonomian dialami oleh Yunani dan Portugal. Penurunan perekonomian yang terjadi di Yunani terutama disebabkan oleh kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif sebagaimana ketentuan Troika yaitu melakukan pemotongan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak keuntungan sehingga memberi disinsentif bagi perusahaan untuk melakukan perluasan produksi.

Krisis keuangan Eropa yang menjadi krisis global dikhawatirkan akan memberi dampak negatif yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Sampai saat ini, perekonomian Indonesia masih terjaga meskipun mengalami sedikit gejolak pada sektor finansial. Dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global, khususnya krisis Eropa; perencanaan perekonomian di Indonesia, sasaran ekonomi makronya mengarah pada beberapa hal, yaitu berdasarkan kemajuan yang dicapai hingga menjelang akhir tahun 2011 serta ekspektasi yang kuat terhadap perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ditargetkan 6,7 persen, inflasi 5,3 persen; pengangguran terbuka 6,4 – 6,6 persen, dan kemiskinan 10,5 – 11,5 persen, sasaran ini didasarkan pada asumsi bahwa krisistutangEropa dapat ditangani secara bertahap sehingga perlambatan ekonomi dunia berlangsung wajar dengan kawasan Asia yang relatif tetap tumbuh tinggi; (2) dengan penerimaan ekspor pada tahun 2012 yang diperkirakan melambat, kerja keras dan langkah konkrit diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen, disamping upaya untuk mendorong ekspor, daya beli masyarakat dan investasi perlu dijaga dan ditingkatkan, penyerapan belanja negara, terutama belanja modal, harus maksimal, sektor pertanian dan industri pengolahan perlu tumbuh lebih baik dari tahun 2011, kalau ini dapat dilakukan, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 akan mengarah pada 6,7 persen; dan (3) terhadap kemungkinan terjadinya kembali krisis keuangan global yang mendorong resesi global, garis besar kebijakan ditempuh mencakup tiga upaya pokok, yaitu menjaga confidence terhadap perekonomian Indonesia, meningkatkan daya saing ekspor termasuk pengamanan pasar dalam negeri, serta penajaman belanja negara secara maksimal.<sup>4</sup>

Dampak krisis pada jangka pendek diperkirakan mendorong aliran modal keluar besar-besaran terkait dengan ketidakpercayaan pada sistem finansial

<sup>4</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia, *Indonesia Economic Observation 2011-2012, Membangun Sinergi Untuk Menghadapi Gejolak Ekonomi*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hal. 1-4.



dunia. Dampak aliran modal keluar inilah yang harus diwaspadai karena dapat menurunkan *confidence* terhadap perekonomian Indonesia. Apabila Indonesia mampu meredam gejolak jangka pendek maka *confidence* perekonomian jangka menengah dan panjang dapat terjaga. Dalam jangka waktu yang lebih panjang (menengah), krisis global akan memberi dampak yang besar pada sektor riil terutama perdagangan terkait perlambatan ekonomi dunia terutama pada negara-negara maju. Krisis global tidak berpengaruh besar terhadap jalur perdagangan langsung (*direct trade*) antara Indonesia dengan Eropa maupun dengan Amerika Serikat. Namun jalur perdagangan tidak langsung (*indirect trade*) Indonesia dengan Eropa dan Amerika akan terpengaruh melalui Cina. Cina yang merupakan importir terbesar barang Indonesia diperkirakan akan mengurangi impornya disebabkan permintaan negara-negara maju menurun terhadap barang Cina.<sup>5</sup>

International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa ketidakpastian ekonomi global akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 dari 6,5 persen menjadi 6,3 persen. Keadaan tersebut akan diperparah dengan meningkatnya harga beras di pasar dunia, yang merupakan pangan utama sebagian besar penduduk Indonesia dan sampai saat ini Indonesia masih sangat tergantung pada impor beras.<sup>6</sup>

## **DAMPAK TERHADAP PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Risiko akibat krisis Eropa yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi semakin tidak pasti. Faktor risiko eksternal termasuk krisis *sovereign debt* di zona Eropa dan menurunnya ekonomi negara maju dapat menyebabkan risiko terhadap ekonomi domestik. Akhir-akhir ini terindikasi bahwa zona Eropa menunjukkan tanda-tanda penularan ke negara-negara sekitar dan partner dagang utamanya melalui bank dan perekonomian. Oleh karena itu IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4 persen menjadi 3,25 persen. Dengan kondisi bahwa perekonomian Indonesia terkait dengan perubahan kondisi eksternal maka kegiatan ekonomi domestik dapat mengalami kontraksi pula. Meskipun tidak setinggi angka pertumbuhan tahun sebelumnya, kinerja ekspor Indonesia masih positif. Berdasarkan data Bank Indonesia, selama Semester II 2011 total ekspor Indonesia tumbuh 6 persen dengan pencapaian ekspor selama 2011 tercatat sebesar USD 201,5 miliar atau tumbuh 27,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka impor selama Semester II 2011 juga tumbuh

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Tulus Tambunan, *Memahami Krisis Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*, (Jakarta, LP3ES, 2011), hal. 219-239.

lebih lebih rendah dibanding semester sebelumnya yakni sebesar 10 persen dengan pencapaian selama 2011 sebesar USD 166,1 miliar (fob) atau tumbuh 30,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ekspor tersebut terutama disebabkan oleh turunnya harga beberapa komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, minyak mentah, dan batubara.<sup>7</sup>

Transaksi perdagangan internasional yang solid dan konsumsi domestik yang cukup kuat mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 2011 mampu tumbuh 6,5 persen atau lebih besar dibandingkan tahun 2010 sebesar 6,10 persen. Kondisi tersebut didukung dengan tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Hal tersebut juga tercermin dari naiknya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)<sup>1</sup> yang pada Desember 2011 mencapai level tertinggi dalam 3 tahun terakhir yakni sebesar 116,6.<sup>8</sup>

Dampak krisis ekonomi Eropa terhadap ekonomi Indonesia bisa melalui sejumlah jalur transmisi, diantaranya jalur perdagangan, khususnya ekspor Indonesia ke Eropa, terutama ke negara-negara Eropa yang bermasalah. Kemungkinan besar Indonesia tidak akan terlalu berdampak dari krisis Eropa melalui jalur ekspor langsung karena di antara negara-negara Eropa, hanya Jerman yang mempunyai volume perdagangan cukup besar dengan Indonesia.

Dilihat dari sisi impor Indonesia, pasar dari produk-produk Jerman di Indonesia hanya sekitar 3 persen sedangkan dari sisi ekspor, pasar produk-produk Indonesia di Eropa juga kecil, hanya 2,1 persen. Di sektor manufaktur, kelompok industri yang terkena dampak apabila tidak ada pesanan dari Eropa dan AS adalah industri tekstil dan pakaian jadi (TPT) dan alas kaki. Selama ini kawasan Eropa dan AS merupakan pasar utama bagi TPT dan alas kaki Indonesia. Ada dua pilihan bagi para pengusaha alas kaki dan TPT Indonesia yang selama ini mengeksport produk mereka ke AS dan Eropa, yaitu dengan melakukan diversifikasi pasar ekspor ke wilayah-wilayah lain di luar UE dan AS dan memperluas pasar domestik mereka karena pasar Indonesia sangat besar.<sup>9</sup>

## **DAMPAK TERHADAP INVESTASI DAN NERACA PEMBAYARAN**

Dampak pada aliran modal terjadi fokus pada aliran dana, dana yang besar sulit diraih sehingga modal yang masuk berukuran kecil. Modal-modal kecil lebih dapat diserap oleh pasar-pasar baru dan sektor riil. Ekonomi

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), hal. 1-15.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*



mikro menjadi terangkat namun tidak memberikan banyak sumbangan pada negara.

Dampak penurunan pertumbuhan investasi portofolio perlu diwaspadai terhadap pasar keuangan. Arus investasi masuk ke Indonesia selama Semester II 2011, tercatat negative yang menunjukkan adanya arus investasi keluar yang besarnya mencapai USD 5,4 miliar. Derasnya arus investasi yang keluar tersebut disebabkan oleh meningkatnya sikap *risk averse* investor global yang mulai terjadi pada paruh akhir tahun 2011 menyusul semakin berlarut-larutnya kepastian penyelesaian permasalahan fiskal di Yunani dan pemulihan yang lambat di AS. Namun secara keseluruhan selama tahun 2011 investasi masuk ke Indonesia masih positif sebesar USD 14 miliar atau turun 47,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Investasi langsung diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian dan pasar keuangan. Berdasarkan porsinya, pangsa investasi langsung/FDI terhadap total investasi ke Indonesia meningkat dari tahun lalu sebesar 47 persen menjadi 76 persen, sementara porsi investasi portofolio turun dari 53 persen menjadi 24 persen. Sektor yang selama Semester II 2011 memperoleh tambahan investasi langsung adalah sektor industri pengolahan sebesar USD 529 juta, sektor real estate, persewaan & jasa bisnis sebesar USD 369 juta dan sektor pertanian sebesar USD 92 juta. Meski mendapat tekanan yang cukup besar selama Semester II 2011, secara keseluruhan selama tahun 2011 Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus sebesar USD 11,9 miliar.<sup>10</sup>

Dampak pada jalur *remittance* diduga tidak dapat terjadi karena kondisi perbankan Indonesia yang baik. CAR (rasio kecukupan modal) dari rata-rata bank komersial di Indonesia berada di atas 20 persen sejak akhir tahun 2000, pasca krisis. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh nilai NPL (*Non Performing Loan*) yang rendah dan selalu di bawah CAR sejak akhir tahun 2000. Dua indikator kesehatan bank ini cukup menjamin kalau perbankan dalam negeri tidak terpengaruh rembetan dari krisis keuangan di Eropa. Belajar dari pengalaman krisis 1997, peran kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) merupakan peran kunci mengatasi krisis. PHLN mendistribusi ulang anggaran sehingga tepat sasaran dan efektif.<sup>11</sup>

Beberapa langkah penting dalam reformasi ekonomi Eropa 2010-2011 dilakukan dengan cara memperkuat disiplin aturan anggaran melalui (a) semua anggota UE harus berupaya agar anggaran mendekati kesetimbangan neraca dengan memangkas defisit sebesar 0,5 persen dari PDB tahunan, jika melebihi

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Rum Riyanto S, "Kemampuan dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global", ([http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/154\\_Artikel%201%20RumRiyanto%20Des%202011.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/154_Artikel%201%20RumRiyanto%20Des%202011.pdf), diakses 27 Juni 2012).



batas, hukuman dapat dijatuhkan baik secara otomatis maupun semi otomatis, (b) negara yang gagal mencapai kesetimbangan anggaran dapat dipaksa untuk menyimpan dananya pada Komisi Eropa, dan (c) memperhatikan utang, karena aturan baru mengharuskan negara anggota untuk memiliki rasio utang terhadap PDB di bawah 60 persen belum dicantumkan; (2) tata kelola ekonomi dilakukan dengan (a) antar pemerintah negara anggota harus ada kerjasama lebih erat untuk menyelaraskan kebijakan anggarannya, mengurangi perbedaan daya saing dalam ekonomi mereka, serta membantu negara anggota yang sedang mengalami kesulitan anggaran atau ekonomi, (b) semua pemerintah Negara anggota UE selama enam bulan pertama tiap tahunnya mengirimkan ke Brussels rencana anggaran mereka agar dapat ditinjau oleh Komisi Eropa dan menteri keuangan, (c) pengawasan atas ketidakseimbangan ekonomi makro harus diperkuat; (3) mekanisme bantuan melalui (a) mekanisme bantuan untuk Yunani yang baru disetujui bernilai 110 miliar euro serta jaring pengaman untuk negara-negara zona euro sebanyak 500 miliar euro adalah upaya untuk 3 tahun kedepan, (b) proposal diluncurkan termasuk obligasi yang dikeluarkan bersama oleh Negara-negara zona euro (kecuali Jerman), yang kemungkinan besar akan diawasi oleh agensi utang Eropa dan Dana Moneter Eropa; (4) penanggulangan speculator dengan menyediakan dana jaring pengaman sebesar satu triliun dollar AS dan Komisi Eropa meluncurkan rancangan aturan untuk mengendalikan derivative senilai 600 triliun dollar AS, dengan memberikan pilihan bagi investor untuk membeli apa saja mulai dari mata uang hingga gas pada harga tetap di masa depan; dan (5) melalui pengawasan lebih ketat oleh badan super pengawas pan-Eropa terhadap dua bentuk layanan financial yaitu hedge fund dan ekuitas pribadi, mengendalikan agensi pemeringkat dalam menentukan peringkat suatu negara anggota seperti Yunani, dan meruntuhkan dominasi tiga agensi utama atas pasar, salah satunya dengan membentuk agensi pemeringkat Eropa.<sup>12</sup>

### **KRISIS EROPA DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA**

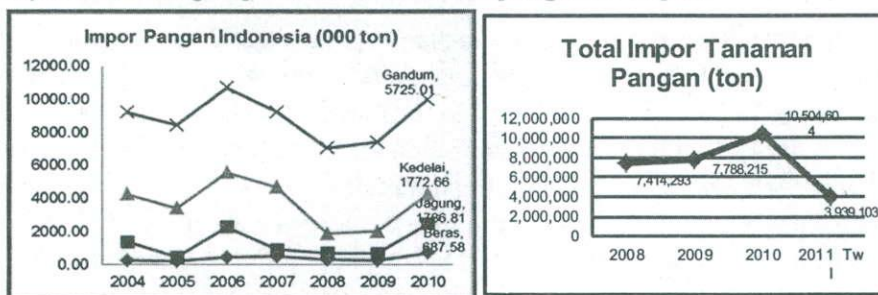
Konstelasi ekonomi global cenderung berpotensi mengguncang ekonomi Indonesia, kenaikan harga komoditas pangan, terutama beras, akan membayangi kinerja perekonomian Indonesia. Hal yang perlu diwaspadai adalah negara-negara produsen pangan menahan stok pangan untuk kebutuhan domestiknya dan tidak secara gegabah melepas ke pasar global. Isu pangan yang semakin penting adalah kemampuan mengontrol persediaan pangan dunia. Kemampuan mengontrol suplai pangan dunia adalah salah satu

<sup>12</sup> Bramanian, Surendro, "Tetap Waspada Krisis Yunani", Kompas 14 Juni 2010, hal. 21.



elemen yang membangun suatu zaman yang disebut Era Perang Pangan (*Food Wars*). Strategi kebijakan pangan yang hanya mengarah pada peningkatan produksi pangan saja (*productionist approach*), tidak akan cukup bertahan dalam kondisi persaingan global yang semakin keras.<sup>13</sup>

Indonesia sebenarnya telah masuk dalam pusaran era perang pangan. Namun, *positioning* kebijakan pangan yang diambil pemerintah sering terlambat sekian langkah dan karakter pelaku industri pangan yang belum kompatibel dengan berkah sumberdaya dan kearifan lokal, maka cukup sulit bagi Indonesia untuk keluar sebagai pemenang dalam era pangan. Negara berkembang lain telah mampu mengembangkan teknologi pangan dan rekayasa genetika, Indonesia masih memikirkan masalah pangan pokok, yang terjebak dalam ranah politik yang tidak produktif. Contoh paling akhir adalah ketika terjadi krisis kedelai, sempat berkembang wacana tentang perubahan kembali status Perum Bulog untuk menjadi lembaga pemerintah non departemen (LPND). Pola pikir ad-hoc seperti itu tidak akan mampu menjawab tantangan perubahan ekonomi pangan ke depan.<sup>14</sup>



**Gambar 2. Perkembangan Import Pangan Indonesia Tahun 2004 - 2010**

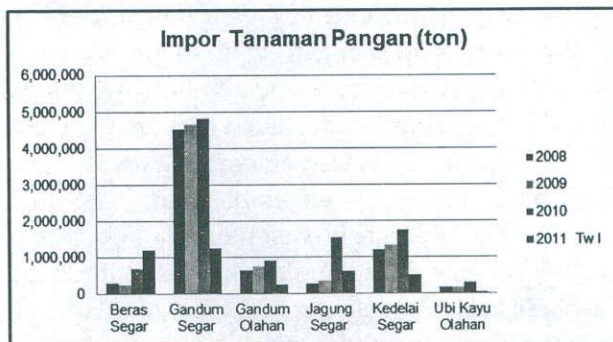
Sumber: data BPS 2011 diolah.

Krisis Eropa yang yang belum reda juga tentu akan berdampak pada pangan, terutama perdagangan pangan dan suplai pangan internasional. Gambar1. Menunjukkan kalau Indonesia selama tahun 2004 sampai tahun 2010 melakukan impor pangan dengan jumlah yang cukup tinggi, impor pangan terbesar adalah komoditas gandum, kedelai, jagung, dan beras. Import gandum sangat mengancam kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia. Gandum merupakan komoditas yang tidak mampu diproduksi di Indonesia, padahal saat ini konsumsi gandum di Indonesia sangat tinggi. Ini berarti

<sup>13</sup> Bustanul. A, "Kebijakan Pangan", Laporan Tim Ahli Ekonomi Kadin, 2008.

<sup>14</sup> Bustanul. A, "Krisis Kedelai, Potret Kebijakan Pangan yang Buruk", ([http://barifin.multiply.com/journal/item/38/Krisis\\_kedelai\\_potret\\_kebijakan\\_pangan\\_yang%20buruk\\_Bisnis\\_Indonesia\\_Senin\\_21\\_Januari\\_2008,%20Bisnis%20Indonesia](http://barifin.multiply.com/journal/item/38/Krisis_kedelai_potret_kebijakan_pangan_yang%20buruk_Bisnis_Indonesia_Senin_21_Januari_2008,%20Bisnis%20Indonesia), diakses 28 Juni 2012).

ketergantungan pangan Indonesia terhadap Negara lain sangat tinggi. Pada saat negara produsen gandum memproteksi pangan dan tidak melepas ke pasar global, Indonesia akan goyah dan rentan pangan jika kondisi ketergantungan pangan ini tidak diatasi.



**Gambar 3. Impor Komoditas Pangan Tahun 2008 – 2011 Triwulan I**

Sumber: Kementerian Pertanian, 2012.

Impor gandum segar dan gandum olahan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 selalu mengalami peningkatan, demikian juga dengan impor beras segar. Indonesia tercatat sebagai negara pengimpor gandum terbesar kedua di dunia. Setidaknya berdasarkan laporan United State Department of Agriculture (USDA) Mei 2012, impor gandum Indonesia diprediksi menembus 7,1 juta ton, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 6,7 juta ton. Urutan pertama masih dikuasai oleh Mesir dengan impor gandum tahun ini akan mencapai 10 juta ton, sementara tahun lalu mencapai Rp10,5 juta ton. Urutan ketiga antara lain Brazil dengan impor 7000 ton, tahun lalu. Selebihnya ada Jepang, Uni Eropa, Aljazair, Maroko, Korea Selatan, Meksiko, Nigeria, Irak, Turki, Filipina dan negara lain dengan proyeksi impor tahun ini totalnya 137.425.000 ton.<sup>15</sup>

Konsumsi beras rata-rata per kapita seminggu mengalami penurunan, pada tahun 2009 sebesar 1,755 kg, turun menjadi 1,733 pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 turun lagi menjadi 1,721 kg.<sup>16</sup> Namun penurunan konsumsi ini diikuti oleh peningkatan impor gandum. Tingginya impor gandum ini disebabkan oleh perubahan konsumsi masyarakat dari beras ke gandum. Gandum adalah bahan baku untuk pangan pengganti beras seperti mie, roti,

<sup>15</sup> Suhendra, "RI Pengimpor Gandum Terbesar Kedua di Dunia", (<http://www.bumn.go.id/ptpn4/id/publikasi/berita/indonesia-ri-pengimpor-gandum-terbesar-kedua-di-dunia/>, diakses 28 Juni 2012).

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2012).



dan lainnya. Pada saat permintaan roti, mie, dan produk lainnya meningkat akan diikuti oleh peningkatan permintaan gandum. Perubahan pola konsumsi masyarakat inilah yang mengakibatkan peningkatan impor gandum karena belum bisa memproduksi gandum sendiri.<sup>17</sup>

Krisis Eropa yang berkepanjangan akan berdampak pada suplai pangan di pasar internasional. Suplai pangan akan menjadi terbatas karena negara produsen pangan akan membatasi pangan yang dilepas ke pasar internasional. Suplai pangan yang terbatas akan berakibat pada tingginya harga komoditas pangan terutama beras. Hal ini akan mengganggu ketahanan pangan negara yang selama ini mengandalkan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Ketahanan pangan merupakan akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*).<sup>18</sup> Ketahanan pangan juga dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.<sup>19</sup>

Ketahanan pangan minimal mengandung unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas masyarakat, dan stabilitas harga pangan. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Aspek distribusi pangan sampai ke pelosok rumah tangga pedesaan, merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memperkuat strategi ketahanan pangan.<sup>20</sup>

Pengertian ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup, dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif. Kemampuan dalam menyediakan pangan seharusnya bersumber dari dalam negeri sendiri, yaitu yang dihasilkan petani.

Impor pangan dilakukan hanya untuk memenuhi kekurangan, agar tidak mengganggu ketahanan pangan domestik. Impor pangan sebagai alternative

<sup>17</sup> "Pola Konsumsi Berubah, Impor Gandum Meningkat", ([http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/24/92770/pola\\_konsumsi\\_berubah\\_impor\\_gandum\\_meningkat/#.T-vPrshLGeI](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/24/92770/pola_konsumsi_berubah_impor_gandum_meningkat/#.T-vPrshLGeI), diakses 28 Juni 2012).

<sup>18</sup> Maxwell, S. and Frankenberger, *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements. A Technical Review*. (New York: UNICEF-IFAD, 1992).

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

<sup>20</sup> Bustanul Arifin, *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005).

terakhir untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dalam negeri hendaknya diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan kepentingan para produsen pangan di dalam negeri, yang mayoritas petani skala kecil, juga kepentingan konsumen khususnya kelompok miskin. Dinamika dari sisi permintaan menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dalam jumlah, mutu, keragaman jenis, dan keamanannya. Sementara itu pengembangan produksi dalam negeri masih terkendala oleh penurunan laju produktivitas lahan dan kesejahteraan petani yang relatif rendah. Kendala tersebut disebabkan oleh penggunaan pupuk dan obat intensif dalam dosis yang tidak terukur dan terus-menerus. Tindakan ini dalam jangka panjang akan merusak mutu tanah, jadi tanah akan menurun produktivitasnya; penggunaan pupuk dan obat bersifat deskriminatif dalam distribusi manfaat sehingga petani skala besar lebih banyak menikmati kenaikan pendapatan; dan skala usaha petani di Indonesia sangat kecil (penggunaan lahan kurang dari 0,5 ha per rumah tangga).<sup>21</sup>

Masalah pangan juga memiliki dimensi tersendiri dilihat dari kualitas pangan, keamanan pangan, keanekaragaman pangan, dan kemandirian pangan. Besarnya impor beberapa produk pangan esensial menimbulkan ketidaktahanan pangan yang memiliki dampak luas. Ketidaktahanan pangan juga terkait dengan guncangan seperti kekeringan, bencana, atau fluktuasi pasar internasional.

### **ANTISIPASI DAN KEBIJAKAN DALAM MENGHADAPI KRISIS EROPA**

Dalam upaya menghadapi kemungkinan penyebaran krisis Eropa menjadi krisis Global, maka kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menjaga *market confidence*, mendorong sektor eksternal, memperkuat investasi dan meningkatkan penajaman APBN.<sup>22</sup>

Perekonomian nasional masih dihadapkan pada tantangan akan kelanjutan krisis Eropa dan Amerika berikut dampaknya bagi Indonesia. Untuk mencegah agar sektor finansial tidak terjerembab ke dalam krisis memerlukan beberapa hal, antara lain legitimasi hukum jaring pengaman sistem keuangan, koordinasi dalam bentuk Protokol Manajemen krisis terkait mekanisme pengambilan keputusan dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis, dan penguatan kerjasama regional dengan Negara-negara lain melalui mekanisme *bilateral swap arrangement*.

Penguatan investasi dilakukan dengan menyusun kebijakan yang kondusif dalam bagi investor. Upaya meningkatkan daya saing investasi di Indonesia dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur perijinan investasi,

<sup>21</sup> *Op.cit.* Tambunan, Tulus. hal. 177.

<sup>22</sup> *Op.cit.* Bappenas. hal. 28



menyediakan infrastruktur yang memadai dan diikuti dengan peningkatan kualitas jasa pelayanan yang berstandar internasional, dan mengurangi ekonomi biaya tinggi (*minimizing transaction cost and rent seeking behaviour*) di semua lini pemerintahan untuk mencapai transparansi dan *good governance* yang dipercaya.

Penguatan strategi di bidang perdagangan dalam mengantisipasi krisis Eropa dilakukan dengan meningkatkan diversifikasi pasar ekspor sehingga tingkat kebergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Eropa semakin menurun, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan domestik, menguatkan pasar dalam negeri baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran, meningkatkan nilai tambah produk ekspor, dan meningkatkan pengawasan terhadap impor ilegal dan impor barang konsumsi.

Antisipasi krisis yang dilakukan melalui penajaman APBN diupayakan dengan melakukan penajaman penggunaan APBN agar pengeluaran anggaran dapat lebih efektif dan efisien sehingga membawa dampak optimum pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proses penyerapan anggaran juga perlu diperlancar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat. Selain itu, antisipasi krisis juga dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat terjaga dengan kualitas produk yang berkualitas dan berdaya saing dan dapat juga dijaga dengan menetapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat terutama yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Antisipasi krisis Eropa melalui pemantapan ketahanan pangan dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan yang berbasis kemandirian pangan. Kemandirian pangan menekankan pemenuhan kebutuhan pangan dengan produksi dalam negeri, ketergantungan pangan pada impor berarti menggantungkan pangan negara pada negara lain. Pada saat krisis Eropa dan global bertambah parah, ketahanan pangan negara itu akan rapuh bahkan negara tersebut bisa terjajah pangan pada saat semua negara memprotek produk pangannya. Tiga komponen utama dalam kemandirian pangan adalah dalam jangka pendek pemerintah memberlakukan kebijakan stabilisasi harga bahan pangan pokok seperti beras, gula, kedelai dan minyak goreng; dalam jangka menengah, pemerintah mendorong dan mempercepat pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi; dalam jangka panjang, pemerintah melakukan percepatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak tergantung pada beras sebagai bahan pokok pangannya, serta agar tercapai perbaikan gizi masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.



Diversifikasi merupakan salah satu upaya yang tepat dalam pencapaian kemandirian pangan di Indonesia. Produksi tanaman pangan Indonesia sangat beraneka ragam namun selama ini masyarakat hanya bergantung pada satu jenis pangan pokok saja, yaitu beras. Ketergantungan pada satu jenis pangan pokok yang tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas yang sesuai dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, mengakibatkan peningkatan impor beras. Impor beras memang mengatasi masalah, dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang ini akan menghancurkan ketahanan pangan negara.

Upaya diversifikasi pangan ini masih terhambat oleh masih kurangnya produk olahan dan industri olahan pangan yang berbahan baku pangan pokok selain beras, seperti singkong, sagu, jagung, dan tanaman pangan lain. Pada saat pemerintah mencanangkan untuk mengurangi konsumsi beras, masyarakat tidak beralih ke pangan pokok lokal (yang diproduksi domestik) tetapi beralih ke produk olahan gandum, seperti mie, biskuit, dan roti. Salah satu penyebabnya adalah belum ada produk olahan berbahan pangan lokal yang praktis dan menarik seperti roti, biskuit, dan mie. Pemikiran masyarakat yang masih bertumpu pada satu jenis pangan pokok, yaitu beras juga merupakan hambatan dalam pemberlakuan diversifikasi pangan.

Peningkatan nilai produk pangan berbasis pangan lokal memang membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Namun hal ini harus dilakukan karena ketergantungan pada gandum harus segera dihentikan mengingat gandum tidak bisa diproduksi domestik. Upaya pengolahan pangan berbasis pangan lokal harus terus dilakukan seiring dengan merubah pola pikir masyarakat agar mau beralih dari konsumsi beras menjadi bahan pangan pokok lokal lain. Pengolahan pangan berbasis pangan lokal ini selain mencukupi kebutuhan pangan domestik diharapkan juga bisa diekspor dan juga menaikkan nilai pangan pokok lokal sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi pangan dalam negeri dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, program pembangunan pertanian difokuskan pada lima fundamental penanganan pertanian yang mencakup pembangunan/perbaikan infrastruktur perbenihan, riset, dan sebagainya; penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; dan penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.



Ketahanan pangan yang berbasis kemandirian pangan merupakan salah satu antisipasi yang tepat untuk menghadapi krisis Eropa yang akan berimbas juga ke krisis global. Pada saat ketahanan pangan Indonesia kuat, ketahanan nasional juga kuat karena ketahanan pangan merupakan elemen primer penyokong ketahanan nasional.

## CATATAN PENUTUP

Krisis Eropa merupakan ancaman bagi perekonomian global dan perekonomian setiap negara di dunia. Krisis Eropa dipacu oleh kawasan Eropa yang menghadapi krisis utang luar negeri yang cukup serius, beberapa negara di Eropa memiliki utang publik dengan level yang tinggi. Kondisi perekonomian negara-negara di kawasan Eropa mendapat tekanan yang berat terutama dari sektor keuangan pemerintah yaitu berupa defisit anggaran yang relatif melebar dan beban utang yang meningkat. Penggunaan utang yang tidak efisien dan tidak terarah semakin memberi tekanan terhadap anggaran pemerintah. Tekanan fiskal berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi beberapa negara Eropa serta berkurangnya kesempatan kerja.

Krisis Eropa sangat berpengaruh pada perekonomian global dan secara tidak langsung berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Saat ini perekonomian Indonesia masih terjaga meskipun mengalami sedikit gejolak pada sektor finansial. Dampak yang belum terasa bukan berarti bisa diabaikan tetapi harus segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi karena ada kemungkinan krisis Eropa membutuhkan waktu penanganan yang lama karena melibatkan kawasan Eropa yang luas. Indonesia harus mengambil tindakan untuk mengantisipasi dampak krisis ini. Dalam upaya menghadapi kemungkinan penyebaran krisis Eropa menjadi krisis Global, maka kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menjaga *market confidence*, mendorong sektor eksternal, memperkuat investasi dan meningkatkan penajaman APBN.

Antisipasi krisis Eropa melalui pemantapan ketahanan pangan dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan yang berbasis kemandirian pangan. Kemandirian pangan menekankan pemenuhan kebutuhan pangan dengan produksi dalam negeri, ketergantungan pangan pada impor berarti menggantungkan pangan negara pada negara lain. Antisipasi melalui ketahanan pangan menjadi penting karena ketahanan pangan menjadi penyokong primer ketahanan nasional. Ketahanan pangan yang berbasis kemandirian juga akan menjadikan Indonesia tidak bergantung pada negara lain terutama dalam hal pangan karena pangan merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Salah satu cara yang

tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan adalah dengan melakukan diversifikasi pangan.

Salah satu kendala diversifikasi pangan adalah kurangnya pengolahan pangan berbasis sumber pangan lokal dan pola pikir masyarakat yang masih cenderung bergantung pada satu jenis pangan pokok. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memfasilitasi industri yang bergerak di bidang pangan olahan berbasis pangan lokal dan memberikan penghargaan serta dorongan pada daerah yang berhasil mengembangkan pangan lokalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012, hal. 1-15

Bustanul Arifin, *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi* Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia, *Indonesia Economic Observation 2011-2012, Membangun Sinergi Untuk Menghadapi Gejolak Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia, 2011, hal. 1-4

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Krisis Keuangan Eropa: Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia*. Triwulan IV. Jakarta: Kementerian Bappenas, 2011, hal. 1-10.

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Indonesia Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009, p. 167-192.

Maxwell, S. and Frankenberger, *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements. A Technical Review*. (New York: UNICEF-IFAD, 1992).

Tulus Tambunan, *Memahami Krisis Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*. Jakarta, LP3ES, 2011, hal. 219-239.

### Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, Jakarta: BPS, 2011.



Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, Jakarta: BPS, 2012.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi*. Jakarta: Bappenas. 2007.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

### **Artikel dalam Jurnal dan Surat Kabar**

Bramanian, Surendro, "Tetap Waspada Krisis Yunani", Kompas 14 Juni 2010, hal 21.

Bustanul. A, "Kebijakan Pangan", Laporan Tim Ahli Ekonomi Kadin, 2008.

Rebecca M. Nelson, Paul Belkin, and Derek E. Mix, August, 18 2011. Greece's Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications. Congressional Research Service.p.1-5

### **Artikel dalam Internet**

Budi Santoso,"Dampak Krisis Eropa dan Amerika Pada LKS dan Sektor Mikro di Indonesia", 2011([http://www.tamzis.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=212&Itemid=9](http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=9), diakses 25 Juni 2012)

Bustanul. A, "Krisis Kedelai, Potret Kebijakan Pangan yang Buruk", ([http://barifin.multiply.com/journal/item/38/Krisis\\_kedelai\\_potret\\_kebijakan\\_pangan\\_yang%20buruk\\_Bisnis\\_Indonesia\\_Senin\\_21\\_Januari\\_2008,%20Bisnis%20Indonesia](http://barifin.multiply.com/journal/item/38/Krisis_kedelai_potret_kebijakan_pangan_yang%20buruk_Bisnis_Indonesia_Senin_21_Januari_2008,%20Bisnis%20Indonesia), diakses 28 Juni 2012).

Lela Nurlaela Wati, "Krisis Yunani Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia", (<http://www.stiemj.ac.id/berita-129-krisis-yunani-serta-dampaknya-terhadap-ekonomi-indonesia.html>, diakses 27 Juni 2012).

"Pola Konsumsi Berubah, Impor Gandum Meningkat", ([http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/24/92770/pola\\_konsumsi\\_berubah\\_impor\\_gandum\\_meningkat/#.T-vPrshLGeI](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/24/92770/pola_konsumsi_berubah_impor_gandum_meningkat/#.T-vPrshLGeI), diakses 28 Juni 2012).

Ramadhan Muhaimin, "OPEC: 2012, Krisis Eropa Ciptakan Ketidakpastian Ekonomi Dunia", Januari 2012. (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/01/17/lxwy7z-opec-2012-krisis-eropa-ciptakan-ketidakpastian-ekonomi-dunia>, diakses 25 Juni 2012).

Rum Riyanto S, "Kemampuan dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global", (<http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/154Artikel%201%20RumRiyanto%20Des%202011.pdf>, diakses 27 Juni 2012).

Suhendra, "RI Pengimpor Gandum Terbesar Kedua di Dunia", (<http://www.bumn.go.id/ptpn4/id/publikasi/berita/indonesia-ri-pengimpor-gandum-terbesar-kedua-di-dunia/>, diakses 28 Juni 2012).



**BAB VII**  
**DAMPAK KRISIS EKONOMI EROPA**  
**TERHADAP UPAYA PENURUNAN EMISI GLOBAL**  
**DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA**

*Hariyadi*

## PENDAHULUAN

Bank Sentral Inggris (*Bank of England*) menilai bahwa krisis keuangan di Uni Eropa (EU) yang terjadi mulai akhir tahun 2009 menandai sebuah krisis terberat sejak krisis ekonomi tahun 1930-an dan menjadi salah satu masalah terpenting dalam perekonomian global. Krisis yang dimulai dengan kegagalan Yunani menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan sebagai dasar pembayaran surat hutang dan lambatnya reformasi fiskal merambah ke beberapa negara lain seperti Portugal, Irlandia, Italia dan Spanyol sehingga memaksa talangan (*bailouts*) dari sumber internal kawasan dan lembaga keuangan internasional.<sup>1</sup>

Besarnya derajat krisis tersebut oleh Michael Sommer dilihat sebagai krisis Euro, ekonomi, keuangan, dan lapangan kerja terbesar dalam kurun waktu 50 tahun terakhir sejarah Eropa. Konsekuensinya, Eropa dituntut untuk lebih memberikan komitmen politiknya dalam penyelesaian persoalan ini. Strategi baru yang dikenal sebagai "Strategi UE 2020" (*EU 2020*) menggantikan "Strategi Lisbon" yang dilansir tahun 2000; selama ini dianggap masih jauh dari harapan.<sup>2</sup> Komisi UE sendiri melalui skema strategi tersebut menilai bahwa kejatuhan ekonomi bersejarah Eropa pada tahun 2009 itu diakibatkan oleh setidaknya-tidaknya dua kelemahan ekonomi Eropa, yakni ketimpangan produktifitas dengan Amerika Serikat (AS) dan tingkat kesempatan kerja yang rendah secara komparatif.<sup>3</sup>

Krisis di Uni Eropa juga sekaligus menjadi krisis politik. Penegasan ini dilansir oleh Kanselir Jerman Angela Merkel sebagai salah satu negara yang kuat dan harus banyak menanggung beban bagi upaya penyelamatan krisis itu. Merker menegaskan: "When the Euro fails, Europe fails".<sup>4</sup> Sebagaimana terlihat dalam serangkaian tekanan publik terhadap pemerintahnya, implikasi politis atas krisis keuangan tersebut terjadi tidak hanya pada tataran *grassroots* di negara-negara yang mengalami krisis hutang tetapi juga hubungan antara negara yang terkena krisis dengan negara-negara yang kuat

<sup>1</sup> Lihat Thomas Kenny, "What is the European Debt Crisis?", dalam <http://bonds.about.com/od/advancedbonds/a/What-Is-The-European-Debt-Crisis.html>; diakses 3 April 2012.

<sup>2</sup> Lihat Michael Sommer, "If not now, then when? What Social Europe needs is a fundamental policy shift", dalam Michael Sommer, Frank Bsirske & Wolfgang Rhode, *Business as Usual or a New Strategy for the Future? The EU 2020 Strategy from the Perspective of German Trade Unions*, International Policy Analysis, FES, June 2010: 4-6.

<sup>3</sup> Lihat Frank Bsirske, "The Europe 2020 Strategy and the crisis", dalam Michael Sommer, Frank Bsirske & Wolfgang Rhode, *loc.cit.*, hal. 8-9.

<sup>4</sup> Pernyataan Kanselir Jerman, Angela Merkel dalam pidato di hadapan Parlemen Jerman, 26 Oktober 2011, dikutip dalam Manuel Schmitz, "Europe's interests in Indonesia: What is to gain from closer cooperation?", *the Indonesian Quarterly*, Jakarta: CSIS, Fourth Quarter 2011, Vol. 39, No. 4, hal. 430.



secara fiskal. Pada tataran *grassroots* protes keras rakyat Yunani dan Spanyol terjadi terhadap rencana pengetatan belanja publik pemerintah mereka. Di Perancis, kemenangan kubu sosialis yang dipimpin Francois Hollande juga dilatarbelakangi oleh resistensi rakyat Perancis terhadap rencana pengetatan anggaran publik yang didorong oleh kubu *incumbent* Nicholas Sarkozy.<sup>5</sup> Lebih dari itu, kuatnya resistensi rakyat terhadap program pengetatan belanja publik dan pemotongan insentif sosial lainnya berujung pada jatuhnya pemerintahan di Italia dan Portugal.

Sejalan dengan ketidakpastian tersebut, beberapa persoalan turunan lainnya yang terus menggelayut. Krisis keuangan UE juga berdampak pada potensi menurunnya komitmen UE baik secara nasional maupun kolektif dalam serangkaian program kerja sama pembangunan dengan negara-negara berkembang dalam penanganan isu-isu yang berdimensi global.

Dalam aspek kerja sama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim misalnya, implikasinya dapat dilihat dari perubahan pendekatan dalam merespon dan penanganan isu-isu perubahan iklim secara global. Beberapa kesepakatan dalam Konferensi Negara Pihak (COP) ke-17 Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Durban, Afrika Selatan pada akhir 2011 misalnya, mencerminkan implikasi tersebut. UE praktisi tidak akan melanjutkan komitmennya dalam skema komitmen kedua Protokol Kyoto jika negara-negara industri utama tidak menegaskan komitmen politiknya dalam kerangka *the Durban Platform for Enhanced Actions*, di bawah mana setiap negara pihak memutuskan untuk memulai proses negosiasi untuk menghasilkan sebuah protokol, sebuah instrumen legal lainnya atau skema kesepakatan lain yang berkekuatan hukum sampai 2015 yang berlaku bagi semua negara pihak. Fenomena ini semua tentunya akan semakin memposisikan Protokol tersebut di persimpangan jalan pasca-2012.

Diakui bahwa rangkaian negosiasi perubahan iklim telah menjadi sebuah rutinitas tahunan yang pada awalnya dilihat sebagai momentum berharga dalam mengelola isu perubahan iklim global. Namun demikian, konferensi itu tidak menghasilkan sebuah terobosan yang berarti. Artinya, persoalan peta jalan *global governance* untuk merespons perubahan iklim global masih terus berkuat.

Secara kolektif, UE menjadi salah kawasan yang telah berkontribusi besar terhadap emisi GRK global. Akibatnya, negara-negara berkembang pun mendorong Uni Eropa sebagai salah satu kawasan yang harus berperan aktif dalam masalah ini. Secara normatif, peran ini menjadi sesuatu yang sifatnya *taken for granted* karena tingkat emisi global harus diturunkan sebesar 50-

---

<sup>5</sup> Kompas, 29/5/2012.



85 persen dari tingkat emisi tahun 2000 di tahun 2050. Secara keseluruhan mereka yang jumlah penduduknya hanya 20 persen dari penduduk dunia telah menyumbang lebih dari 60 persen tingkat emisi aktual dan lebih dari 80 persen jika kontribusi historisnya diperhitungkan.<sup>6</sup> Konsekuensinya, upaya penurunan ini mengharuskan adanya pengorbanan yang lebih besar dari negara-negara industri yang telah berkontribusi terhadap tingkat emisi selama ini. Dalam kondisi di mana UE sedang mengalami krisis yang berkepanjangan, kita bisa memperkirakan sejauh mana dampaknya terhadap komitmen UE dalam merespons perubahan iklim.

Bab ini akan mengulas dampak krisis keuangan dan ekonomi UE terhadap komitmen politik UE secara kolektif dalam upaya mitigasi perubahan iklim baik dalam lingkup internal maupun dalam bentuk kerja sama mitigasi perubahan iklim dengan negara-negara berkembang. Kajian literatur yang bersifat deskriptif analitis dipusatkan pada kaitan antara krisis tersebut dengan kebijakan mitigasi/penurunan emisi UE. Dengan memperkirakan dampak perubahan kebijakan atau penurunan komitmen politik tersebut, konsekuensinya Indonesia perlu melakukan reorientasi kebijakannya dalam memenuhi komitmen global tersebut.

### **THE COPENHAGEN ACCORD DAN POLITIK PERUBAHAN IKLIM UE**

Kemajuan komitmen politik terobosan secara global dalam penanganan isu perubahan iklim dapat dilihat dari keputusan Konferensi Negara Pihak (COP) ke-15 atas Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark, 18 Desember 2009. Melalui kesepakatan politik yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kopenhagen (*Copenhagen Accord*), meskipun untuk sebagian kesepakatan ini sebagai *minimal trade-off* terutama bagi negara-negara berkembang, sejumlah kemajuan dapat dicapai. Secara politis, kemajuan dalam kerangka persetujuan itu misalnya, pengakuan politis bahwa perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global terbesar saat ini dan oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah komitmen politik yang kuat untuk segera melawan perubahan iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama tetapi dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing negara. Komitmen lain menyangkut pemahaman bersama atas temuan ilmiah bahwa untuk membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius, setiap negara harus menghapuskan skenario seperti biasanya (*business as usual*) dalam pelepasan tingkat emisi nasionalnya dan mengambil langkah-langkah terobosan luar biasa. Di samping itu, menyadari bahwa

<sup>6</sup> Lihat Chukwumerije Okereke, "Climate Justice and the international regime", in *WIREs Climate Change*, Vol. 1, May/June, 2010.



Protokol Kyoto adalah satu-satunya traktat yang global bersifat mengikat bagi negara-negara pengemisi utama dalam upaya penurunan GRK. Jadi, setiap negara harus mendorong untuk melanjutkan protokol tersebut.

Tidak diragukan bahwa COP-17 tersebut akan mengadopsi sebuah peta jalan *global governance* yang mengikat untuk menjaga kenaikan suhu bumi pada titik optimal rata-rata di bawah 2 derajat, tingkat yang secara arbitrer dinilai sebagai ambang batas bahaya bagi seluruh makhluk bumi. Di samping beberapa hasil studi sebelumnya, temuan studi Nicholas Stern yang dilakukan untuk Pemerintah Inggris juga menegaskan bahwa jika komunitas dunia gagal bertindak segera, ongkos yang dibutuhkan dari konsekuensi perubahan iklim akan jauh lebih besar skala resikonya.<sup>7</sup>

Dari sisi pembiayaan pun, Perjanjian Kopenhagen menyetujui bahwa negara-negara maju akan menaikkan dana sebesar US\$30 miliar selama periode 2010-2012 dari sumber-sumber baru dan tambahan. Secara global, melalui persetujuan itu juga, telah menyetujui untuk menyediakan dana \$100 miliar per tahun sampai dengan tahun 2020 dari berbagai sumber untuk membantu proses mitigasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.<sup>8</sup> Dalam rangka mobilisasi dana, Perjanjian itu juga menciptakan kelembagaan "Copenhagen Green Climate Fund", yang berfungsi sebagai entitas operasional mekanisme keuangan untuk mendukung berbagai proyek, program, kebijakan dan aktifitas lainnya yang berkaitan dengan upaya mitigasi di negara-negara berkembang.<sup>9</sup>

Komitmen tersebut menjadi momentum politik terbesar dan penting mengingat persoalan komitmen pembiayaan menjadi salah isu krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara global. Seperti kita ketahui bahwa persoalan pembiayaan menjadi salah satu persoalan yang paling krusial dalam mengatasi perubahan iklim secara global. Sebagai contoh, secara ilmiah banyak ahli menegaskan bahwa pengurangan emisi dari deforestasi hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang merupakan faktor yang sangat menentukan dari sisi efektifitas ongkos dalam upaya mitigasi GRK. Walaupun secara komparatif dari sisi ongkos paling efisien, dana yang dibutuhkan untuk menurunkan deforestasi juga cukup signifikan. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa untuk menghentikan emisi dari deforestasi diperlukan dana berkisar dari USD 15-33 miliar per tahun. Laporan *the Eliasch Review* (2008), yang berjudul *Financing Global Forests*, menyatakan bahwa untuk mendanai upaya pengurangan separuh deforestasi secara global diperlukan dana kira-kira USD 8-26 miliar per tahun sampai 2020.

<sup>7</sup> Lihat Des Gasper, "The Human Security Approach as a Frame for Considering Ethics of Global Environmental Change", *IHDP Update*, Issue 2 (Bonn: June 2009): 14-18.

<sup>8</sup> Decision 2/CP.15 on Copenhagen Accord, dalam <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=4>; diakses 29/5/2012.

<sup>9</sup> *Ibid.*



Perkiraan lain mematok angka yang kurang lebih sama, antara USD 12-35 miliar per tahun.<sup>10</sup>

Ironisnya, sumber pendanaan publik sangat tidak mencukupi. Sebagai contoh, antara tahun 2000-2005, dana bantuan pembangunan publik (ODA) pada sektor kehutanan berjumlah kurang dari €600 juta per tahun (Simula, 2008).<sup>11</sup> Diakui bahwa komitmen keuangan hasil Perjanjian Kopenhagen telah mengalami kenaikan beberapa kali dari komitmen sebelumnya. Namun demikian, jumlah komitmen tersebut nilainya masih sepertiga dari perkiraan kebutuhan anggaran minimal yang dibutuhkan. Belum lagi, skenario pembiayaan akan lebih buruk jika kita mempertimbangkan sifat ODA yang kemungkinannya sangat rentan (*volatile and highly cyclical*) dan sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan politik serta persepsi stabilitas keuangan secara global.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, peran UE dalam penanganan perubahan iklim secara global relatif signifikan. Untuk memahami hal ini, perannya dapat dilihat dari arah kebijakannya dalam konteks pemenuhan komitmen penurunan emisi GRK berdasarkan skema Protokol Kyoto sebagai negara-negara pihak yang masuk dalam Annex-1 UNFCCC.

*Pertama* terkait dengan kontribusi emisi negara-negara yang tergabung dalam EU secara relatif terhadap tingkat emisi global, dan arah kebijakan dan upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan tingkat emisi GRK-nya. Dari 31,3 miliar ton tingkat emisi global pada tahun 2009, meningkat 25 persen sejak 2000, atau hampir 40 persen sejak 1990, EU menjadi emiter terbesar ke-3 setelah Cina dan AS, atau setara dengan 44 persen emisi negara-negara industri pada tahun 2009.<sup>13</sup> Kecenderungan emisi GRK menunjukkan bahwa 27 negara anggota EU (EU-27) kini tercatat sekitar 12 persen dari tingkat emisi tahunan antropogenik GRK secara global (tidak termasuk sektor tata guna lahan, alih fungsi lahan dan kehutanan (*land use, land use change and forestry/LULUCF*), atau dihitung dengan deforestasi, angkanya berkisar 11

<sup>10</sup> Lihat Naomi Swickard dan Kim Carnahan, "Integrating Project and National REDD+: the Important of the Private Sector", *Pathways for Implementing REDD+, Experiences from Carbon Markets and Communities*, Perspectives Series 2010, Copenhagen: UNEP Riso Centre, 2011, hal. 73.

<sup>11</sup> Lihat Charlotte Streck, "Financing REDD+ and the Role of Carbon Markets", dalam, *Pathways for Implementing REDD+, Experiences from Carbon Markets and Communities*, Perspectives Series 2010, Copenhagen: UNEP Riso Centre, 2011, hal. 67. Lihat juga Swickard dan Carnahan, *op.cit*.

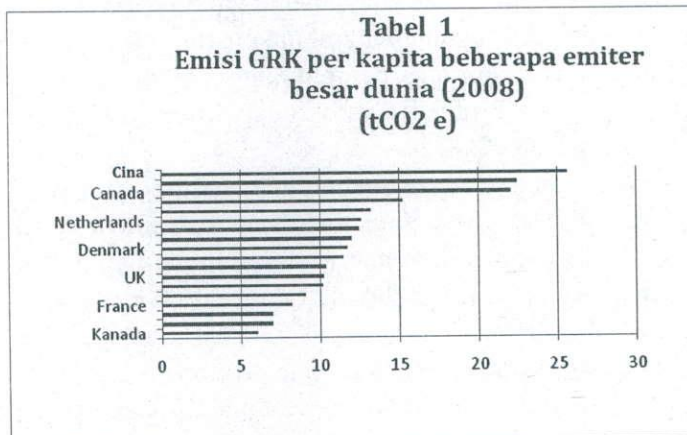
<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Lihat "Global GHG Emissions Remained Stable in 2009", dalam <http://www.environmentalleader.com/2010/07/02/global-ghg-emissions-fell-7-in-2009/>; diakses, 28 September 2011.



persen.<sup>14</sup> Dilihat dari emisi per kapita rata-rata, emisi EU tahunannya berkisar 9,6 tCO<sub>2</sub>e (tidak termasuk LULUCF) dan angka ini masih di atas tingkat rata-rata emisi per kapita dunia yang mencapai sekitar 6,7tCO<sub>2</sub>e.<sup>15</sup> Pada tahun 2008, emisi per kapita tahunan EU berkisar 1 tCO<sub>2</sub>e.<sup>16</sup> Secara komparatif, bagaimanapun, angka ini masih di bawah tingkat emisi beberapa emiter terbesar dunia lainnya.

Laporan sebuah lembaga pemeringkat lingkungan di Belanda tahun 2010 (*Netherlands Environmental Assessment Agency*) mengindikasikan bahwa emisi per kapita AS adalah 17 tCO<sub>2</sub>e, turun dari 19,95 tCO<sub>2</sub>e pada tahun 1990. Data emisi tahun 2008 menunjukkan bahwa emisi per kapita Kanada mencapai kira-kira 22,05 tCO<sub>2</sub>e dan Australia berada pada tingkatan tertinggi, yakni kira-kira 25,64 tCO<sub>2</sub>e. Sementara emisi tahunan per kapita Cina kira-kira 6,1 tCO<sub>2</sub>e, emisi yang sama di India sekitar 1,4 tCO<sub>2</sub>e (Tabel 1).<sup>17</sup>



Sumber: CBC, 2011 and \*NEAA, 2010.

Dalam kurun waktu beberapa tahun, bagaimanapun, rata-rata (*trend*) emisi EU menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Hal ini sebagian diakibatkan oleh resesi ekonomi dan menurunnya tingkat konsumsi per kapita, dan komitmen politik kawasan itu. Pada tahun 2007, misalnya, melalui

<sup>14</sup> Berbeda dengan gambaran secara global, sektor LULUCF UE adalah penyerap netto (net sink)---dalam hal ini bukan sumber netto emisi---karena signifikansi kondisi (build-up) stok karbon di hutan-hutan Eropa sejak 1990. Lihat European Environment Agency (EEA), 2011. *The European Environment---State and outlook 2010, Mitigating Climate Change, Thematic Assessments*, Copenhagen, 2011, hal. 9.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 11. Hal ini setara dengan pengurangan bersih 295 juta tCO<sub>2</sub>e.

<sup>16</sup> EEA, *The European Environment --- State and Outlook 2010, Synthesis*. Copenhagen, 2011, hal. 28.

<sup>17</sup> Disunting dalam <http://www.conferenceboard.ca/hcp/Details/Environment/greenhouse-gas-emissions.aspx>; diakses, 5 November 2011

sebuah paket legislasi, yakni *the Climate and Energy package* yang disahkan pada bulan April 2009, EU-27 menyetujui sebuah target pengurangan yang mengikat secara sukarela (*voluntary binding reduction target*) sampai setidaknya 20 persen sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan tahun 1990 sebagai tahun acuan. Komitmen ini akan terus meningkat sampai 30 persen jika emiter terbesar secara global non-EU mau melakukan komitmen yang sebanding berdasar sebuah persetujuan iklim global.

Data menunjukkan bahwa pengurangan emisi EU-27 terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan pengurangan emisi negara-negara EU-15, yakni mencapai 11,3% di bawah tahun acuan tahun 1990 pada tahun 2008, dan menurut estimasi Badan Lingkungan Eropa (EEA), yakni mencapai 17 persen tahun acuan tahun 1990 pada tahun 2009.

Sebagai perbandingan, berdasarkan ketentuan Protokol Kyoto, negara-negara anggota EU-15 diwajibkan untuk mengurangi tingkat emisi sampai 8% dibandingkan tingkat tahun acuan tahun 1990 selama periode komitmen pertama Protokol tersebut selama tahun 2008-2012. Pada tahun 2008, emisi negara-negara anggota EU-15 tercatat 6.9% secara relatif terhadap tahun acuan 1990, dan angka ini diprediksikan akan terus menurun sampai 13% di bawah tahun acuan 1990 pada tahun 2009.

Sementara berdasar pada cadangan (*inventory*) GRK pada tahun 2010, negara-negara anggota EU-15 masih perlu mengurangi tingkat emisi rata-ratanya mencapai 341 juta tCO<sub>2</sub>e antara tahun 2008-2012 untuk memenuhi target periode komitmen pertama Protokol Kyoto.<sup>18</sup> Secara keseluruhan, angka-angka pencapaian di atas menegaskan bahwa negara-negara anggota EU-15 sudah berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target komitmen protokol itu.<sup>19</sup>

Porsi terbesar pengurangan emisi GRK yang dicapai Eropa dalam dua dekade terakhir merupakan konsekuensi kombinatif dari hasil restrukturisasi ekonomi terutama di Eropa Timur. Serangkaian kebijakan dan langkah yang ditargetkan untuk mengurangi emisi, antara lain melalui Skema Perdagangan Emisi EU (EU-ETS) berdasarkan kebijakan *the Climate Action and Renewable Energy package* dan dampak jangka pendek krisis ekonomi global.<sup>20</sup> Dalam

<sup>18</sup> EEA, *Assessments European Environment, State and outlook 2010, Mitigating ...*, op.cit., hal. 11. Hal ini bisa dicapai melalui kombinasi kebijakan dan langkah-langkah domestik yang ada sekarang dan direncanakan, dan dengan menggunakan mekanisme Protokol Kyoto dan penyerap karbon (carbon sinks).

<sup>19</sup> EEA, 2009. GHGs emission trends and projections in Europe 2009. EEA Report No. 9/2009. Perubahan emisi GRK ini tidak termasuk emisi bersih dari sektor LULUCF, penerbangan dan navigasi maritim.

<sup>20</sup> EEA, *The European Environment, State and Outlook 2010, Mitigating ...*, op.cit. hal. 44-24.



kaitannya dengan komitmen EU terhadap Kyoto Protocol, negara-negara anggota EU-15 telah menyetujui sebuah perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian bagi-beban yang mencakup target pembatasan atau pengurangan emisi yang dibedakan di antara sesama negara anggota EU. Juga, yang lebih penting lagi, dari 12 tambahan negara yang belum menjadi anggota EU ketika Protokol itu diratifikasi, 10 negara telah menegaskan komitmennya untuk memenuhi target individual berdasarkan Protokol itu. Di samping itu, beberapa negara Eropa yang secara geografis dekat tetapi bukan anggota UE, seperti Iceland, Lietchtenstein, Norwegia dan Switzerland juga telah menetapkan komitmennya terhadap skema target individual tersebut.<sup>21</sup>

*Kedua*, peran EU dalam pembiayaan. Di bawah skema program UN-REDD, sebagai contoh, sejak program itu dilansir pada tahun 2008, Komisi Eropa telah menjanjikan kira-kira USD 14 juta (€10 juta). Pembiayaan yang dijanjikan oleh negara-negara EU secara individual juga signifikan. Denmark, misalnya, tercatat menjadi donor terbesar yang bergabung dengan UN-REDD Programme, dengan komitmen pendanaan senilai USD 2 juta pada tahun 2009 dan USD 6 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2009, Spanyol juga telah mengumumkan janjinya senilai USD 20,2 juta untuk periode 3 tahun dan telah menetapkan untuk mencairkan senilai USD 1,4 juta pada tahun 2010. Di samping itu, komitmen pembiayaan juga datang dari negara non-EU lainnya. Norwegia, misalnya, terus memposisikan dirinya sebagai donor pertama dan terbesar UN-REDD Programme.<sup>22</sup> Sejak 2008, Norwegia telah menjanjikan dukungan dana senilai USD 52,2 juta pada tahun 2008-2009, dan senilai USD 31 juta pada tahun 2010. Dalam skema pendanaan non-publik (*voluntary base*), pada tahun 2010 Norwegia juga telah menjanjikan senilai USD 1 miliar untuk program kerja sama kemitraan berbasis kinerja dalam program REDD+ dengan Indonesia untuk periode 10 tahun (2010-2020). Sebagai negara donor utama program REDD di Indonesia, Norwegia menyatakan komitmen kuatnya untuk menyelesaikan kerja sama kemitraan tsb. Dalam sebuah pidato pembukaan dalam forum seminar kehutanan internasional di Jakarta, akhir September 2011 misalnya, PM Norwegia, Erik Solheim menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

*"Let me promise that Norway will be with Indonesia in this regard ..... we will do our best to make certain that the president can deliver on his promise. That's why I was so moved by the leadership shown by Indonesia,....., in outlining the strategy for Indonesia to reach its climate emission targets, ..... taking Indonesia step by step in the right direction."*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>22</sup> Disunting dalam [http://unfccc.int/methods\\_science/redd/demonstration\\_activities/items/4536.php#unredd](http://unfccc.int/methods_science/redd/demonstration_activities/items/4536.php#unredd); diakses, 27 September 2011.

<sup>23</sup> Disunting dalam <http://www.forestsclimatechange.org/fileadmin/downloads/f-indonesia/Erik%20Solheim%C2%92s%20opening%20session%20speech.pdf>; diakses 15 Oktober 2011.



Beberapa negara EU, secara bilateral maupun atas dasar skema non-publik, telah menyatakan komitmennya kepada beberapa negara berkembang dukungan pendanaan untuk upaya mitigasi dan program mengatasi perubahan iklim. Pada tahun 2011, sebagai contoh, sebagai bagian dari komitmen internasionalnya terhadap perlindungan iklim, Pemerintah Jerman telah menyetujui pendanaan beberapa proyek senilai €23 juta untuk REDD di Indonesia.<sup>24</sup>

Pesan penting dari situasi di atas adalah bahwa peran EU-15 dan upaya pengurangan emisi berbasis sukarela dalam memenuhi target penurunan tingkat emisi dan komitmen pendanaan terkait lainnya dapat menjadi sebuah model peran UE dalam mitigasi perubahan iklim. Hal ini juga sekaligus dapat sebagai sarana imperatif khususnya bagi negara-negara emiter besar global baik negara-negara industri maupun negara-negara yang mulai tumbuh perekonomiannya dalam upaya mitigasi secara global. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa apa yang telah dicapai EU telah mencukup untuk menjamin bahwa upaya pencapaian ambisi global untuk menahan kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius relatif terhadap era pra-industri atau pada level yang lebih dinilai secara arbitrer sebagai batas ambang berbahaya bagi umat manusia. Pertanyaannya adalah sejauh mana pengaruh krisis ekonomi Eropa terhadap kelanjutan komitmen mereka secara kolektif dalam upaya penurunan emisi/perubahan iklim akan tergambar dari kebijakan dan posisi politik UE dalam forum kovensi perubahan iklim berikutnya di Cancun, Meksiko dan terakhir Durban. Karena alasan ruang, kebijakan dan posisi politik UE dalam forum kovensi perubahan iklim akan difokuskan pada forum COP-17 di Durban, Afrika Selatan tahun 2011.

## **PARADIGMA TATA KELOLA GLOBAL: INKLUSIVISME PARTISIPATORIS**

Pidato Menlu Jerman Guido Westerwelle dalam peluncuran sebuah cetak strategis (*strategy paper*) yang berjudul *Shaping Globalization—Expanding Partnerships—Sharing Responsibility* di Kementerian Luar Negeri Federal Jerman, 8 Februari 2012 lalu menyiratkan, setidaknya-tidaknya dari satu negara yang memiliki daya tawar penting di UE, bahwa pengelolaan isu-isu yang berdimensi global (*global governance*) ke depan memerlukan adanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu mencakup cara pandang yang tidak lagi berpusat pada satu atau kelompok kekuatan dunia secara politik dan ekonomi yang direpresentasikan oleh negara-negara industri maju tetapi juga mencakup semua kekuatan di belahan dunia lainnya.

<sup>24</sup> "Jerman Hibahkan RI 166,5 Juta Euro untuk *Green Energy*"; dalam <http://economy.okezone.com/read/2011/10/22/19/518881/jerman-hibahkan-ri-166-5-juta-euro-untuk-green-energy>; diakses, 1 November 2011.



Arti penting perubahan paradigma ini sangat terkait dengan fenomena globalisasi dan munculnya beberapa kekuatan ekonomi baru di luar UE dan AS. Secara ekonomis, Cina telah menjadi kekuatan terbesar kedua di dunia. Kasus yang sama bagi Brasil yang telah melampaui Inggris. Dinamisme perekonomian mereka menjadikan cadangan devisa mereka lebih besar daripada negara-negara industri dan akibatnya mereka juga sekaligus sebagai kontributor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dunia. Arti penting lainnya terkait dengan fenomena yang tidak dapat dielakkan sebagai akibat adanya globalisasi, yakni adanya serangkaian peluang dan tantangan atau isu-isu baru yang mengharuskan adanya lebih banyak kerja sama secara inklusif dan partisipatoris bagi semua aktor globalisasi.

Dengan demikian, segenap aktor yang memiliki posisi struktural yang kuat dalam sistem tata dunia perlu bekerja sama dalam mengelola isu-isu global.<sup>25</sup> Dalam konteks perdebatan isu penegakan keadilan iklim misalnya, upaya mempertahankan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat selsius, tingkat penurunan emisi global dipatok pada angka 50-85 persen dari tingkat emisi tahun 2000 pada tahun 2050.<sup>26</sup> Konsekuensinya, upaya ini mengharuskan pengorbanan yang besar dari negara-negara khususnya yang memberikan kontribusi baik secara historis maupun proyektif terhadap emisi global.<sup>27</sup>

Dalam isu perubahan iklim, tekanan akan sebuah tata kelola global yang bersifat inklusif dan partisipatoris bisa dilihat dalam konteks komitmen politik penurunan tingkat emisi GRK. Berdasarkan skema *Copenhagen Accord* hasil COP-15 tahun 2009, sejumlah emiter terbesar atau 80% dari tingkat emisi global telah menetapkan target penurunan emisi sampai tahun 2020 yang sifatnya sukarela dihitung dari tahun acuan perhitungan yang berbeda-beda (*base year*). Sejumlah emiter itu mencakup AS, Jepang, Kanada, Cina, India, Indonesia dan sejumlah negara pengimisi lainnya.

Pada tahun 2007, UE telah menetapkan melalui sebuah paket legislasi, yakni *the Climate and Energy package* yang disahkan pada bulan April 2009, target penurunan emisi yang mengikat secara sukarela setidaknya-tidaknya

<sup>25</sup> Lihat Ashwani Kumar and Dirk Messner, "Introduction Global Governance: Issues, Trends and Challenges", in Ashwani Kumar and Dirk Messner (eds.), *Power Shifts and Global Governance, Challenges from South and North* (London: Routledge, 2011), hal. 7.

<sup>26</sup> Isu keadilan iklim fokus pada tiga isu, yakni: kompensasi atas kesalahan masa (*compensatory justice*), distribusi tanggung jawab sekarang dan yad (*distributive justice*), dan adopsi prosedur yang adil kerangka kerja inklusif dalam proses mencapai keputusan (*procedural justice*). Lihat Chukwumerije Okereke, "Climate Justice and the international regime", dalam *WIREs Climate Change*, Vol. 1, May/June, 2010, hal. 464.

<sup>27</sup> Dalam konteks ini, negara-negara kaya seharusnya bertanggung terhadap 60% emisi yang GRK saat ini dan lebih dari 80% jika kontribusi masa lalunya dihitung. Okereke, *op.cit.*, dalam Betsill MM., et al (eds). *International Environmental Politics* (Macmillan, 2006).



sebesar 20 persen sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan tahun 1990 sebagai tahun acuan. Dengan merujuk pada komitmen *Copenhagen Accord*, nilai penurunannya bahkan akan mencapai 30 persen jika emiter terbesar secara global non-EU mau melakukan komitmen yang sebanding berdasar sebuah persetujuan iklim global. Dalam forum COP-15 di Kopenhagen, Inggris sebagai anggota EU juga menegaskan bahwa *Copenhagen Accord* perlu dijadikan sebagai komitmen yang mengikat secara hukum.<sup>28</sup>

Pola/dorongan ke arah kolaborasi juga dilihat dalam persetujuan terakhir dalam forum COP-17 di Durban, Desember 2011 yang lalu. Sebagai regime global satu-satunya yang mewajibkan pemotongan GRK, posisi EU sangat jelas bahwa tanpa adanya komitmen dari AS, Cina, Jepang, Rusia, India dan beberapa negara pengemisi besar lainnya dalam rentang waktu yang rasional, EU tidak akan mendukung komitmen kedua Protokol Kyoto. Seperti kita ketahui bahwa Kanada menarik diri dari Protokol Kyoto. Rusia dan Jepang memutuskan tidak akan terlibat dalam komitmen kedua Protokol. Dalam kondisi demikian, akan sulit mendapatkan partisipasi dari negara-negara berkembang utama lainnya terhadap kelanjutan skema komitmen penurunan emisi.<sup>29</sup>

EU pada akhirnya tetap berkomitmen untuk terikat dengan skema komitmen kedua tersebut setelah disepakatinya hasil COP-17 di Durban, *the Durban Platform for Enhanced Action*, di bawah mana setiap negara pihak memutuskan untuk memulai proses negosiasi untuk menghasilkan sebuah protokol, sebuah instrumen legal lainnya atau skema kesepakatan lain yang berkekuatan hukum paling lambat tahun 2015. Bagi EU, *the Durban Platform* membuka ruang terciptanya sebuah mekanisme pengurangan emisi yang mengikat secara hukum yang mengikat semua pengemisi utama.

Sebaliknya, persetujuan EU untuk terikat melaksanakan komitmen kedua Protokol Kyoto juga mengakomodasi tuntutan negara-negara pengemisi besar lainnya seperti Cina, India, Brasil, Afrika Selatan dan beberapa negara berkembang lainnya bahwa negara maju harus terlebih dahulu menunjukkan berkomitmennya. Dengan demikian, terjadi sebuah *trade-off* bagi terciptanya sebuah upaya tata kelola isu-isu global bersama.

Namun demikian, hal ini bukan berarti tidak ada sikap pesimisme atas hasil negosiasi tersebut. Pesimisme ini untuk sebagian terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh suatu negara di tengah-tengah situasi yang amat mudah berubah dalam kurun waktu yang cepat karena isu-isu ekonomi, perbedaan politik dan prioritas dan strategi yang berbeda-beda dalam merespon

<sup>28</sup> "Copenhagen deal reaction in quotes". BBC News. 19 December 2009; retrieved 19 Desember 2009; dikutip dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen\\_Accord](http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Accord); diakses (9/4/12)

<sup>29</sup> *The Guardian*, 8/12/11 (sumber online).



perubahan iklim.<sup>30</sup> Secara umum, berbagai keputusan yang diambil di KTT Durban masih bagaimana pun menggarisbawahi arti pentingnya sebuah rezim yang mengikat sebagai esensi mekanisme dalam tata kelola global. Atau setidaknya-tidaknya, hasil yang dicapai di Durban merefleksikan sebuah proses formal yang mendalam dan melebar dari mekanisme tersebut.<sup>31</sup>

Secara normatif seruan kolaborasi inklusif dan partisipatoris juga dilakukan sekutu dekat UE, yakni AS. Ringkasan buku Robert Repetto *America's Climate Problem, the Way Forward* (2011) mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan dan gagal dilakukan AS dalam beberapa tahun ke depan akan sangat menentukan terhadap nasib bumi dan manusia ke depan. AS mengakui tidak mampu bertindak sendiri dan negara-negara lain tidak akan mengambil tindakan jika AS tidak memimpin.<sup>32</sup> Hal yang sama ditegaskan utusan khusus AS untuk Perubahan Iklim, Todd Stern, bahwa semua negara harus terlibat penuh dalam mendorong sebuah persetujuan global yang kuat dan merespon tantangan iklim. Ketika menekankan pentingnya arah tindakan yang kuat secara internasional, Stern menegaskan: *"The science is clear, and the threat is real. The facts on the ground are outstripping the worst case scenarios. The costs of inaction—or inadequate actions—are unacceptable."*<sup>33</sup>

Sebelumnya, seruan kolaborasi inklusif dan partisipatoris juga menjadi salah satu alasan penolakan AS untuk meratifikasi Protokol Kyoto. AS mendasarkan pada satu argumen bahwa sementara implikasi perubahan iklim dan efek buruknya tidak dapat dikenali pada masa lampau, kiranya akan adil jika upaya penurunan emisi global dilakukan berdasarkan pada emisi saat ini.<sup>34</sup> Pandangan menyiratkan bahwa beberapa emiter besar perekonomian berkembang (*emerging economies*) seperti Cina, India, Brasil dan sejumlah negara berkembang lainnya juga harus memikul tanggung jawab.

Sebaliknya, kubu negara-negara berkembang berdalih bahwa sejak era industrialisasi negara-negara industri telah mengeluarkan kuota emisi yang

<sup>30</sup> *The Guardian*, 8,11/12/11 (sumber online).

<sup>31</sup> Kumar and Messner, *op.cit.*

<sup>32</sup> [http://www.earthscan.co.uk/tabid/102581/Default.aspx#dnn\\_ctr287409\\_ViewProductInfo\\_fragment3](http://www.earthscan.co.uk/tabid/102581/Default.aspx#dnn_ctr287409_ViewProductInfo_fragment3); diakses 27 Oktober 2011.

<sup>33</sup> Disunting dalam <http://www.state.gov/s/climate/index.htm>; diakses 27 Oktober 2011.

<sup>34</sup> Lihat Daniel Murdiyarso. *Protokol Kyoto, Implikasinya bagi Negara Berkembang* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 26-27. The Netherlands Environmental Assessment Agency (NEAA) melaporkan sementara Cina telah menaikkan emisinya dua kali lipat, India telah menaikkan sampai 59% sejak 2000. Tahun 2009, emisi India mengalahkan Rusia sebagai emiter ke-4 terbesar setelah Cina, AS dan UE-15. Sejak 2000, emisi GRK secara total naik 25% menjadi 31,3 milyar ton dan hampir 40% sejak 1990 (tahun basis Protokol Kyoto). Lihat "Global GHG Emissions Remained Stable in 2009", dalam <http://www.environmentalleader.com/2010/07/02/global-ghg-emissions-fell-7-in-2009/>; diakses, 28 September 2011.



berdampak pada kondisi perubahan iklim yang tidak terbantahkan secara keilmuan. Konsekuensinya, mereka harus mengambil porsi beban yang paling besar dalam upaya penurunan emisi global. Dalam konteks inilah, dapat dipahami ketika perdebatan tentang keadilan iklim tidak pernah selesai dalam tataran bagaimana mencari sebuah upaya rekonsiliatif dalam menjembatani dua pandangan yang berbeda. Dengan demikian, hasil akhir negosiasi dalam kerangka hasil keputusan di Durban pun belum menjamin akan dapat mengikat semua negara industri terutama AS, Kanada, Rusia, Jepang dan bahkan negara-negara industri seperti Cina dan India.

### REORIENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI INDONESIA

Secara relatif, krisis keuangan yang melanda UE telah memberikan dampak terhadap komitmen kawasan itu dalam upaya menangani isu perubahan iklim dan akibatnya komitmen penurunan emisi secara ekstra-kawasan. Penurunan komitmen secara ekstra-kawasan bahkan sudah terlihat pada masa-masa sebelum krisis keuangan melanda UE. Indikasi ini dapat ditemui misalnya, dalam berbagai perdebatan soal disain *global framework* dalam forum negosiasi perubahan iklim global khususnya dalam aspek komitmen dukungan pembiayaan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang dan seruan atas partisipasi mereka dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Dilihat dari tingkat kepentingannya untuk mengatasi perubahan iklim, UE sebenarnya berambisi bahwa pada tahun 2020 akan menurunkan 20 persen emisi dari tingkat emisi tahun 1990 dan meningkatkan andil energi diperbarui dalam kebijakan bauran energi sampai dengan 20 persen. Dalam sektor transportasi, targetnya menaikkan andil biofuel sampai dengan 10 persen meskipun kekuatan sipil UE mempersoalkan tingginya ongkos sosial dan ekologis seperti rusaknya hutan untuk perkebunan sawit di negara-negara berkembang, misalnya di Indonesia.<sup>35</sup>

Pertanyaannya, apakah situasi seperti ini akan berdampak terhadap komitmen dukungannya kepada Indonesia dalam penanganan isu perubahan iklim khususnya pada upaya penurunan emisi GRK? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki daya tawar secara politis meskipun tidak dipersepsikan sama strategisnya dengan Cina, India dan Jepang.<sup>36</sup> Dalam skema *reducing emission from deforestation and forest degradation* (REDD) misalnya, beberapa perkembangan terbaru menunjukkan bahwa aktifitas REDD di bawah program

<sup>35</sup> Lihat Manuel Schmitz, *Europe's interests in Indonesia: What is to gain from closer cooperation?*, *the Indonesian Quarterly*, Jakarta: CSIS, Vol.39, No. 4, Fourth Quarter 2011, dalam Oliver Pye *Peripherie*, No. 112 (2008), hal. 428.

<sup>36</sup> *Ibid.*



*REDD readiness* dan *demonstration activities* (REDD-DA dan REDD-RA) telah dijalankan di hampir semua benua. Data tahun 2009 menunjukkan sekurang-kurangnya 79 REDD-RA dan 100 REDD-DA telah dijalankan. Di Indonesia, 34 proyek REDD-DA dan 20 REDD-RA sedang dijalankan, menempatkan Indonesia sebagai rintisan pelaksanaan perintisan REDD terbesar sekaligus menjadi insentif bagi pelebagaan REDD yang lebih mengikat ke depan.<sup>37</sup>

Sejalan dengan pandangan bahwa ketika globalisasi menuntut adanya pendekatan global dalam menangani isu-isu global, kolaborasi dalam tata kelola global dalam isu perubahan iklim pun menjadi kebutuhan mendesak. UE yang memposisikan dirinya sebagai pemeran penting dalam isu perubahan iklim, penguatan kemitraan global dengan negara-negara yang telah dan pantas memberikan kontribusi dalam masalah itu juga menjadi penting. Peran Indonesia di ASEAN, kelompok negara-negara G-20 dan 'asertifisme' Indonesia dalam menyuarakan posisi negara-negara berkembang dan dalam upaya mitigasi perubahan iklim cukup menjadi indikasi kuat daya tawar tersebut.<sup>38</sup> 'Asertifisme' itu mencakup misalnya, komitmen global Indonesia dalam menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan kemampuan sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional sampai tahun 2020. Dengan demikian Indonesia berpeluang berpartisipasi dalam upaya global mitigasi emisi GRK. Pengurangan 1,20 Gt CO<sub>2</sub> emisi Indonesia (41 persen) sampai 2020 akan setara dengan 8 persen pengurangan emisi di tingkat global yang dibutuhkan dalam mempertahankan kenaikan suhu global kurang dari 2 derajat celsius.

Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa krisis keuangan dan ekonomi UE tidak mempengaruhi sama sekali kebijakan mereka terhadap Indonesia dalam isu penanganan perubahan iklim secara umum. Secara umum, skenario dampak domino atas krisis keuangan EU, baik secara ekonomi dan politis serta asertifisme UE atas sebuah kondisionalitas yang disampaikan kepada emiter besar non-EU dalam upaya penurunan target emisi sampai tahun 2020 mencerminkan hal ini. Indikasinya bisa dilihat sejauh mana tindak lanjut komitmen pendanaan per tahun sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kopenhagen baik dalam skema komitmen dana keras senilai USD 30 miliar selama 2010-2012 dan komitmen tambahan senilai USD 100 miliar per tahun sampai 2020.

Secara lebih spesifik, dengan adanya kesadaran para pemimpin negara-negara maju bahwa krisis ekonomi dan keuangan secara internasional menjadi

<sup>37</sup> Lihat Gillian A. Cerbu, Brent M. Swallow, and Dara Y. Thompson, "Locating REDD: A global survey and analysis of REDD readiness and demonstration activities", *Environmental Science & Policy* 14 (2011) (sumber online).

<sup>38</sup> *Ibid.*



tantangan terbesar dan terbesar abad ini akan berdampak pada semakin beratnya pengelolaan isu pemanasan global, apalagi pada saat yang sama bahwa sumber pendanaan yang tersedia secara global dalam penanganan perubahan iklim masih jauh dari yang dibutuhkan. Atas dasar inilah, Sekjen PBB misalnya, telah membentuk sebuah tim penasehat tingkat tinggi '*High-level Advisory Group on Climate Change Financing*' (AGF) pada tahun 2010 yang bertugas untuk melakukan studi tentang upaya mobilisasi sumber pembiayaan potensial dalam meningkatkan sumber-sumber pembiayaan baru dan tambahan, termasuk mekanisme pembiayaan inovatif, dari negara-negara maju untuk kegiatan penanganan perubahan iklim di negara-negara berkembang.<sup>39</sup>

Salah satu rekomendasi studi AGF menunjukkan bahwa sebuah kondisionalitas bagi dukungan pembiayaan penanganan perubahan iklim di negara-negara berkembang menjadi konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. Contoh kasus, AGF telah menentukan kriteria untuk sumber-sumber pembiayaan baru dalam isu MRV dan persyaratan dalam proyek pengurangan emisi GRK di negara-negara berkembang. Di samping persoalan di atas, potensi menurunnya dukungan finansial negara-negara maju kepada negara-negara berkembang juga diakibatkan oleh belum adanya sebuah kerangka legal yang sifatnya komprehensif dan mengikat dalam konteks negosiasi perubahan iklim.

Situasi paradoksalnya, kemajuan negosiasi tersebut selama ini tidak sepadan dengan situasi darurat bagi sebuah tindakan dalam melawan perubahan iklim.<sup>40</sup> Secara akademis, hal ini sejalan dengan kesimpulan studi Nicholas Stern (2006) bahwa ongkos ekonomis yang ditanggung akan semakin tidak terjangkau jika dunia menunda sebuah kesepakatan mengikat bersama dalam upaya mengelola perubahan iklim secara global. Hasil kajian yang sama juga dilakukan IPCC tahun 2007 bahwa untuk menjaga suhu bumi tidak naik melebihi 2 derajat selsius dari masa pra-industri, tingkat emisi global harus diturunkan sampai dengan 80 persen pada tahun 2050. Alasan lain terkait dengan fenomena *trade-off* UE dengan emiter besar global lainnya.

Lalu bagaimana Indonesia perlu menyikapi hal ini? Di sinilah reorientasi kebijakan penurunan emisi dan perubahan iklim Indonesia diperlukan. *Pertama*, reorientasi dipusatkan pada upaya Indonesia mengawal secara intensif baik secara diplomatis maupun politis proses pelembagaan sebuah rezim global yang sifatnya mengikat bagi semua emiter besar dunia. Arena

<sup>39</sup> Lihat Frank Schroeder, "A Shot in the Arm for Climate Finance?, New Directions for Delivering on International Pledges and Development", FES Study, Dec. 2010, hal. 2-3.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 2.



pertama yang perlu ditingkatkan asertifisme Indonesia adalah forum negosiasi di bawah UNFCCC dalam merealisasikan mandat hasil COP-17 di Durban sampai tahun 2015.

Arti strategis dari keberhasilan proses negosiasi dalam skema ini akan sangat menentukan sampai sejauh mana derajat komitmen emiter besar dunia dalam upaya penurunan emisi global ke depan terutama bagi mereka yang selama ini cenderung menggunakan proses negosiasi di UNFCCC sebagai sarana *buying time*. Seperti kita ketahui bahwa mandat skema itu merupakan titik simpul di mana semua negara pengemisi besar dunia, paling lambat tahun 2020, terikat untuk menurunkan emisi yang berlaku bagi semua negara pihak, termasuk emiter besar seperti AS, Rusia, Jepang, Kanada dan lain-lain. Keberhasilan proses negosiasi ini akan menentukan sejauh mana krisis iklim dapat dikelola lebih tepat waktu. Jika sebaliknya, tentunya UE akan memainkan kartunya. Seperti kita ketahui bahwa kesepakatan di Durban merupakan sebuah “trade-off” antara UE dengan negara-negara emiter besar dunia lainnya yang tidak mau terikat dengan skema komitmen kedua Protokol Kyoto. Kegagalan proses negosiasi tersebut dapat berpotensi pada mundurnya komitmen UE dalam penurunan emisi. Skenario pahitnya, UE bahkan bisa mengundurkan diri dari skema komitmen kedua Protokol Kyoto. Preseden mundurnya Jepang, Kanada dan Rusia dari skema komitmen kedua itu bisa menjadi alasan yang kuat bagi UE dan negara-negara emiter besar lainnya akan melakukan hal yang sama.

*Kedua*, peran Indonesia dalam mendorong secara aktif upaya pemenuhan komitmen pembiayaan global bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan iklim membawa tantangan yang paling besar bagi negara-negara berkembang terutama dari sisi pembiayaan. Dalam situasi perekonomian dunia yang tidak kondusif terutama di negara-negara industri dan krisis politik berkepanjangan di Timur Tengah, dan kini krisis keuangan di UE, persoalan pembiayaan akan semakin krusial. Dalam situasi seperti ini, upaya mobilisasi dana publik secara global akan sulit. Oleh karena itu, dalam kondisi kesulitan fiskal di UE dan beberapa negara maju lainnya, skenario pesimisme akan semakin bertambah ketika komitmen pendanaan yang sudah ditetapkan negara-negara maju ditarik. Lagi-lagi, skenario “hollow promise” harus ditekan. Di sinilah Indonesia bisa menjalankan peran diplomasinya baik melalui forum ASEAN, anggota G-20 dan yang lebih penting, melalui daya tawar komitmen penurunan emisinya secara global. Peran Indonesia untuk ikut menekan dan meyakinkan negara-negara maju dalam memenuhi komitmen mereka dalam upaya penurunan emisi global diperlukan. Dalam konteks seperti ini, peran Indonesia juga bisa diarahkan dalam rangka menegaskan konsepsi *climate justice* sebagaimana



telah digariskan sebagai mandat UNFCCC seperti praksis tanggung jawab sama tetapi dibedakan (*common but differentiated responsibilities*) dan hak untuk membangun bagi negara-negara berkembang (*rights to development*).

*Ketiga*, komitmen politik Indonesia dalam penegakan komitmen globalnya. Seperti telah disinggung di atas bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen atau 42 persen dengan dukungan asing dalam forum KTT G20 di Pittsburgh, 9 September 2009. Hal ini ditegaskan kembali oleh pemerintah di forum COP-15 di Copenhagen seraya menegaskan bahwa: *"As a non-Annex 1 country, we did NOT have to do this. But we read the stark scientific warnings of the IPCC. So we set our new reduction target, because we wanted to be part of global solution"*.<sup>41</sup>

Dari sisi politik ekologis Indonesia, penegasan ini menyiratkan setidaknya dua hal penting, yakni komitmen politik Indonesia untuk berperan secara aktif dari barisan kelompok negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan kontribusi emisi Indonesia sendiri secara nasional. Dengan posisi politiknya dalam kerangka G20, ASEAN dan salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia, komitmen ini menjadi sesuatu yang semestinya dilakukan oleh Indonesia. Presiden SBY sendiri telah menegaskan bahwa:<sup>42</sup>

*".... Science now also tells us that mitigation by developed countries alone will NOT be enough. Developing countries must also DO more, and they must commit to a low carbon development path so that they do not repeat the historical mistakes of industrial countries, and add to the climate problem. We have to be honest that there can be NO climate solution if developing countries do not take part"*.

Dilihat dari kontribusi emisi Indonesia terhadap tingkat emisi secara global, komitmen ini pun menjadi sesuatu yang "semestinya" dijalankan. Indonesia menjadi salah satu emitter GRK besar di dunia, ditandai dengan tingkat emisi tahunan mencapai 1,7 gigaton (gt) pada tahun 2000 dan 2,1 gt pada tahun 2005. Tanpa adanya upaya terobosan, tingkat emisinya mencapai 2,95 gt pada tahun 2020. Sebagai bagian dari langkah-langkah konkret selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang mematok kontribusi dari setiap sektor dalam memenuhi target penurunan emisi baik untuk mencapai skenario penurunan 21 persen maupun 41 persen.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Pidato Presiden RI dalam forum COP-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark, 17 Desember 2009, dalam *Pewarta*, Jakarta: Balitbang Departemen Luar Negeri, Thn. XXXVI, No. 126, Juli-Desember 2009: 52-54.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17288/LAMPIRAN%201%20612011.pdf>, diakses kembali 20 April 2012.



Terobosan lainnya, Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LoI) tentang kerja sama pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut Indonesia-Norwegia. Salah satu tujuannya diarahkan pada upaya kolaboratif dalam menopang pengembangan dan pelaksanaan strategi REDD+ Indonesia. Bagi upaya mitigasi global, kerja sama ini bernilai strategis. Indonesia memiliki hutan tropis terbesar kedua di dunia sementara pada saat yang sama tingkat deforestasi dan degradasi di Indonesia tergolong fantastis mencapai 0,5 juta ha per tahun pada awal paska-reformasi politik. Kerja sama itu sekaligus juga menguatkan komitmen global Indonesia dalam penurunan emisi. Sebagai, meminjam Dubes Hans Brattskar sebagai mantan ketua *the Norwegian Climate and Forest Initiative, a move changer*, Indonesia berperan penting dalam proyek REDD+. Sukses kerja sama REDD+ ini tentu nilainya sangat strategis karena tidak hanya akan menyangkut kredibilitas sebagai salah satu wakil negara-negara berkembang dalam mitigasi perubahan iklim tetapi sekaligus juga menjadi indikasi penguatan komitmen kebijakan penurunan emisi secara nasional.

## PENUTUP

Krisis keuangan dan ekonomi yang dialami sebagian negara anggota *Eurozone* sejak 2009 yang lalu telah menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin sulit dikelola oleh UE sendiri. Semakin sulit dielakkan karena besarnya derajat persoalan secara ekonomis dan persoalan politik yang menghantuinya. Secara ekonomis, krisis ini berada dalam kategori terberat sejak krisis ekonomi tahun 1930-an dan menjadi salah satu masalah terpenting dalam perekonomian global. Sementara itu, dimensi politis dari krisis ini adalah menurunnya dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan politik di negara-negara yang terkena krisis dan potensi terganggunya interaksi politik di lingkungan UE secara internal khususnya antara negara yang terkena krisis dengan negara-negara yang kuat secara fiskal. Bukan hanya itu, potensi bubarnya sistem mata uang bersama di negara-negara *Eurozone* juga mengarahkan pada pesimisme atas masa depan perekonomian global dalam beberapa tahun ke depan.

Ketidakpastian tersebut berdampak pada potensi gembosnya komitmen UE baik secara internal kawasan maupun kolektif dalam serangkaian program kerja sama pembangunan dengan negara-negara berkembang dalam penanganan isu-isu yang berdimensi global. Dalam aspek kerja sama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim misalnya, implikasinya dapat dilihat dari perubahan pendekatan dalam merespon dan penanganan isu-isu perubahan iklim secara global. Potensi pendekatan kebijakan seperti ini juga secara

relatif akan berpengaruh terhadap Indonesia meskipun dalam isu perubahan iklim, khususnya kebijakan penurunan emisi, Indonesia memiliki daya tawar secara politis melalui sejumlah kebijakan terobosan yang dilakukan.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu melakukan reorientasi kebijakan penurunan emisi dalam rangka memenuhi serangkaian tujuan yang telah ditetapkan baik untuk kepentingan nasional maupun global. *Pertama*, keperluan untuk mengawal baik secara diplomatis maupun politis proses pelebagaan sebuah rezim global penurunan emisi yang sifatnya mengikat bagi semua emiter besar dunia. Hal ini penting artinya karena mendesaknya pengelolaan isu perubahan iklim pasca-2020.

*Kedua*, peran Indonesia dalam mendorong secara aktif upaya pemenuhan komitmen pembiayaan global bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Titik singgung kepentingan ini terkait dengan situasi rentannya perekonomian dunia terutama di negara-negara industri dan dampak politik yang ditimbulkannya. Di sinilah Indonesia bisa menjalankan peran diplomatisnya baik melalui forum ASEAN, G-20 dan yang lebih penting, melalui daya tawar komitmen penurunan emisinya secara global untuk menagih komitmen mereka dalam upaya penurunan emisi global.

*Ketiga*, komitmen politik Indonesia dalam mewujudkan komitmen penurunan emisi secara nasional. Dengan upaya ini, Indonesia dapat berperan secara aktif dari barisan kelompok negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan kontribusi emisi Indonesia sendiri secara nasional. Termasuk di dalamnya adalah realisasi *Letter of Intent* (LoI) tentang REDD+ dengan Norwegia. Sukses kerja sama REDD+ ini tentu nilainya strategis karena tidak hanya akan menyangkut kredibilitas sebagai salah satu wakil negara-negara berkembang dalam penurunan emisi global tetapi juga sekaligus menjadi indikasi penguatan komitmen kebijakan penurunan emisi secara nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

Cerbu, Gillian A., Brent M. Swallow, and Dara Y. Thompson, "Locating REDD: A global survey and analysis of REDD readiness and demonstration activities", *Environmental Science & Policy* 14, Online: 168-180.

"Copenhagen deal reaction in quotes". *BBC News*. 19 December 2009; diretrif 19/12/2009; dikutip dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen\\_Accord](http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Accord); diakses 9 April 2012

Decision 2/ CP.15, dalam <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf>; diakses 9 April 2012.

European Environment Agency (EEA), *The European Environment---State and outlook 2010, Mitigating Climate Change*, Thematic Assessments, Copenhagen, 2011.

EEA, *The European Environment---State and Outlook 2010*, Synthesis. Copenhagen, 2011.

EEA, GHGs emission trends and projections in Europe 2009. EEA Report, No. 9/2009.

Frank Bsirske, "The Europe 2020 Strategy and the crisis", dalam Michael Sommer, Frank Bsirske & Wolfgang Rhode, *Business as Usual or a New Strategy for the Future? The EU 2020 Strategy from the Perspective of German Trade Unions*, International Policy Analysis, FES, June 2010: 1-12.

Frank Schroeder, "A Shot in the Arm for Climate Finance?, New Directions for Delivering on International Pledges and Development", FES, Study, Dec. 2010: 1-13.

*The Guardian*, 8,11/12/11 (sumber online).

"Global GHG Emissions Remained Stable in 2009", dalam <http://www.environmentalleader.com/2010/07/02/global-ghg-emissions-fell-7-in-2009/>; diakses 28/10/2011.

Gasper, Des. "The Human Security Approach as a Frame for Considering Ethics of Global Environmental Change", *IHDP Update*, Issue 2 (Bonn: June 2009): 14-18.

"Jerman Hibahkan RI 166,5 Juta Euro untuk *Green Energy*", in <http://economy.okezone.com/read/2011/10/22/19/518881/jerman-hibahkan-ri-166-5-juta-euro-untuk-green-energy>; diakses 1/11/2011.

Kumar, Ashwani and Dirk Messner, "Introduction Global Governance: Issues, Trends and Challenges", in Ashwani Kumar and Dirk Messner (eds.), *Power Shifts and Global Governance, Challenges form South and North*, London: Routledge, 2011.

Kenny, Thomas. "What is the European Debt Crisis?", dalam <http://bonds.about.com/od/advancedbonds/a/What-Is-The-European-Debt-Crisis.html>.com; diakses 3/4/2012.

Michael Sommer, "If not now, then when? What Social Europe needs is a fundamental policy shift", dalam Michael Sommer, Frank Bsirske & Wolfgang Rhode, *Business as Usual or a New Strategy for the Future? The EU 2020 Strategy from the Perspective of German Trade Unions*, International Policy Analysis, FES, June 2010: 1-12.

Manuel Schmitz, Europe's interests in Indonesia: What is to gain from closer cooperation?", *the Indonesian Quarterly*, Jakarta: CSIS, Fourth Quarter 2011, Vol.39, No. 4: 419-432.

Murdiyarso, Daniel. *Protokol Kyoto, Implikasinya bagi Negara Berkembang*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

The Netherlands Environmental Assessment Agency (NEAA), "Global GHG Emissions Remained Stable in 2009", dalam <http://www.environmentalleader.com/2010/07/02/global-ghg-emissions-fell-7-in-2009/>; diakses 28/9/2011.

Okereke, Chukwumerije. "Climate Justice and the international regime", in *WIREs Climate Change*, Vol. 1, May/June, 2010.

Swickard, Naomi and Kim Carnahan, "Integrating Project and National REDD+: the Important of the Private Sector", *Pathways for Implementing REDD+, Experiences from Carbon Markets and Communities*, Perspectives Series 2010, Copenhagen: UNEP Riso Centre, 2011.

Prasetyantoko, A. "Mengantisipasi Krisis Eropa", *Kompas*, 29/5/2012.

Pidato Presiden RI dalam forum COP-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark, 17 Desember 2009, dalam *Pewarta*, Jakarta: Balitbang Departemen Luar Negeri, Thn. XXXVI, No. 126, Juli-Desember 2009: 52-54.



### **Sumber Internet**

<http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17288/LAMPIRAN%201%20612011.pdf>, diakses kembali 20/4/2012.

<http://www.conferenceboard.ca/hcp/Details/Environment/greenhouse-gas-emissions.aspx>; diakses 5/11/2011.

[http://unfccc.int/methods\\_science/redd/demonstration\\_activities/items/4536.php#unredd](http://unfccc.int/methods_science/redd/demonstration_activities/items/4536.php#unredd); diakses 27/10/2011.

<http://www.forestclimatechange.org/fileadmin/downloads/f-indonesia/Erik%20Solheim%C2%92s%20opening%20session%20speech.pdf>; diakses 15/10/2011.

[http://www.earthscan.co.uk/tabid/102581/Default.aspx#dnn\\_ctr287409\\_ViewProductInfo\\_fragment3](http://www.earthscan.co.uk/tabid/102581/Default.aspx#dnn_ctr287409_ViewProductInfo_fragment3); diakses 27/10/2011.

## BIOGRAFI PENULIS

### **Rasbin, S.TP., M.SE.**

Lahir di Indramayu, 27 Juli 1981. Memperoleh gelar sarjana teknologi pertanian dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, FATETA, IPB (2005) dan Magister Sains Ekonomi dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2008). Sebelum menjadi peneliti pada P3DI Setjen DPR RI, penulis pernah mengikuti beberapa penelitian diantaranya penelitian kerja sama antara UI dan Sekjen ASEAN, APHI Bank Indonesia, dan LPEM-UI. Selain itu juga penulis aktif menjadi asisten dosen di Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan MPKP dan dosen di Unika Atmajaya, dan dosen tamu di Universitas Terbuka Jakarta.

### **Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., M.BA.**

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, ST, MBA adalah Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 1981. Menyelesaikan jenjang S-1 dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004 mengambil jurusan Teknik Kimia. Penulis kemudian melanjutkan ke jenjang S-2 di jurusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2009. Penulis menaruh minat pada permasalahan ekonomi dan kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan energi, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kebijakan Pendukung Batubara Sebagai Komponen Diversifikasi Energi 2025" (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik) dan "Kebijakan Pengendalian Harga Bahan Pangan" (Buletin Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik). Penulis dapat dihubungi melalui email: [sahatsilalahi81@gmail.com](mailto:sahatsilalahi81@gmail.com)

### **Ari Mulianta Ginting, S.E., M.SE.**

Ari Mulianta Ginting adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi Moneter. Bekerja di Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai calon Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Ditugaskan sebagai Tim Pendukung Badan Legislasi DPR RI, melakukan pendampingan pembentukan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, Revisi Undang-Undang Keuangan



Negara, harmonisasi RUU Resi Gudang, serta melakukan pendampingan dalam Pansus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer sejak tahun 2008 untuk mata kuliah Statistika I dan II untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: ari.ginting@dpr.go.id

### **Eka Budiyantri, S.Si., M.Sc.**

Eka Budiyantri lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1984. Penulis menempuh pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Matematika dengan kekhususan Matematika Terapan (*Applied Mathematics*) pada tahun 2001. Selepas lulus sarjana, Penulis kemudian melanjutkan studi Pasca Sarjana di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi kekhususan Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2006. Setelah menyelesaikan studi Pasca Sarjana pada tahun 2008, Penulis juga sempat ikut dalam beberapa proyek penelitian di lingkungan Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti dan sebagai *research fellow* di Direktorat Internasional Bank Indonesia. Selain itu Penulis juga sempat aktif mengajar sebagai asisten dosen di Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Saat ini Penulis merupakan peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun beberapa jurnal atau tulisan yang pernah dibuat oleh Penulis antara lain: "Analisis Kemungkinan Penerapan Model Target Tingkat Harga di Indonesia Untuk Mencapai Stabilitas Harga: Sebuah Alternatif *Inflation Targeting*", "Analisis Faktor Fundamental Ekonomi yang Mempengaruhi Risiko Pinjaman Luar Negeri Indonesia", "Analisis Rendahnya Penyerapan Subsidi Pajak", "Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan", dan "Ketahanan Ekspor Indonesia dalam Menghadapi Krisis Eropa". Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Penulis dapat diperoleh melalui email: eqa\_blue@yahoo.com atau eka.budiyantri@gmail.com

### **Galuh Prila Dewi, S.P., M.Si.**

Penulis lahir di Wonogiri pada tanggal 13 April 1982. Mengawali pendidikan tinggi di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2000 dan menyelesaikan pada tahun 2004. Gelar Magister Sains diperoleh dari Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2008. Bekerja sebagai peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Penulis dapat dihubungi pada galuhpriladewi@yahoo.com.

**Iwan Hermawan, S.P., M.Si.**

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 11 Juni 1978. Penulis memperoleh gelar Sarjana Pertanian di bidang Agrobisnis dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2002 dan *Master Sains* dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan pascasarjana, penulis bekerja sebagai peneliti di Pusat Pengajian, Pengolahan Data dan Informasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta pada tahun 2009 hingga sekarang. Tulisan-tulisan yang pernah ditulis, yaitu jurnal yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Serat Kapas di Indonesia*, *Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia*, dan *Analisis Dampak Kebijakan Tarif Impor Serat Kapas terhadap Kesejahteraan Petani Serat Kapas di Indonesia*, dan tulisan di dalam buku yang berjudul *Ekonomi Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia dan Peran Sektor Pertanian untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia dalam Turbulensi Ekonomi*. Tulisan kali ini memiliki tema tentang ekspor kakao Indonesia di pasar dunia, khususnya ekspor ke wilayah Uni Eropa dan Amerika. Krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa dan di Indonesia juga dianalisis di dalamnya.

**Hariyadi, S.IP, MPP.**

Hariyadi, SIP, MPP, lahir di Banyumas, 11 Desember 1970, staf peneliti madya kebijakan publik P3DI Setjen DPR RI, Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (1990-1995) dan program *master in public policy* di Faculty of Business, Economics, and Policy Studies, Univ. Brunei Darussalam (2001-2002). Sejumlah program pelatihan yang pernah diikuti antara lain, *Joint Training Program in Parliamentary Research and Information Service Provision*, disponsori the *Centre for Democratic Institution*, Parliament House, Canberra, Australia (16-27 Agustus 1999), *Parliamentary Internship Program*, Lok Sabha Secretariat, New Delhi India, dalam skema *ITEC Plan Sponsorship* (1 – 30 November 2007) dan *Advanced Professional Training, Managing Global Governance*, Bonn, Germany ( Juni – Desember 2011). Sebagai staf peneliti di Setjen DPR RI, penulis terlibat dalam sejumlah proses penyiapan RUU dan tim kerja terkait lainnya di lingkungan Alat Kelengkapan Dewan dan Setjen DPR RI, seperti RUU Jabatan Notaris, RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden, RUU Sistem Perbukuan Nasional dan lain-lain.